SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jontis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018, terjadi karna perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13 Peraturan .....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

21. Peraturan .....

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);

24. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28);

26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;

27. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 179) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 .....

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Selanjutnya di Sebut Perubahan RKPK Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Perubahan RKPK Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas program daerah, rencana kerja, pengadaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018.

2. Perubahan RKPK Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
   a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPK tahun 2018;
   b. Pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan dan evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Tahun 2018 termasuk didalamnya Perubahan Kebijakan Umum (PKU) APBK dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBK Tahun 2018.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBK Tahun 2018 :

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggunakan Perubahan-RKPK Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan PKU-APBK pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK);

2. SKPK menggunakan Perubahan RKPK Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggran (P-RKA) SKPK dengan DPRK.

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 27 Juli 2018 M
14 Dzulqa' idah 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 30 Juli 2018 M
17 Dzulqa' idah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 257

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i-1

DAFTAR GAMBAR i-2

DAFTAR GRAFIK ..... i-

DAFTAR TABEL ..... i-

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4. Sistematika Dokumen RKPK I-6
1.5. Maksud dan Tujuan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah. II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK II-99
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya II-115

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN III-1
3.1.Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya III-1
3.2.Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Nagan Raya III-16

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 ..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah IV-8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPK	I-6
Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2016	II-3
Gambar 2.2	Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016	II-4
Gambar 2.3	Peta Kelas Lereng Kabupaten Nagan Raya	II-8
Gambar 2.4	Persentase Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016	II-16
Gambar 2.5	Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015.....	II-23
Gambar 2.6	IPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014.....	II-27
Gambar 2.7	Indeks Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014	II-27
Gambar 2.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014.....	II-30
Gambar 2.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2010	II-30
Gambar 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2012.....	II-35
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2013.....	II-37
Gambar 2.12	Angka Melek Huruf Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 dan 2015	II-46
Gambar 2.13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya dan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011.....	II-47

Gambar 2.14 Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian dan Nonpertanian, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2014..... II-92

Gambar 3.1 PDRB Sektor Pertanian dan Nonpertanian, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2015..... III-5

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-2

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-3

Tabel 2.3 Jumlah Desa Menurut Letak Desa Berdasakan Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-6

Tabel 2.4 Jumlah Desa dan Letak Desa Berdasakan Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-7

Tabel 2.5 Kemiringan lahan Menurut Kelasnya dan Persentase Luas Areal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-8

Tabel 2.6 Perkembangan Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 -2015..... II-10

Tabel 2.7 Jumlah Hari Hujan menurut Bulan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2015 ..... II-10

Tabel 2.8 Intensitas Hujan Harian Rata-Rata II-11

Tabel 2.9 Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Prioritas Pengelolaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-13

Tabel 2.10 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-16

Tabel 2.11 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-18

Tabel 2.12 Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya II-19

Tabel 2.13 Lokasi Rawan Bencana Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-21

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya 2011 -2016 ..... II-22

Tabel 2.15 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

	Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014	II-24
Tabel 2.16	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan RayaTahun 2010-2014.....	II-25
Tabel 2.17	IPM beserta Komponennya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015	II-28
Tabel 2.18	Jumlah, Persentase Perkembangan Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2016	II-29
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016	II-33
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2013.....	II-34
Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2013.....	II-36
Tabel 2.22	Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015.....	II-38
Tabel 2.23	Perkembangan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014.....	II-39
Tabel 2.24	Perkembangan Peserta Didik dan Laju Pertumbuhan Rata-Rata Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012	II-41
Tabel 2.25	Perkembangan Tenaga Pendidik (Guru) dan Laju Pertumbuhan Rata-Rata Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014.....	II-42
Tabel 2.26	Perkembangan Rasio Tenaga Pendidik (Guru) dengan Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014	II-44
Tabel 2.27	Perkembangan Rasio Murid dengan Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014.....	II-45
Tabel 2.28	Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 dan 2015.....	II-46
Tabel 2.29	Jumlah Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	

	Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011	II-48
Tabel 2.30	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013	II-49
Tabel 2.31	Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2015	II-52
Tabel 2.32	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2015.....	II-53
Tabel 2.33	Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2015	II-54
Tabel 2.34	Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2015	II-55
Tabel 2.35	Rasio Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2015	II-56
Tabel 2.36	Persentase Penolong Persalinan Bayi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015	II-57
Tabel 2.37	Rata-rata Lama Balita Usia 0-24 Bulan Mendapat ASI Kabupaten Nagan Raya 2014-2015	II-58
Tabel 2.38	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal Kabupaten Nagan Raya 2014.....	II-59
Tabel 2.39	Jumlah Industri, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Omset/Bulan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011- 2016	II-60
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Koperasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016.....	II-61
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015.....	II-62
Tabel 2.42	Capaian Prestasi Bidang Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2016.....	II-63
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012	II-64

Tabel 2.44 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015..... II-65

Tabel 2.45 Proporsi Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2011..... II-66

Tabel 2.46 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2015 ..... II-67

Tabel 2.47 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2015..... II-67

Tabel 2.48 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015..... II-68

Tabel 2.49 Panjang Jalan Jumlah Kendaraan dan Izin Trayek Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008-2013..... II-68

Tabel 2.50 Jumlah Kelembagaan Masyarakat (LPM, PKK Aktif) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016..... II-69

Tabel 2.51 Jumlah Kelembagaan Masyarakat (LPM, PKK) yang Dibina Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016..... II-69

Tabel 2.52 Jumlah Desa Menurut Status Desa Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016..... II-69

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Seni, Budaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2014..... II-70

Tabel 2.54 Jumlah Pustaka Daerah (Unit) Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 - 2016..... II-70

Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Pengunjung Pustaka Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2016..... II-71

Tabel 2.56 Fasilitas Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016..... II-71

Tabel 2.57 Jumlah Linmas dan Pos Siskamling Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 - 2016..... II-72

Tabel 2.58 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 – 2016..... II-72

Tabel 2.59 Jumlah Partai Politik Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 – 2015..... II-73

Tabel 2.60 Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas dan Pernah Kawin Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan Tahun 2014-2016 ..... II-74

Tabel 2.61 Jumlah Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015..... II-74

Tabel 2.62 Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah dan Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016.. II-75

Tabel 2.63 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 ..... II-75

Tabel 2.64 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Intensifikasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016..... II-76

Tabel 2.65 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016..... II-76

Tabel 2.66 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Komoditas Hortikultura di Kabupaten Nagan Raya 2016. II-77

Tabel 2.67 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Komoditas Palawija Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016. II-77

Tabel 2.68 Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016..... II-78

Tabel 2.69 Luas Tanam, dan Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 - 2015..... II-78

Tabel 2.70 Rata-Rata Produksi Komuditas Perkebunan Menurut Jenis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015..... II-80

Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Petani Perkebunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 -2015..... II-81

Tabel 2.72 Perubahan Peruntukan Hutan Menjadi Bukan kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 - 2015 ..... II-81

Tabel 2.73 Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (Unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015..... II-82

Tabel 2.74	Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015.....	II-82
Tabel 2.75	Produksi Budidaya Perikanan Darat, Nilai Produksi, dan Luas Areal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 – 2012..	II-83
Tabel 2.76	Produksi Budidaya Tambak, Nilai Produksi, dan Luas Areal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 - 2015.....	II-84
Tabel 2.77	Produksi Budidaya Kolam, Nilai Produksi dan Luas Areal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011- 2016.....	II-85
Tabel 2.78	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011- 2016.....	II-86
Tabel 2.79	Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010- 2016.....	II-87
Tabel 2.80	Jumlah Alat Tangkap Ikan dan Jumlah Armada Penangkapan Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011- 2016.....	II-88
Tabel 2.81	Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan (Unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011- 2016.....	II-89
Tabel 2.82	Kondisi Hutan Bakau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009- 2014.....	II-89
Tabel 2.83	Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010- 2015.....	II-90
Tabel 2.84	Kondisi Panjang Jaringan Jalan Menurut Status Jalan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015.....	II-93
Tabel 2.85	Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015.....	II-94
Tabel 2.86	Penggunaan Lahan Menurut Jenis Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015	II-97
Tabel 2.87	Persentase Penduduk 15 tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah yang Dimiliki) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016	II-98
Tabel 2.88	Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2016.....	II-99
Tabel 2.89	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapaten Nagan Raya Tahun 2010 - 2016 ..	II-101

Tabel 2.90	Identifikasi Permasalahan Peneyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-125
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2015	III-7
Tabel 3.1	Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Menurut Kota (Bulan Februari 2017)	III-10
Tabel 3.2	Tingkat Laju Inflasi menurut Kota, Februari Tahun 2017, dan Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	III-11
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2018	III-20
Tabel 3.4	Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2016	III-21
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2018	III-21
Tabel 3.6	Pertumbuhan Rata-rata Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nagan Raya (2014 – 2016)	III-23
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 s/d 2018	III-24
Tabel 3.8	Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016 yang Dinilai Relatif Tepat dan Wajar	III-25
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2016 (Dalam Rupiah)	III-27
Tabel 3.10	Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 – 2019 (Dalam Rupiah)	III-28
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2018 (Dalam Rupiah)	III-30
Tabel 4.1	Hubungan Visi / Misi dan Tujuan Pembangunan Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat Islam	IV-3

Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah IV-13

Tabel 5. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 ..... V-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 29 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPK disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPK disusun melalui persiapan penyusunan RKPK, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan akhir RKPK dan penetapan RKPK.

Pembangunan yang dilaksanakan di Nagan Raya dari tahun ketahun pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan. Aspek pembangunan yang dilaksanakan meliputi

infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi dan politik, bahkan sampai kepada kualitas lingkungan hidup.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPK mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagan Raya mengingat beberapa hal, yaitu:

1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Nagan Raya yang ditetapkan dalam RPJM Nagan Raya tahun 2017-2022 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPK memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK);
3. RKPK merupakan acuan Bupati Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
4. RKPK merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMK Nagan Raya sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten hingga tahun berkenaan.

Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2019 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi dan Strategis untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Potensi Lokal". Pembangunan berkualitas yang dimaksud adalah peningkatan kualitas sarana prasarana serta pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing tenaga kerja dan industri serta peningkatan akses, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah untuk pertumbuhan ekonomi daerah serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi penekanan pembangunan di Tahun 2019. Selain itu, penyusunan RKPK

Tahun 2019 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPK Nagan Raya Tahun 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten, yang terdiri atas RPJPK, RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, dan Renja SKPK. Perencanaan pembangunan kabupaten juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan kabupaten. Untuk lebih jelasnya hubungan RKPK dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPK

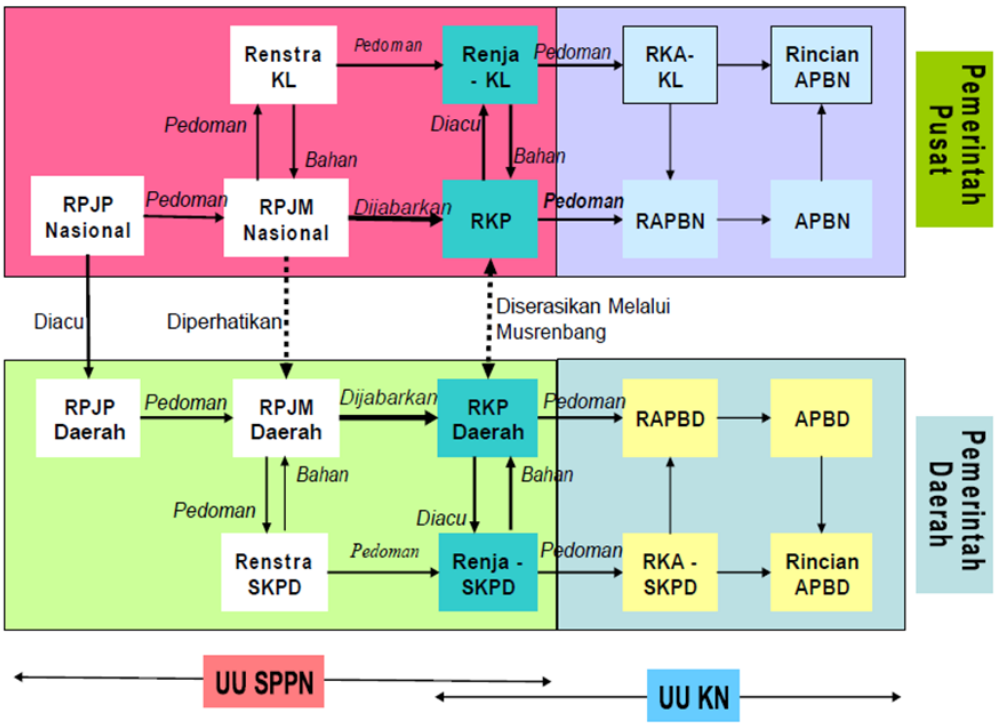

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPK Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagan Raya, DPRK Nagan Raya, Dunia Usaha dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2019;

2. Memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
3. Pencerminan komitmen Pemerintah Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPK Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPK) Tahun 2019;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBK Tahun 2019;
3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;
4. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam Kebijakan Umum APBK 2019; dan
5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

1.5. Sistematika Dokumen RKPK

RKPK Nagan Raya Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

   Berisi gambaran umum penyusunan RKPK yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPK agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMK, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan.

   Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah kabupaten yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019.

   Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

   Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPK) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK.

6. Bab VI Penutup.

   Mengemukakan kaidah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Nagan Raya Tahun 2019.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten yang ber ibukota Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong.

Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 1.076,97 Km^2 atau 30,38% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya, serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,56 Km^2 atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 2.1 dan 2.2; Gambar 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Luas (%)	Jarak Dari Kota Kec Ke Ibu Kota Kab (Km)
1	Kuala Pesisir	Padang Rubek	7,634.29	2.15	23
2	Kuala	Ujong Fatihah	8,805.75	2.48	6
3	Suka Makmue	Lueng Baro	5,156.31	1.45	3
4	Seunagan	Jeuram	5,673.29	1.60	10
5	Seunagan Timur	Keude Linteung	25,161.03	7.10	15
6	Beutong	Babussalam	101,731.44	28.70	26
7	Beutong Ateuh Banggalang	Kuta Teungoh	40,591.94	11.45	62
8	Tadu Raya	Alue Bata	38,003.01	10.72	10
9	Tripa Makmur	Kabu	14,036.67	3.96	32
10	Darul Makmur	Alue Bilie	107,697.40	30.38	48
Jumlah			**354,491**	**100**	**235**

Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah)

Gambar 2.1

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya

Menurut Kecamatan Tahun 2016



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (diolah)

Tabel 2.2

Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Kecamatan	Kemukiman	Gampong/Desa
1	Kuala Pesisir	3	16
2	Kuala	2	17
3	Suka Makmue	2	19
4	Seunagan	5	35
5	Seunagan Timur	4	34
6	Beutong	4	24
7	Beutong ateuh Banggalang	1	4
8	Tadu Raya	2	22
9	Tripa Makmur	2	11
10	Darul Makmur	5	40
Jumlah Total		**30**	**222**

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 2.2

Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

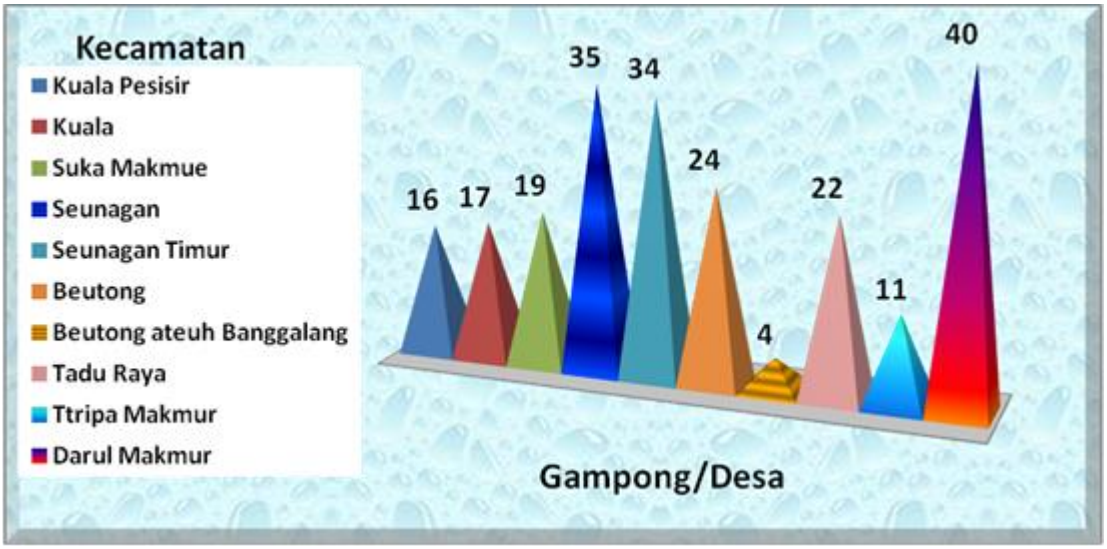

Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035(diolah)

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43’ 50” – 04° 37’ 55” Lintang Utara (LU) dan 96° 11’ 23” – 96° 47’ 58” Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 3.544,91 Km^{2} atau 354.491,05 Ha atau sebesar 6,25 % dari luas Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan batas – batas wilayah administratif diatas, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan . Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat – wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah.

Selain itu, posisi Kabupaten Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara.

2.1.1.2 Struktur Tanah

Bila dilihat dari struktur dan jenis,tanah diKabupaten Nagan Raya terdiri dari jenis tanah podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out Croups, Renzina, Litosol, Mediterandan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah ini berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi.

2.1.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2) Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3) Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
4) Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5) Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas ± 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
6) Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas ± 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

2.1.1.4 Klimatologi

Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,0° C sampai 28,0° C. Suhu terendah terjadi di Bulan Oktober dan Desember yaitu 26,0° C dan suhu tertinggi terjadi di Bulan Maret yaitu 28,0° C. Kelembaban udara berkisar antara 85 – 92 %. Curah hujan yang terjadi selama Tahun 2016 sebesar 4.440 mm dengan rata-rata hujan sebesar 370 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 653 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 105 mm. Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban Tahun 2016

Penggunaan	Suhu Udara (°C)	Curah Hujan (mm^3)	Kelembaban (%)
Januari	27,5	495	90
Februari	27,1	261	91
Maret	28	271	88
April	27,8	354	87
Mei	27,2	653	89
Juni	26,9	303	85
Juli	26,5	105	85
Agustus	26,3	566	86
September	26,4	170	85
Oktober	26	477	89
November	26,1	523	91
Desember	26	262	92
Rata-rata	26,82	370,00	88,17

Sumber : BMKG Cut Nyak Dhien Tahun 2016

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seunagan, Trang, Tripa dan Seumayam. Selain itu terdapat dua DAS yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu DAS Tadu dan Seuneuam.

Kabupaten Nagan Raya dialiri beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng Beutong, Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Tadu, dan Krueng Seumayam. Sebagai daerah hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan terutama di daerah hilir. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karakteristik wilayah di mana perbandingan panjang

sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya di daerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah).

Danau yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau, sebagai berikut:

- Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
- Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
- Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
- Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha.

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan air tanah di Kabupaten Nagan Raya seluas 205.343,46 ha. Rincian CAT terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya

NO	CAT		KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (ha)
1	Meulaboh		Nagan Raya	Darul Makmur	73.547,25
				Kuala	12.089,35
				Kuala Pesisir	6.109,97
				Tadu Raya	34.420,65
				Beutong	24.041,59
				Seunagan	5.673,31
				Suka Makmue	5.156,31
				Seunagan Timur	23.281,39
				Tripa Makmur	18.486,39
2	Telege		Nagan Raya	Beutong Ateuh Banggalang	2.537,25

Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Titik Lokasi Sumber Air Baku					
		Sungai	Rawa	Danau	Air Terjun	Mata Air	Embung
1	Darul Makmur	10	-	-	1	2	-
2	Kuala	2	-	-	-	1	-
3	Kuala Pesisir	4	2	-	-	-	1
4	Tadu Raya	8	-	1	-	-	-
5	Beutong	9	-	-	1	-	-
6	Seunagan	3	-	-	-	1	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2	-	-	-	2	-
9	Tripa Makmur	4	-	-	-	-	-
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	-	-	1	1	-

Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2016

2.1.1.6 Geologi

Jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah Alluvial, Podsolik coklat, Grumosol, Regosol, Podsolik merah kuning, Andosol, Litosol, Mediteran, Organosol, dan Podsolik. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terbagi atas beberapa bagian atau fungsi yaitu daerah daratan yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah rawa terdapat di sepanjang pantai.

Pemanfaatan lahan cenderung ke arah bagian Utara, terutama kegatan budidaya pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan/tambak), pemukiman penduduk serta perdagangan dan jasa. Secara morfologi wilayah Nagan Raya terbagi pada tiga wilayah yaitu: wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Kawasan pemukiman perkotaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Nagan Raya lebih banyak terkonsentrasi di pusat Ibukota kecamatan, terutama yang dilintasi oleh jalan negara dan jalan provinsi dari barat ke timur atau sebaliknya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh hutan, perkebunan dan pertanian lahan kering. Pada Tahun 2015, penggunaan lahan untuk Bandara sebesar 103,25 Ha atau 0,03%, danau sebesar 114,89 Ha atau 0,03 %, hutan sebesar 163.459,49 Ha atau 46,11 %, industri sebesar 334,80 Ha atau 0,09 %, perkebunan sebesar 54.417,29 Ha atau 15,35 %, perkebunan masyarakat 32.964,54 Ha atau 9,30%, pemukiman sebesar 8.517,18 Ha atau 2,40%, pertanian lahan kering 61.520,71 atau 17,35%, rawa sebesar 13.271,65 Ha atau 3,74%, sawah 12.777,64 Ha atau 3,60%, sungai 2.194,20 Ha atau 0,62% dan tanah terbuka 4.815,49 Ha atau 1,36 % dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.6 dan gambar 2.3 berikut ini.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Eksisting
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Keterangan	Luas Lahan (Ha)	Persentase Luas Lahan (%)
1	Bandara	103,25	0,03
2	Danau	114,89	0,03
3	Hutan	163.459,49	46,11
4	Industri	334,80	0,09
5	Perkebunan	54.417,29	15,35

6	Perkebunan Masyarakat	32.964,54	9,30
7	Pemukiman	8.517,18	2,40
8	Pertanian Lahan Kering	61.520,71	17,35
9	Rawa	13.271,65	3,74
10	Sawah	12.777,64	3,60
11	Sungai	2.194,20	0,62
12	Tanah Terbuka	4.815,49	1,36
Jumlah		**354,491.13**	**100.00**

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Gambar 2.3
Persentase Penggunaan Lahan Eksisting
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

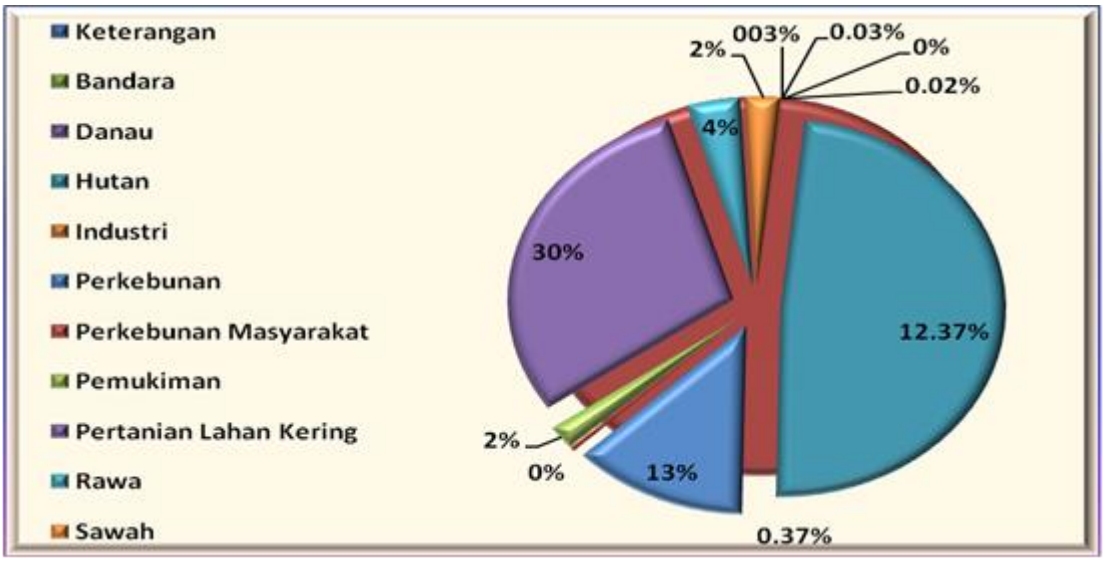

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

2.1.1.8 Pengelolaan Kawasan Lindung

Sebagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan Kawasan Lindung, sehingga dalam pemanfaatan kawasan harus mengacu pada pola pemanfaatan ruang kawasan lindung yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan

ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan Kawasan Lindung di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk:

a) Mengarahkan fungsi kawasan lindung yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana;
b) Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air;
c) Mengendalikan pemanfatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Nagan Raya seluas 126.108.96 Ha adalah:

a) Kawasan lindung

   Kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya terdapat wilayah Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 Ha berada di Gampong Pulo Teungoh; Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 Ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang; Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 Ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk dan Kuta Teungoh; dan Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 Ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem dan Krueng Seumanyam.
b) Kawasan perlindungan setempat

   Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam tiga jenis yaitu kawasan sempadan pantai seluas 497,45 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 8.961,28 Ha dan kawasan sekitar danau 156,71 Ha.

2.1.1.9 Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan lindung dan budidaya tahun 2016 di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Luas Kawasan Lindung dan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Uraian	Luas Areal Kawasan Lindung(Ha)
Kawasan Hutan Lindung		
1	Kawasan Hutan Lindung	126.108,96
Kawasan Yang Memberi PerlindunganKawasan Bawahnya		
1	Kawasan Rawa gambut	11.380,71
Kawasan Perlindungan Setempat		
1	Kawasan Spamdan Pantai	497,45
2	Kawasan Spamdan Sungai	8.961,28
3	Kawasan sekitar Danau	156,71
Kawasan Hutan Produksi		
1	Hutan Produksi	16.348,253
2	Hutan Produksi Terbatas	6.637,598
3	Hutan Produksi Koversi	4.658,14
Kawasan Rawan Bencana Alam		
1	Kawasan Rawan Longsor	6.523,94
2	Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi	15.702,08
3	Kawasan Rawan Kebakaran	1,363.60
4	Kawasan Rawan Banjir	92,352.28

Kawasan Pertanian		
1	Kawasan Lahan Basah	12.777,64
2	Kawasan Lahan Kering	64.520,71
Kawasan Perkebunan		
1	Perkebunan Besar	54.417,29
2	Perkebunan Rakyat	2.064,40
Kawasan Peternakan		
1	Peternakan Besar	113,33

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Tabel 2.7 di atas memperlihatkan luas pemanfaatan lahan Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2016. Luas lahan tersebut memberikan gambaran perbandingan terhadap lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Status Penguasaan Lahan di wilayah Kabupaten Nagan Raya saat ini yang terindentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH), Perkebunan Besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Tabel 2.8

Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung		Kawasan Budidaya	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Darul Makmur	21,486,159	16,6	4,608,15	29,69
2	Kuala	-	-	-	-
3	Kuala Pesisir	-	-	-	-
4	Tadu Raya	-	-	-	-

5	Beutong	75,149,446	58,2	5,986,29	37,79
6	Seunagan	-	-	-	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2,446,702	1,9	5,246,36	33,12
9	Beutong Ateuh Banggalang	30,026,599	23,3	5,246,36	33,12
10	Tripa Makmur	-	-	-	-
Jumlah		**129,108,96**	**100**	**1,584,080**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

2.1.1.10 Kawasan Rawan Bencana Alam

Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam).

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kacamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

Gambar 2.4

Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya

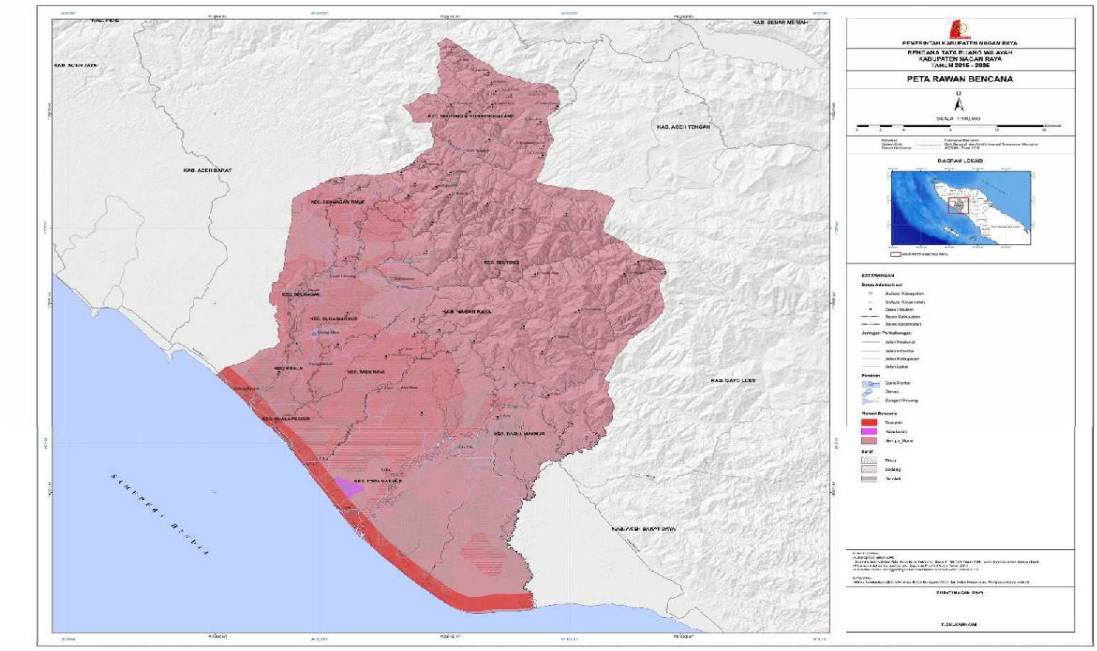

Sumber : RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 – 2035

2.1.1.11 Demografi

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2016 sebanyak 158.223 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 79.788 jiwa laki-laki (50,43%) dan 78.435 jiwa perempuan (49,57%). Sementara itu angka sex rasio sebesar 102%, ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 98 penduduk perempuan.

Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 44.237 Jiwa atau 28% dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 1.916 Jiwa atau 1,2% dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,05%.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2016 mencapai 45 Jiwa/Km^2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu

Kecamatan Seunagan mencapai 289 Jiwa/Km^2. Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya

Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

	Kecamatan *Subdistrict*	Jenis Kelamin *Sex*			Rasio Jenis Kelamin *Sex Ratio*
		Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Darul Makmur	22 593	21 568	44 161	105
2	Tripa Makmur	4 437	4 465	8 902	99
3	Kuala	10 614	10 356	20 970	102
4	Kuala Pesisir	8 084	7 874	15 958	103
5	Tadu Raya	6 525	6 144	12 669	106
6	Beutong	7 108	7 102	14 210	100
7	Beutong Ateuh Banggalang	973	926	1 899	105
8	Seunagan	8 146	8 335	16 481	98
9	Suka Makmue	4 556	4 552	9 108	100
10	Seunagan Timur	6 752	7 113	13 865	95
	Nagan Raya	**79 788**	**78 435**	**158 223**	**102**

Sumber: Database Pembangunan Kab. Nagan Raya,2016

Tabel 2.10

Perkembangan Penduduk Kab. Nagan Raya Tahun 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk (jiwa)	152.130	158.956	162.448	155.070	158.223
LPP (%)	6,49	4	2,2	-4,54	2,05

Sumber: BPS Kab.Nagan Raya Tahun 2016

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagan Raya PerKecamatan

Tahun 2015-2016

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan
		Tahun 2015	Tahun 2016	%
1	Darul Makmur	43.311	44.237	2,14
2	Tripa Makmur	8.763	8.955	2,19
3	Kuala	20.593	21.004	4,69
4	Kuala Pesisir	15.670	15.985	1,53
5	Tadu Raya	12.430	12.670	1,53
6	Beutong	13.916	14.203	2,31
7	Beutong Ateuh Banggalang	1.863	1.916	0,38
8	Seunagan	16.089	16.387	1,85
9	Suka Makmue	8.914	9.089	1,09
10	Seunagan Timur	13.521	13.777	2,87
Jumlah		**155.070**	**158.223**	**2,05**

Sumber:BPS Kabupaten Nagan Raya

2.1.1.12 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 meningkat dari 37 jiwa per kilometer menjadi 46 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2014. Pada tahun 2014 Tingkat Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Seunagan sebanyak 297 per km2 dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang 5 jiwa per km^2. di Kecamatan Tadu Raya kepadatan penduduk terjadi fluktuasi (naik dan turun) setiap tahun. Pada tahun 2010 kepadatan penduduk di wilayah ini sebanyak 39 jiwa per km2, namun pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 33 jiwa per km2. Pada tahun 2012-2013 terjadi Kenaikan sebesar 40 jiwa per km2. Pada Tahun 2014 terjadi lagi penurunan sebesar 37 jiwa per km2. Gambaran lebih lanjut mengenai penyebaran/kepadatan penduduk tiap-tiap kecamatan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan RayaTahun 2010-2014

NO	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Darul Makmur	45	39	42	44	14
2	Kuala	263	157	155	169	178
3	Kuala Pesisir	71	189	199	206	215
4	Tadu Raya	39	33	40	40	37
5	Beutong	11	13	13	14	14
6	Seunagan	103	261	274	280	297
7	Suka Makmue	247	159	167	174	181
8	Seunagan Timur	47	49	51	55	56
9	Beutong Ateuh Banggalang	-	4	5	5	5
10	Tripa Makmur	-	43	47	48	49
Jumlah Total		**37**	**37**	**42**	**45**	**46**

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2015

Distribusi penduduk belum dapat ditabulasi dengan baik dan hal ini merupakan fakta yang ditemui dilapangan. Dari tabel 2.12, menunjukkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 adalah 46 jiwa/km2. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di Kecamatan Seunagan dan yang terkecil yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB dapat menunjukkan peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya.

Dilihat dari PDRB Kabupaten Nagan Raya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terjadi peningkatan nilai PDRB tahun 2012-2016. Ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Nagan Raya meningkat pada 2012 sampai 2016. Pada tahun 2012, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4,96 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi RP 6,18 triliun tahun 2016. Rata-rata kenaikan tiap tahun sebanyak 0,244 triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. Tahun 2016 nilai PDRB mengalami peningkatan sebanyak 0,4 triliun rupiah. Kenaikan ini merupakan kenaikan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Gambar 2.5

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah)

2012 - 2016

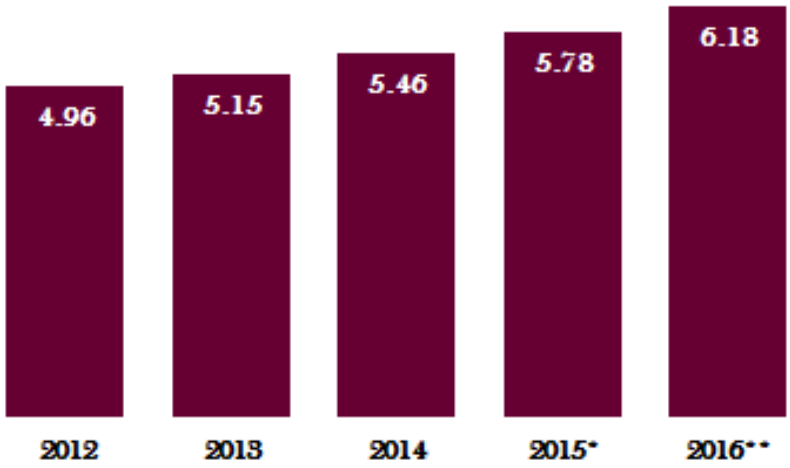

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

Sementara PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk melihat nilai PDRB yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (perkembangan riil) maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2012-2016 seperti pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2012, nilai PDRB atas dasar harga konstan adalah 4,87 triliun rupiah dan terus naik menjadi 5,66 triliun rupiah pada

tahun 2016. Kenaikan ini menunjukkan selama tahun 2012-2016 terjadi peningkatan produktivitas (output) ekonomi secara agregat (menyeluruh) dari keseluruhan kategori lapangan usaha di kabupaten Nagan Raya.

Secara rata-rata, PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan sebanyak 0,158 triliun rupiah per tahun pada periode 2012-2016. Oleh karena itu, kenaiikan PDRB ADHB lebih dua kali lipat dibandingkan kenaikan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga lebih dominan dibandingkan dengan kenaikan produksi di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya
(Triliun Rupiah), 2012- 2016

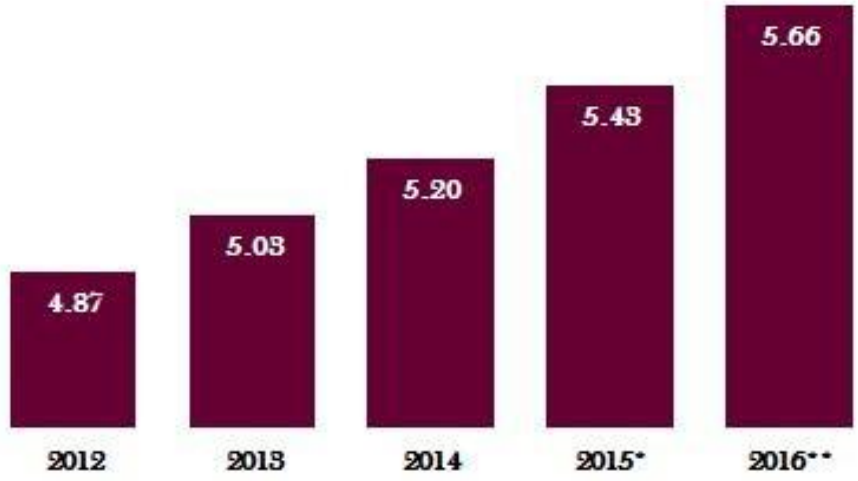

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB suatu daerah. Struktur ekonomi disebut berubah jika terjadi perubahan kategori atau lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB digantikan dengan kategori lainnya pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Sampai tahun 2016 struktur ekonomi masyarakat Nagan Raya masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari yang paling besarnya kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten Nagan Raya. Kategori ini masih menjadi andalan bagi masyarakat Nagan raya yang ditunjukkan dengan kontribusinya yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki peranan sebesar 38,15 persen. Tahun 2016 kontribusi kategori ini sudah mencapai 46 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan kategori ini bersifat padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di kabupaten Nagan raya.

Selanjutnya, kategori yang juga patut diperhitungkan dalam pembentukan PDRB Nagan Raya yaitu Pertambangan dan Penggalian. Walaupun terjadi penurunan kontribusi kategori ini dalam lima tahun terakhir tetapi kategori ini memiliki peranan ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2016. Pada tahun 2015 kategori ini berkontribusi sebesar 14,85 persen dan merupakan kategori dengan kontribusi terbesar kedua setelah ketegori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan tahun 2016 kontribusinya menjadi 10,14 persen. Menurunnya produksi dan harga batubara pada tahun 2016 berperan besar dalam penurunan kontribusi kategori ini.

Gambar 2.7

Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen), 2016

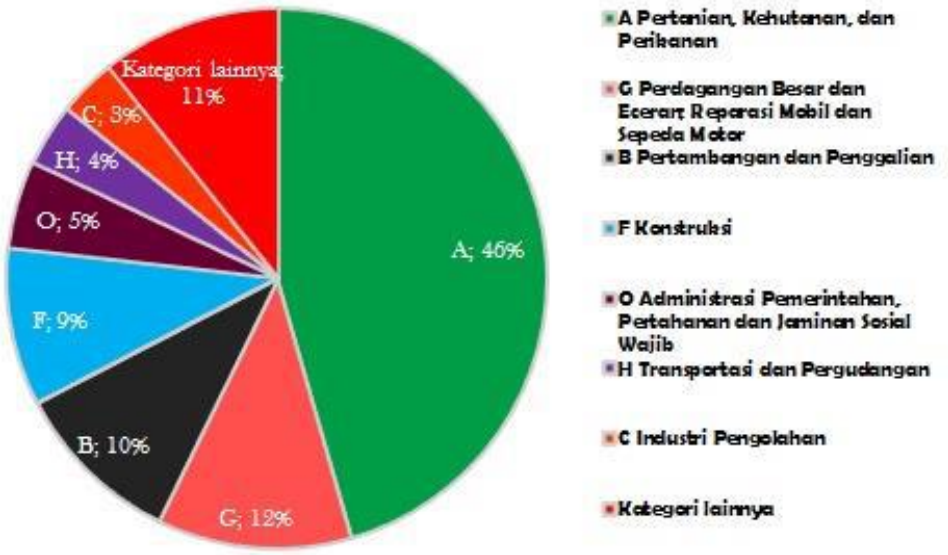

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

Struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012-2016 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini terlihat bahwa peranan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan paling besar dibandingkan dengan 16 kategori lainnya dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Kategori pertambangan dan penggalian berada di urutan kedua pada tahun 2012-2015 dan berada di peringkat ketiga dalam pembentukan PDRB tahun 2016. Kedua kategori ini termasuk pada kelompok kategori primer dalam perekonomian. Kategori primer memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2012-2016 dengan kontribusi antara 55-62 persen walaupun kategori primer ini menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir.

Kategori sekunder (kategori industri pengolahan, kategori listrik, gas, dan air, serta kategori konstruksi) memiliki kontribusi sekitar 9-13 persen pada periode 2012-2016. Berbeda dengan kategori primer, kategori sekunder menunjukkan tren kenaikan pada 2012-2016. Sedangkan peranan kelompok kategori tersier (jasa-jasa) sepanjang periode 2012-2016 berada pada kisaran antara 27-31 persen. Tahun 2016, kelompok kategori tersier berkontribusi sekitar 31 persen dan kelompok ini memiliki sumbangan terbesar kedua dalam beberapa tahun terakhir.

Semakin menurunnya kontribusi kelompok kategori primer dan semakin meningkatnya kontribusi kategori sekunder dan tersier menunjukkan semakin majunya perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Hal ini karena semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap kategori primer yang sebagian besar hanya memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun, kategori sekunder masih perlu ditingkatkan lagi karena kategori ini dapat meningkatkan kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren yang positif pada periode waktu 2012-2016. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir sebesar 3,83 persen. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sempat melambat sebesar 3,40 persen dan tumbuh menjadi 4,40 persen pada tahun 2016. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya (persen), 2012-2016

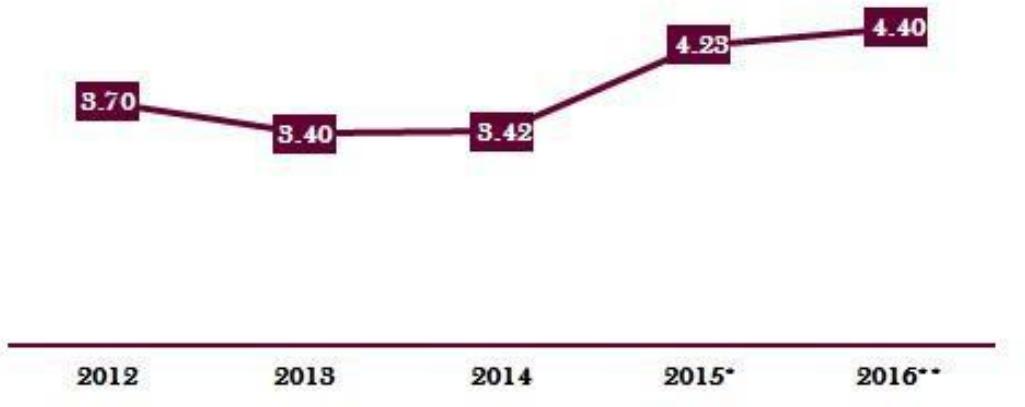

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

2.1.2.1.2 Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku pada 2012-2016 adalah sebesar 2,8 persen per tahun. Pada tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya mencapai 33,87 juta rupiah. Dalam lima tahun terakhir PDRB per kapita sudah mengalami peningkatan sebanyak 5,2 juta rupiah.

Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi tahun 2016. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku mencapai 39,07 juta rupiah atau

meningkat sekitar 4,8 persen dari tahun 2015. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya rata-rata dapat menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 39,07 juta rupiah selama tahun 2016.

Gambar 2.9
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), 2012-2016

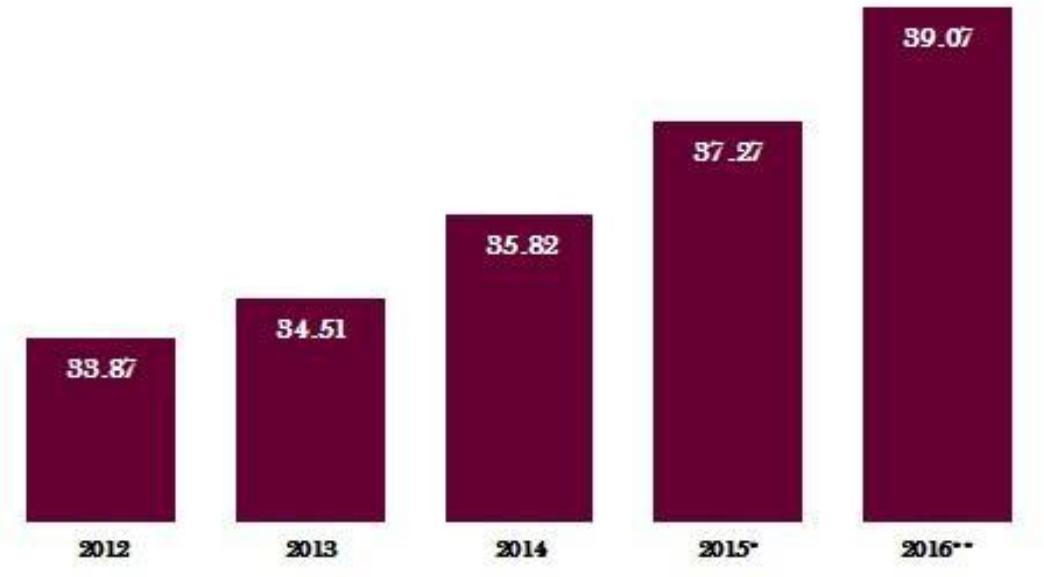

Sumber : Tinjauan Perekonoian Kab. Nagan Raya Tahun 2016

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Kecenderungan kenaikan harga-harga yang pada umumnya secara terus menerus akan mempengaruhi keadaan perekonomian dengan cara menyeluruh, keadaan ini biasanya dikenal dengan inflasi. Laju inflasi Kabupaten Nagan Raya dipengaruhi dan mengacu kepada nilai inflasi yang terjadi di Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat). Laju inflasi Meulaboh tahun 2015 sebesar 5,83 mengalami penurunan 2,94 pada tahun 2016 dengan laju inflasi sebesar 2,89.

2.1.2.1.4 Kemiskinan

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Tahun 2011, penduduk miskin berkisar sebesar 23,50 persen atau berjumlah 33.570 jiwa. Angka tersebut terus menurun menjadi 21,49 persen atau berjumlah 32.700 jiwa di tahun 2012, tahun 2013 jumlah penduduk miskin berjumlah 32.660 jiwa atau sebesar 20,55 persen, tahun 2014 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.913 jiwa atau sebesar persen 20,85 persen, tahun 2015 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.320 jiwa atau sebesar

20,13 persen, sedangkan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah 30.310 jiwa atau sebesar 19,17 persen.

Gambar 2.10
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2011-2016

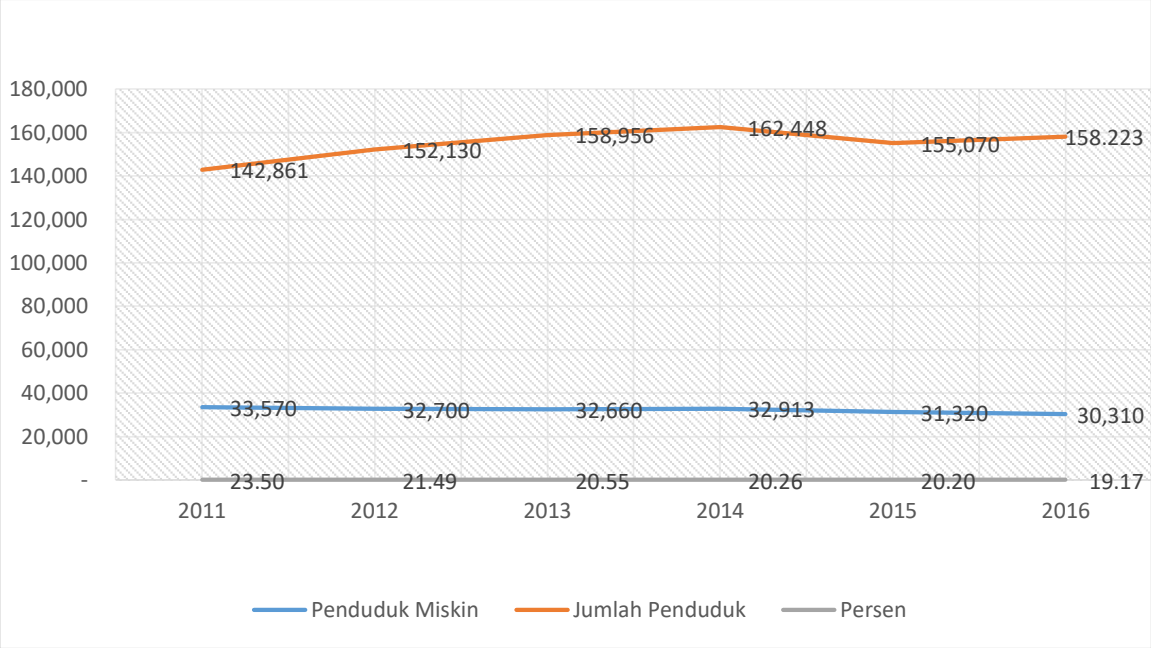

Sumber: BPS Nagan Raya

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah

pertama (SMP/sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun.

Angka Melek Huruf pada Tahun 2012 berkisar sebesar 93,57 persen, artinya terdapat 6,43 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis, dimana angka ini terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 93,93 persen, tahun 2014 sebesar 97,20 persen, tahun 2015 sebesar 96,35 persen dan pada tahun 2016 sebesar 93,41 persen.

Upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong akses pendidikan bagi semua penduduk, termasuk Paket A, B, dan C, disamping juga pendidikan gratis berimplikasi positif terhadap peningkatan angka melek huruf. Sampai tahun 2016 terdapat 6,59 persen penduduk yang belum melek huruf.

Gambar 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (persen)

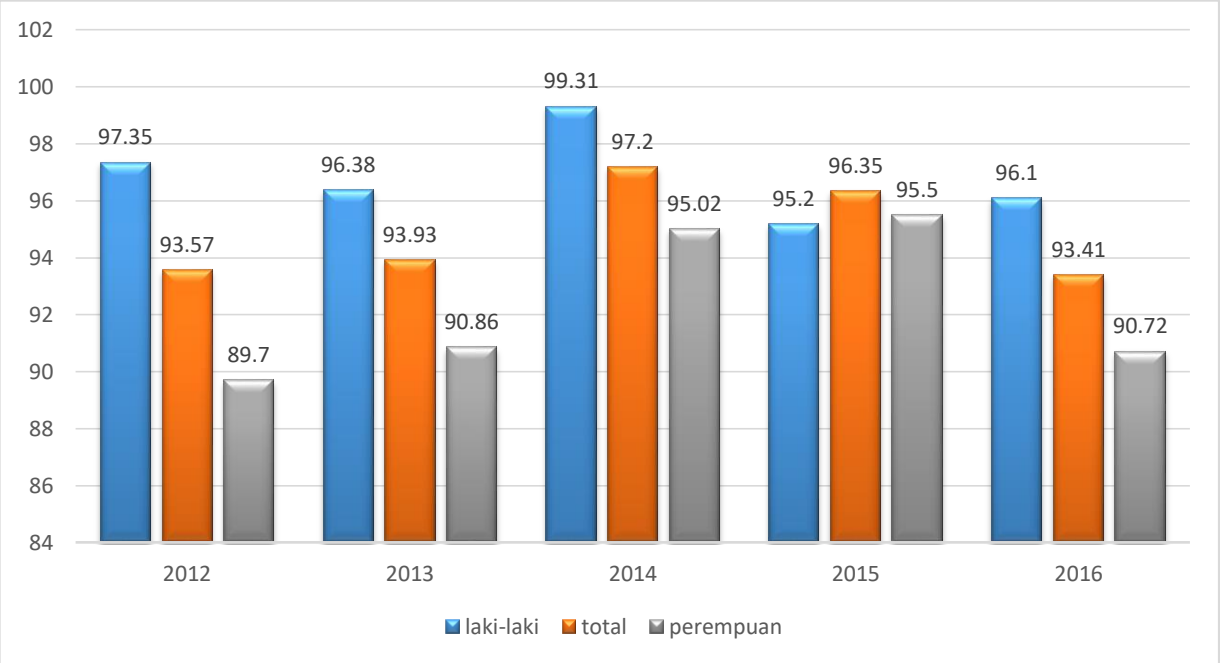

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Meskipun capaian angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya mengalami perbaikan dan peningkatan, namun masih terjadinya disparitas antara penduduk

dewasa laki-laki dan perempuan. Angka melek huruf laki-laki cenderung lebih baik dari perempuan selama kurun waktu 2012-2016. Tahun 2012, angka melek huruf laki-laki sebesar 97,35 persen dan perempuan 89,70 persen. Adapun tahun 2016, angka melek huruf laki-laki mencapai 96,10 persen dan perempuan 90,72 persen. Karena itu, perbaikan angka melek huruf penduduk dewasa perempuan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan diharapkan dapat sejajar dengan pencapaian kemajuan angka melek huruf penduduk dewasa laki-laki.

2.1.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator lainnya dalam bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut termasuk juga dalam komponen pembentuk IPM, sebagai variabel baru menggantikan variabel angka melek huruf dalam perhitungan IPM, untuk dimensi pengetahuan (pendidikan). Mengutip BPS, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS *(Expected Years of Schooling -EYS)* didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah, kendati belum mencapai angka ideal. Tahun 2012, angka harapan

lama sekolah masyarakat Nagan Raya sebesar 13,27 tahun, jauh lebih tinggi dari Nasional yang sebesar 11,68 tahun (BPS, 2016). Kemudian, angka harapan lama sekolah tersebut meningkat menjadi 13,34 tahun (tahun 2013), sebesar 13.42 tahun (tahun 2014), dan sebesar 14.04 tahun (tahun 2015). Dan sebesar 14.09 (tahun 2016). Adapun angka harapan lama sekolah Nasional sebesar 12,10 tahun (2013), sebesar 12,39 tahun (tahun 2014), sebesar12.55 tahun (2015), dan sebesar12.72 tahun (2016). Kurun waktu 2012-2016, capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Nagan Raya cenderung lebih baik dari Nasional.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya keras meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. Program penyetaraan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dipandang juga bermanfaat dalam memperbaiki kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Sepanjang tahun 2012-2016, Pemerintah Nagan Raya dinilai cukup berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, meskipun belum mencapai target pemerintah. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah yang telah dijalani penduduk tidak lebih dari 7.78 Tahun, atau tamat SD, dan pernah mengecap dibangku kelas 1 (satu) SMP. Lalu, angka tersebut meningkat secara signifikan menjadi 7.93 tahun (tahun 2014) 8.22 tahun (tahun 2015), dan hingga 8.24 tahun (tahun 2016). Sementara rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk secara Nasional, yakni 7,95 tahun (tahun 2016).

Gambar 2.12
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan Nasional, Tahun 2012-2016 (Tahun)

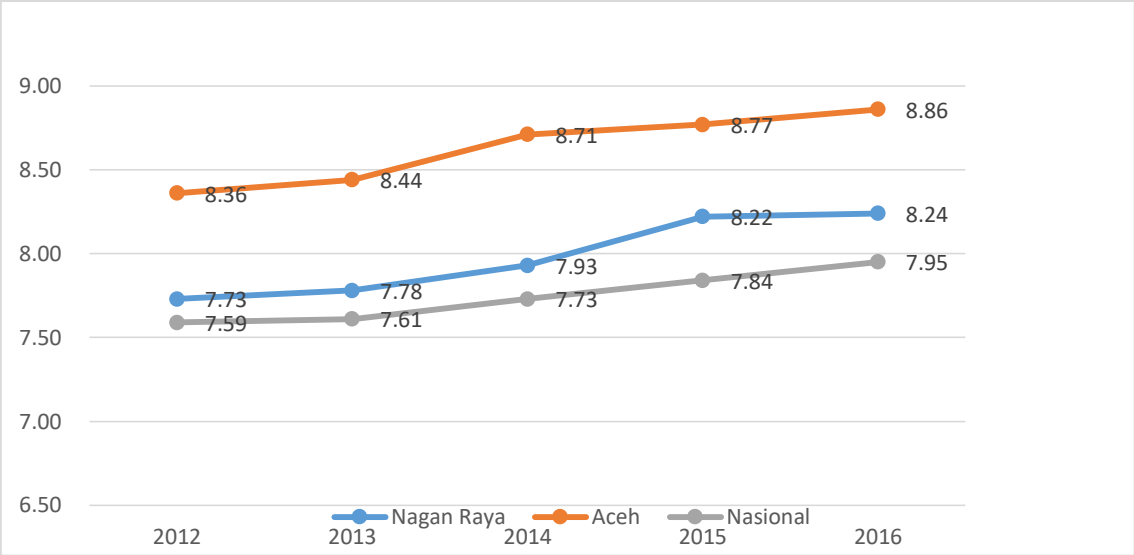

Sumber : BPS Aceh, 2017

Meskipun angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi pembangunan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan pendidikan gratis yang telah gulirkan selama ini, kebijakan pendidikan lainnya yang pro-masyarakat miskin terus diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan beasiswa (diupayakan berlanjut ke perguruan tinggi), pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan pembangunan PAUD, serta penyediaan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai di setiap jenjang pendidikan dan antar wilayah.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Posisi geografis yang strategis dan ditunjang oleh beragamnya etnis masyarakat di Provinsi Aceh menggambarkan peninggalan keragaman budaya dan seni dengan nilai sejarah yang tinggi, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya

yang memiliki keragaman budaya dan seni yang diwariskan oleh leluhur. Adapun beberapa keragaman budaya dan seni tersebut perlu dijaga dan dilestarikan keberdaannya sebagai bentuk identitas dari suatu daerah.

Adapun keragaman budaya dan seni yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat terlihat dari beberapa kebiasaan masyarakat terutama dalam perayaan pesta perkawinan, sunat rasul, keragaman makanan khas, dan tradisi lainnya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu terdapat juga beberapa situs sejarah budaya antara lain, 8 (delapan) makam, 1 (satu) rumah tradisional, 1 (satu) benteng dan 3 (tiga) tempat bersejarah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.1.3.1.1 Pendidikan Islami

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelolah oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta. Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dan dayah yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13

Jumlah penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2012 - 2016

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penghafal penghafal Al-Qur`an	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	4 Orang
2	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun	65%	66%	69%	75%	80%
3	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia > 21 tahun	68%	70%	71%	75%	77%
4	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah	5%	6%	6%	8%	10%

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).

2.1.3.1.2 Keagamaan Syariat Islam

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syari`at Islam di Kabupaten Nagan Raya, diperlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Syari`at Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI. Syari`at Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaanya akan timbul suatu

kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan Syari`at Islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting. Selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari`at Islam. Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan syariat islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya Dari Tahun 2012-2016

No	Uraian Kegiatan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	315 Unit	325 Unit	370 Unit	410 Unit	445 Unit
2	Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	200 Orang
3	Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat	20 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	31 Orang
4	Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin	25 Mesjid	32 Mesjid	36 Mesjid	40 Mesjid	47 Mesjid
5	Pembinaan Dinul Islam	210 Orang	240 Orang	250 Orang	258 Orang	262 Orang
6	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	30 %	35 %	40 %	42 %	50 %

7	Jumlah Kader Ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	123 Orang	132 Orang	144 Orang	150 Orang	155 Orang

Komitmen pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat, bedasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur tentang Baitul Mal dimana Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, perwalian (Ziwaf dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Berdasarkan data dari Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 realisasi dari penerimaan Zakat/infaq/sadaqah sebesar Rp. 3.450.000.000,- dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 7.091.141.673,50.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.2.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/RA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah sebanyak 35 unit dengan jumlah murid 1.577 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 38 unit pada tahun 2016 dengan murid sejumlah 2.209 orang.

Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2016 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 23,48 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (9.407) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	TK/RA	35	35	35	37	38
2	Siswa	1.577	1.344	1.671	1.857	2.209
3	Penduduk Usia 4-6 Tahun	8.430	8.560	9.347	9.552	9.407
4	Rasio (%)	2.22	2.60	2.09	1.99	1.72
5	Rasio Ketersedian sekolah per 10.000 penduduk	0,42	0,41	0,37	0,39	0,40

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Capaian APK pada tingkat pendidikan SD/MI terus mengalami penurunan. Tahun 2012, APK tingkat SD/MI sebesar 105,16 persen, tahun 2013 sebesar 109,92 persen. Selanjutnya, APK tingkat SD/MI tersebut turun menjadi 105,64 persen tahun 2014, 2015

sebesar 110,00 dan tahun 2016, APK tingkat SD hanya tercapai sebesar 109,91 persen.

Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, capaian APK pada tahun 2012, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 99,17 persen dan menurun menjadi 100,38 persen tahun 2013, 2014 sebesar 105,85 persen, tahun 2015 sebesar 103,00 dan kemudian APK tingkat SMP/MTS tersebut naik menjadi 107,35 persen tahun 2016.

Capaian APK yang paling rendah terjadi pada tingkat pendidikan SMA/MA. Kurun waktu 2012-2016, Pada tahun 2012, APK tingkat SMA/MA sebesar 85,59 persen, Tahun 2013 sebesar 83,35 persen, 2014 sebesar 93,55 persen, tahun 2015 sebesar 89,00 persen dan pada tahun 2016 sebesar 85,48 persen.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015*	2016*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (segala usia)	19.712	21.530	20.395	21.133	21.336
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	18.745	19.587	19.306	19.212	19.412
1.3	**APK SD/MI (Persen)**	**105,16**	**109,92**	**105,64**	**110,00**	**109,91**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	8.857	9.368	10.008	9.516	10.079
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.931	9.333	9.455	9.239	9.389

2.3	**APK SMP/MTs (Persen)**	**99,17**	**100,38**	**105,85**	**103,00**	**107,35**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	6.893	7.014	7.932	7.401	7.194
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.054	8.415	8.479	8.316	8.416
3.3	**APK SMA/MA/SMK (Persen)**	**85,59**	**83,35**	**93,55**	**89,00**	**85,48**

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2017

Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 98,68 persen tahun 2016, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 88,28 persen, APM SMP/MTs tahun 2016 sebesar 88,79 persen jauh lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 69,59 persen, sedangkan untuk APM SMA/MA pada

tahun 2016 sebesar 72,04 persen lebih besar dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 61,27 persen. Untuk lebih jelas perkembangan angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015*	2016*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (Sesuai usia sekolah)	16.548	17.953	18.271	18.636	19.156
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	18.745	19.587	19.306	19.212	19.412
1.3	**APM SD/MI (Persen)**	**88,28**	**91,66**	**94,64**	**97,00**	**98,68**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (Sesuai usia sekolah)	6.215	7.675	8.179	7.761	8.336
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.931	9.333	9.455	9.239	9.389
2.3	**APM SMP/MTs (Persen)**	**69,59**	**82,24**	**86,50**	**84,00**	**88,79**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK (Sesuai usia sekolah)	4.935	5.384	6.377	6.653	6.063
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.054	8.415	8.479	8.316	8.416
3.3	**APM SMA/MA/SMK (Persen)**	**61,27**	**63,98**	**75,21**	**80,00**	**72,04**

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2017

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan APS di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa APS anak usia 7-12 tahun sangat menggembirakan. Pada tahun 2012, APS anak usia 7-12 tahun mencapai 99,54 persen, menjadi 99,35 persen tahun 2016. Menurut jenis kelamin, terlihat juga bahwa capaian APS usia 7-12 tahun laki-laki 100 persen dan perempuan 98,61 persen tahun 2016. Sebelumnya (tahun 2012), APS laki-laki sebesar 99,90 persen, sedikit lebih tinggi dari APS perempuan sebesar 99,13 persen. Hal tersebut mencerminkan layanan pendidikan tingkat SD telah menjangkau peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan) di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.13
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%)

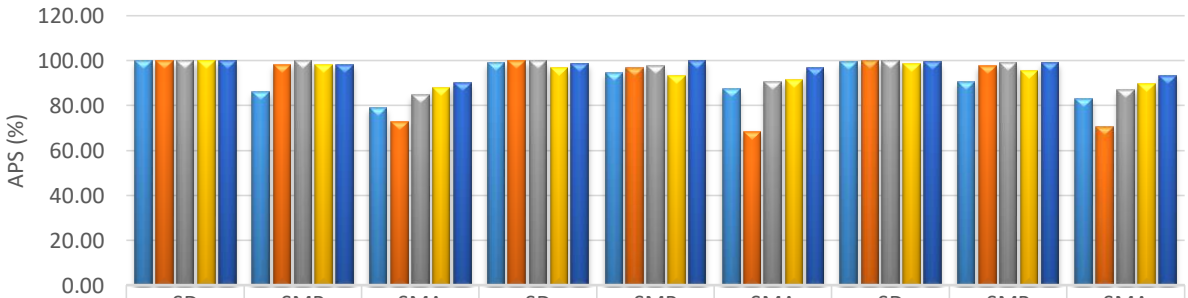

	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2012	99.90	86.25	79.06	99.13	94.55	87.54	99.54	90.51	83.01
2013	100	98.17	72.65	100	97.0	68.58	100	97.64	70.61
2014	100	100	84.63	100	97.86	90.75	100	98.93	87.02
2015	99.96	98.25	88.00	96.69	93.49	91.59	98.46	95.54	89.55
2016	100	98.23	90.18	98.61	100	96.69	99.35	99.1	93.46

Sumber : BPS, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017*

Disisi lain, APS pada anak usia 13-15 tahun menuju kearah perbaikan, dari 90,51 persen meningkat menjadi 99,1 persen tahun 2016. Sebelumnya (tahun 2013) capaian APS anak usia tersebut turun sangat drastis dan terendah selama lima tahun terakhir. Demikian juga halnya APS anak usia 16-18 tahun, tercatat sebesar 83,01 persen tahun 2012 meningkat menjadi 93,46 persen tahun 2016.

Selama tahun 2012-2016, capaian APS anak usia 16-18 tahun yang terendah (turun sangat drastis) terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 70,61 persen. Hal tersebut dipicu dari rendahnya capaian APS perempuan yang hanya berkisar 68,58 persen, jauh lebih rendah dari capaian APS laki-laki sebesar 72,65 persen.

Semakin tinggi usia peserta didik, capaian APS semakin rendah. Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selain itu, terbatasnya prasarana pendidikan SMA/SMK/MA di setiap kecamatan serta penghasilan masyarakat yang masih rendah, turut juga mempengaruhi belum tercapainya target APS. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi (keluarga miskin) merasa kesulitan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah. Kondisi tersebut mempengaruhi dalam pencapaian APS tingkat SMA, meskipun adanya kecenderungan kesadaran masyarakat untuk mengecap pendidikan SMA, terutama bagi kaum perempuan. APS penduduk perempuan lebih baik daripada laki-laki pada tingkat SMA (kondisi tahun 2016).

E. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (unit)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
Pendidikan Umun						
1	TK	33	33	36	36	55
2	Sekolah Dasar (SD)	135	134	135	135	138

3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	36	36	37	36	39
Pendidikan Agama						
1	RA	6	Na	Na		
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	19	19	19	19	18
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	9	10	10	10	11

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

Perkembangan peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif (periode 2012-2016). Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.14

Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (orang)

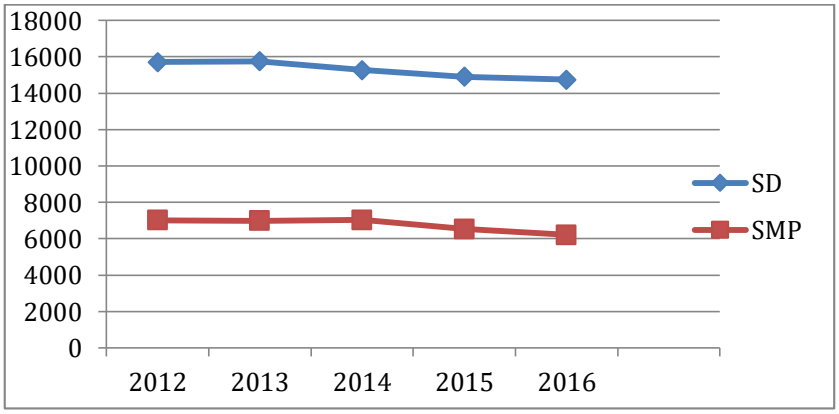

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

Jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 11 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2016). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 30 sampai 40 murid

per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Angka tersebut juga jauh lebih rendah dari tahun 2012 yang sebanyak 17 orang per ruang kelas.

Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien.

Gambar 2.15
Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

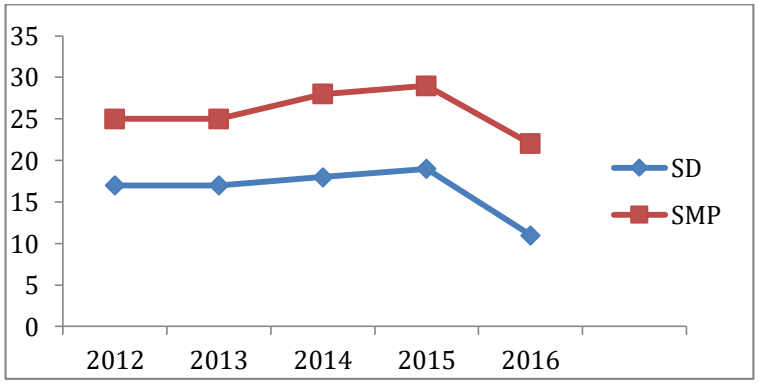

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama lima tahun terakhir (2012-2016), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdi bertambah rata-rata 3,63 persen setiap tahunnya. Tahun 2012, jumlah guru SD sebanyak 1.667 orang yang tersebar relatif merata di semua kecamatan. Jumlah guru tersebut berkurang menjadi 1.354 orang pada tahun 2016.

Kenaikan jumlah guru yang sangat drastis terjadi pada tingkat SMP. Pertumbuhan kenaikan jumlah guru rata-rata 11,59 persen setiap tahunnya. Tahun 2012, tercatat guru SMP berjumlah 557 orang, sementara tahun 2016

mencapai 694 orang. Hal tersebut seiring dengan peningkatan pembangunan SMP, dari 36 unit tahun 2012 menjadi 39 unit tahun 2016 sehingga memerlukan penambahan guru yang mengabdi di masing-masing sekolah di setiap kecamatan. Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.16
Perkembangan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (orang)

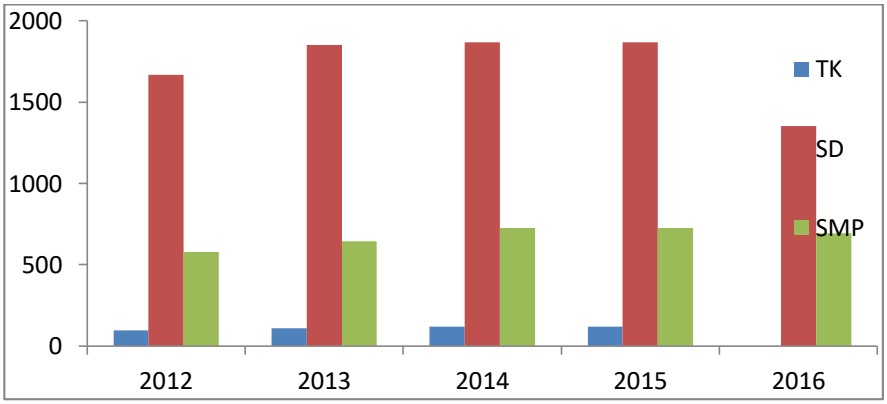

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Perkembangan rasio peserta didik/murid terhadap guru pada semua jenjang pendidikan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Untuk tingkat SD, rasio peserta didik terhadap guru sebesar 8,9 (kondisi tahun 2016). Artinya, setiap guru membimbing dan mengawasi paling kurang 8,9 orang peserta didik. Angka rasio tersebut mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012 (rasio 8). Kendati demikian, angka rasio tertinggi dicapai tahun 2014, dimana setiap guru membimbing peserta didik sebanyak 12 orang.

Pada tingkat pendidikan SMP kondisi rasio peserta didik terhadap guru pada tahun 2016 memperlihatkan kenaikan, dibandingkan tahun 2012. Tahun 2016, rasio peserta didik per guru meliputi SMP sebesar 10,54. Adapun tahun 2012, rasio peserta didik per guru meliputi SMP sebesar 10.

Secara keseluruhan, rasio peserta didik terhadap guru pada pendidikan umum dan pendidikan agama terlihat sangat rendah. Hal ini terjadi sebagai

implikasi dari penambahan jumlah guru pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain, lebih banyak guru dari yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang pendidikan atau dipandang tidak efisien. Angka rasio tersebut dibawah dari SPM Pendidikan, khusus untuk sekolah dasar satu guru untuk setiap 32 peserta didik.

Kualifikasi guru di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 yang berpendidikan DIV/S1 masih sangat rendah yaitu sebanyak 37,50% dari total guru yang tersedia. Sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah daerah guna meningkatkan dan memotivasi para guru untuk peningkatan kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kualitas peserta didik meningkat. Untuk lebih jelas mengenai pekembangan rasio Guru dengan peserta didik dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Nagan Raya dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17

Perkembangan Rasio Guru-Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

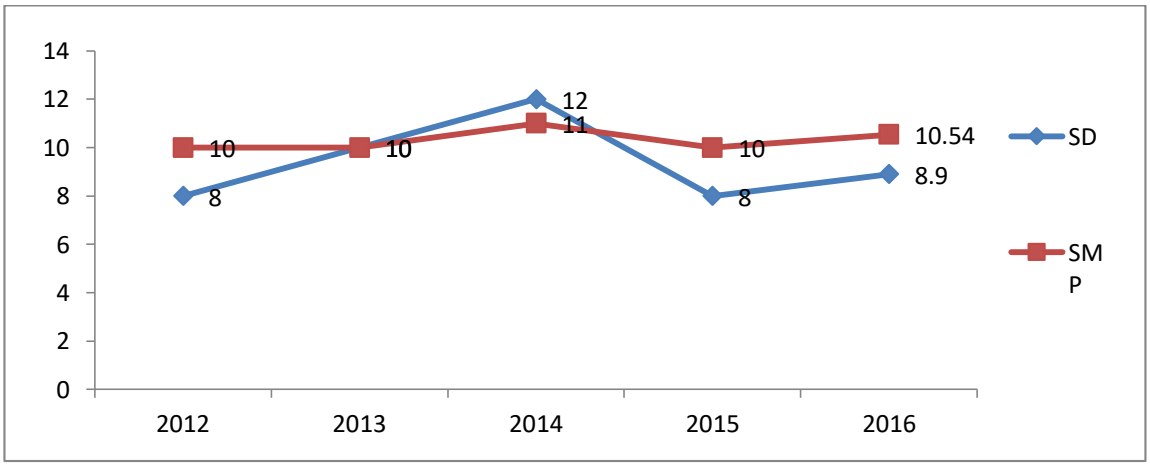

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Tabel 2.19

Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

Guru	Kualifikasi (Orang)		
	D1/D2/D3	DIV/S1	Jumlah
SD	711	258	969
SMP	147	257	404
Jumlah	858	515	1.373

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

2.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 sebesar 11,77 terjadi penurunan menjadi 5,65 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.20

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	33	31	33	27	17
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2,804	2,726	3,060	3,065	3,011
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11.77	11.37	10.78	8.81	5.65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

B. Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Satu target dari Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. AKABA Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah mengalami peningkatan dari 0 menjadi 37,20 per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu	0	61	140	94	112
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2,804	2,726	3,060	3,065	3,011
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0.00	22.38	45.75	30.67	37.20

C. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 sebesar 3,57 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 14,28 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi.

Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	10	24	50	35	43
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2,804	2,726	3,060	3,065	3,011
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3.57	8.80	16.34	11.42	14.28

D. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Dalam lima tahun terakhir Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 jumlah kasus AKI adalah 3 kasus dan tahun 2016 jumlah kasus AKI adalah 3 kasus, jika dihitung AKI per-100.000 kelahiran, maka AKI Tahun 2016 adalah 3/3.011 x 100.000 kelahiran hidup, hal ini masih tinggi dibandingkan dengan target MDGs. Untuk itu perlu upaya besar untuk terus menekan AKI, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan dating. Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

E. Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu, Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin, Rasio posyandu diatas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaat posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita, Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.23
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah posyandu	256	256	256	261	266
2	Jumlah balita	10,647	12,969	12,877	13,468	13,467
	Rasio posyandu per satuan balita	24.04	19.74	19.88	19.38	19.75

F. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Jumlah puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 sebanyak 14 unit yang tersebar diseluruh Kecamatan. Berdasarkan instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976,

kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa. Artinya Puskesmas yang tersedia sudah melebihi kebutuhan sebanyak 9 unit untuk jumlah penduduk 158.223 jiwa, jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 adalah 0,09. Namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30

Sumber : BPS, 2016

G. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 sebanyak 158.223 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

H. Rasio Dokter per satuan penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 yaitu 5 dokter spesialis yang bertugas di Rumah sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 158.223 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 5/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 26 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya adalah 37 orang atau dengan rasio 37/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya, sedangkan kebutuhan dokter umum yang ideal adalah sebanyak 62 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum sebanyak 25 dokter. Total jumlah Dokter gigi adalah 3 orang atau 3/100.000 penduduk, Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum sebanyak 14 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dokter Spesialis	4	7	8	7	5
2	Jumlah Dokter Umum	44	53	47	62	37

3	Jumlah Dokter Spesialis Gigi	0	0	0	0	0
4	Jumlah Dokter Gigi	7	4	5	5	3
5	Jumlah Penduduk	142,861	149,596	149,596	155,070	155,070
	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03
	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0.31	0.35	0.31	0.40	0.24
	Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02

I. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

Pada tahun 2016, jumlah tenaga kesehatan sekitar 968 tenaga (sekitar 5 tenaga kesehatan melayani orang 1.000 orang penduduk). Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2012 sebesar 4,13 persen menu menjadi 3,31 persen pada tahun 2016.

Jumlah bidan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 213 orang, dengan rasio bidan terhadap penduduk sebesar 1,37 bidan per 100.000 penduduk. Jika kita melihat rasio tenaga bidan tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 100 per 100.000 penduduk. Jumlah perawat pada tahun 2016 tercatat sebanyak 160 orang, dengan rasio sebesar 1,03 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga keperawatan tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 117.5 per 100.000 penduduk.

Tenaga kefarmasian di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 adalah 25 orang dengan rasio sebesar 0,16 per 100.000 penduduk, jika kita melihat rasio tenaga kefarmasian tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 10 per 100.000 penduduk.

Tenaga nutrisionis atau gizi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 adalah 20 orang dengan rasio sebesar 0,13 per 100.000 penduduk mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 0,11 per 100.000 penduduk, meskipun demikian rasio tersebut masih di bawah target nasional dan standar WHO sebesar 22 per 100.000 penduduk.

Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat pada tahun 2016 adalah 38 orang atau dengan rasio 0,25 per 100.000 penduduk. Tenaga Kesehatan Masyarakat ini tersebar di seluruh Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Tenaga Sanitarian berjumlah 13 orang atau dengan rasio 0,08 per 100.000 penduduk. Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat belum mencapai target dan rasio Tenaga Sanitarian masih belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 40/100.000 penduduk.

Jumlah seluruh Tenaga keterapian fisik tahun 2016 adalah 4 orang, keterapian fisik tersebut seluruhnya adalah tenaga fisioterapi. Jika dilihat dari rasio 0,03 per 100.000 penduduk sedangkan tenaga teknis medis di fasilitas kesehatan 28 orang, terdiri dari radiografer 3, radioterapis 10, analisa kesehatan 4, dan rekam medik 2, jika dilihat dari rasio kebutuhan, maka diperoleh 18/100.000 penduduk. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 sampai tahun 2016 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.26

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Perawat	215	307	310	328	160
2	Jumlah Bidan	288	404	404	435	213
3	Jumlah Perawat Gigi	0	26	12	12	23
4	Jumlah Teknis Kefarmasian	15	20	23	25	18
5	Jumlah Apoteker	6	6	6	6	7
6	Jumlah Kesehatan Masyarakat	37	53	49	76	38

7	Jumlah Kesehatan Lingkungan	13	13	9	16	13
8	Jumlah Nutrisionis	16	13	22	18	20
9	Jumlah Dietisien	0	6	3	0	0
10	Jumlah Fisioterapis	0	8	10	11	4
11	Jumlah Okupasi Terapis	0	0	0	0	0
12	Jumlah Terapis Wicara	0	0	0	0	0
13	Jumlah Akupuntur	0	0	0	0	0
14	Jumlah Radiografer	0	2	7	7	3
15	Jumlah Radioterapis	0	0	9	9	0
16	Jumlah Elektromedis	0	7	6	6	5
17	Jumlah Teknisi Gigi	0	7	8	8	0
18	Jumlah Analis Kesehatan	0	6	7	7	4
19	Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	4	4	4	5
20	Jumlah Penduduk	142,861	149,596	149,596	155,070	155,070
21	Rasio Perawat per satuan penduduk	1.50	2.05	2.07	2.12	1.03
22	Rasio Bidan per satuan penduduk	2.02	2.70	2.70	2.81	1.37
23	Rasio Perawat Gigi per satuan penduduk	-	0.17	0.08	0.08	0.15
24	Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk	0.10	0.13	0.15	0.16	0.12
25	Rasio Apoteker per satuan penduduk	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
26	Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk	0.26	0.35	0.33	0.49	0.25
27	Rasio Kesehatan Lingkungan per satuan penduduk	0.09	0.09	0.06	0.10	0.08
28	Rasio Nutrisionis per satuan penduduk	0.11	0.09	0.15	0.12	0.13
29	Rasio Fisioterapis per satuan penduduk	-	0.05	0.07	0.07	0.03

30	Rasio Radiografer per satuan penduduk	-	0.01	0.05	0.05	0.02
31	Rasio Elektromedis per satuan penduduk	-	0.05	0.04	0.04	0.03
32	Rasio Analisis Kesehatan per satuan penduduk	-	0.04	0.05	0.05	0.03
33	Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan per satuan penduduk	-	0.03	0.03	0.03	0.03
34	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4.15	5.90	5.94	6.24	3.31

J. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 yang tertangani sebesar 15,17 persen, Tahun 2013 meningkat menjadi 45,08 persen, Tahun 2014 sampai tahun 2016 meningkat menjadi 52,23 persen, artinya komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya masih sangat rendah, perlu dilakukan kebijakan yang lebih ketat lagi agar cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mendekati 100 persen, upaya yang perlu dilakukan berupa sosialisasi kepada Ibu hamil agar mewaspadai kehamilannya baik dari makanan dan pemeriksaan kandungan yang rutin. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.27

Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	105	330	469	293	352
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	692	732	725	674	674

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	15.17	45.08	64.69	43.47	52.23

K. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2012 sebesar 84,67 persen turun menjadi 77,51 persen tahun 2013, tahun 2014 meningkat lagi menjadi 85,50 persen dan tahun 2015 menjadi 94,75 persen sedangkan tahun 2016 turun menjadi 93,07 persen. Cakupan persalinan yang tinggi terjadi di Puskesmas Ujong Fatihah dan Simpang Jaya, sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Cakupan Pertolongan Persalinan

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2794	2709	2955	3047	2993
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3300	3495	3456	3216	3216
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84.67	77.51	85.50	94.75	93.07

L. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Desa *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa yang memiliki jumlah bayi lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2012-2016 menunjukkan angka peningkatan, tahun 2009 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 48,65 persen meningkat menjadi 77,29 persen pada tahun 2016. Pencapaian ini mendekati target yang ingin dicapai yaitu 85 persen. Oleh karena itu, untuk

mencapai target tersebut pemerintah meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif.

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2016 terdapat 7 Puskesmas yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 85 persen seperti yang nampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Desa / Kelurahan UCI	108	156	181	188	177
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	222	222	222	222	229
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	48.65	70.27	81.53	84.68	77.29

M. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami penurunan tahun 2012 terdapat 32 kasus gizi buruk dan yang tertangani 100 persen, tahun 2013 terdapat 17 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2014 terdapat 11 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2015 terdapat 12 kasus dan tertangani 100 persen sedangkan pada tahun 2016 terdapat 9 kasus dan yang tertangani 100 persen. Upaya pemerintah ke depan untu meningkatkan persentase penanganan kasus

balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 di sajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.30

Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	32	17	11	12	9
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	32	17	11	12	9
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

N. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak.

Cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 yaitu 77,29% atau terjadi penurunan jika dibanding tahun 2015 yaitu 84,64%, hal ini jauh dari target yang diharapkan yaitu 80% dan berdampak terhadap status desa untuk mendapatkan UCI serta anak usia 1 tahun masih banyak yang beresiko terjangkit penyakit campak.

Tabel 2.31

Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	2346	2655	2371	2129	2804

Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	3288	3226	3226	3060	3062
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak	71.35	82.30	73.50	69.58	91.57

O. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani.

Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sangat rendah dan fluktuatif, dimana pada tahun 2012 yaitu 30,30%, tahun 2013 yaitu 26,09%, tahun 2014 yaitu 27,27%, tahun 2015 yaitu 39,24%, dan pada tahun 2016 yaitu 18,75%. Dalam hal ini, petugas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada balita pneumonia, agar terhindar dari komplikasi dan kematian. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32

Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	30	24	24	31	18
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	99	92	88	79	96
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	30.30	26.09	27.27	39.24	18.75

P. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ adalah Angka yang menyatakan jumlah penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja kesehatan selama setahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA + dalam kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mulai meningkat, tahun 2012 sebesar

25,33 persen dan tahun 2016 sebesar 49,00 persen yang ditangani, artinya kesadaran masyarakat untuk mengobati dirinya sudah mulai tumbuh dan sudah mau berobat, namun perlu diwaspadai kebiasaan masyarakat hidup tidak sehat perlu dicegah ditingkatkan perilaku hidup sehat kepada masyarakat sejak dini. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.33
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+)
Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	58	76	75	113	123
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	229	229	234	243	251
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	25.33	33.19	32.05	46.50	49.00

Q. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Kasus Tuberkulosis (TB) Paru pada tahun 2012 terdapat 70 kasus baru dan lama atau 49,00 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 159 kasus baru dan lama atau 102,53 per 100.000 penduduk hasil pemeriksaan BTA+. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya peningkatan kasus TBC baru dan lama, hal ini sangat baik karena dilakukannya deteksi dini penyakit TBC yang bertujuan untuk penemuan dini dan mencegah terjadinya TBC kronis serta kegiatan tersebut harus tetap ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.34

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama)	70	76	92	142	159
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	142,8	149,5	149,5	155,0	155,0
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	49.00	50.80	61.50	91.57	102.53

R. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk).

Jumlah kasus TB yang meninggal dunia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 memiliki nilai fluktuatif, dimana pada tahun 2012 terdapat 2 kasus yang meninggal atau 1,40 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 4 kasus yang meninggal atau 2,57 per 100.000 penduduk. Walaupun masih rendah, namun terdapatnya kasus TB yang meninggal menjadi perhatian pemerintah dalam penatalaksanaan penemuan kasus dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Paisen TB yang meninggal	2	2	3	6	4
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	142,86	149,59	149,59	155,07	155,07

	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.400	1.337	2.005	3.869	2.579

S. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Jumlah kasus TB yang mendapat pengobatan dalam program DOTS mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2012 terdapat 58 kasus dari 229 perkiraan kasus (25,33%) dan pada tahun 2016 terdapat 159 kasus dari 251 perkiraan kasus (63%). Dari data tersebut terdapat kesadaran penderita TB untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dengan menggunakan program DOTS sehingga tingkat kesembuhan penderita TB meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	58	76	75	113	159
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	229	229	234	243	251
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	25.33	33.19	32.05	46.50	63.35

T. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.

Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) Paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 terdapat 58 kasus dan yang sembuh sebanyak 45 kasus (77,59%), sedangkan pada tahun 2016 terdapat 123 kasus dan yang sembuh sebanyak 84 kasus (68,29%). Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita TB dalam pelaksanaan pengobatan

dalam program DOTS dan diharapkan peran serta pegutas kesehatan untuk menjemput bola serta peran dari lintas sector dalam mendukung program DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37

Penderita Tuberkulosis Paru BTA Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pasien Tuberkulosis Paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	45	51	28	60	84
Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	58	76	75	113	123
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	77.59	67.11	37.33	53.10	68.29

U. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aides Aegypti, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Jumlah kasus DBD mengalami fluktuatif, pada tahun 2012 terdapat 47 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, pada tahun 2014 terdapat 15 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 19 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP. Tindakan penanganan yang telah dilakukan diantaranya perawatan penderita oleh tenaga kesehatan serta tindakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD melalui foging dan abatesasi, guna pemutusan mata rantai nyamuk penyebab DBD, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	47	16	15	10	19
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	47	16	15	10	19
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

V. Angka Kejadian malaria.

Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Penderita Malaria tahun 2012 adalah 60 kasus atau 41,99 per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan 4 kasus atau 2,57 per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39

Angka Kejadian Malaria Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	60	0	6	17	4
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	142,86	149,59	149,59	155,07	155,07
	Angka Kejadian Malaria	41.99	0.000	4.011	10.96	2.579

		9			3	

W. Cakupan Kunjungan Bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah jumlah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan disarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun kunjungan rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan mendapat pelayanan dari petugas kesehatan. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari sampai dengan 3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan penyuluhan perawatan kesehatan. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi: 1) konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan; 2) perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS); dan 3) pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.40

Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2358	2655	2547	2546	2561
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	3142	3143	3226	3060	3024
Cakupan kunjungan bayi	75.05	84.47	78.95	83.20	84.69

2.1.3.2.1.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2016, kondisi baik jalan kabupaten 243,54 Km mengalami peningkatan sepanjang 71,74 km dari kondisi awal tahun 2012. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.41

Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2012-2016 (Km)

Kondisi jalan	Status Jalan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	171,80	177,00	188,20	224,99	243,54
Sedang	92,34	108,80	113,50	173,01	171,65
Rusak Ringan	128,60	119,60	108,70	186,14	180,55
Rusak Berat	28,00	15,34	10,34	340,28	328,68
Jumlah	420,74	420,74	420,74	924,42	924,42

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2017

Selanjutnya Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016 (m)

Kondisi jalan	Status Jalan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jalan Baik (km)	171.800	176.970	188.200	224.990	243.540
Jumlah Penduduk (jiwa)	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223
Rasio Panjang Jalan	1,12	1,11	1,15	1,45	1,53

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2017

Tabel di atas menggambarkan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2012-2016, menunjukkan bahwa selama periode tersebut mengalami peningkatan. Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 1,12 tahun 2012 meningkat menjadi 1,53 pada tahun 2016. Hal ini berarti dalam 1,53 meter panjang jalan melayani 1 (satu) orang penduduk pada tahun 2015.

Untuk Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 diantaranya meliputi kawasan Gampong Twi meulusong, Gampong Blang Teungku, Gampong Kila, Gampong Kandeh, Gampong Blang Lango, dan Gampong Gunong Kong. Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027.

b. Sanitasi

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak sampai dengan Tahun 2016 sebesar 47,12% yang terdiri dari akses sanitasi perkotaan 3,7% dan akses sanitasi perdesaan 43,42%. Cakupan pelayanan air minum dengan sumber air minum non perpipaan yang terlayani kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2016 di perkotaan sebesar 44,38% dengan jumlah penduduknya 58.059 jiwa dan wilayah perdesaan sebesar 40,40% jumlah penduduknya 18.345 jiwa. Sedangkan untuk sumber air minum

perpipaan di Kabupaten Nagan Raya secara umum masih belum beroperasi karena masih terbatasnya jaringan dan jumlah SR pada unit SPAM baik SPAM Lamie, SPAM Simpang Peut. dan WTP Beutong.

c. Irigasi

Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2016 terdiri dari 29 daerah irigasi yang melayani hampir seluruh Kabupaten Nagan Raya menjadi kewenangan daerah. Daerah irigasi yang tersebar di sepuluh kecamatan dengan luas 4.847 Ha ditahun 2016 mengaliri areal persawahan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Adapun Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43

Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Tahun 2016

No	Nama Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi (%)		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	D.I Blang Puuk	Semi Tehnis	200	35	30	35
2	D.I Blang Meurandeh	Semi Tehnis	75	30	40	30
3	D.I Bungong Talo	Tehnis	485	10	20	70
4	D.I Rambong	Semi Tehnis	330	35	25	40
5	D.I Pulo Raga	Semi Tehnis	300	20	45	35
6	D.I Blang seunong	Semi Tehnis	148	35	35	30
7	D.I Blang Neuang	Semi Tehnis	85	50	30	20

8	D.I Pante Ara	Semi Tehnis	431	20	25	55
9	D.I Twi Pungoh	Semi Tehnis	120	15	30	15
10	D.I Karian	Sederhana	50	20	20	60
11	D.I Blang Aman Tadu	Sederhana	200	20	15	65
12	D.I Gunong Nagan	Sederhana	70	40	35	25
13	D.I Kila	Sederhana	100	35	40	25
14	D.I Blang Teungku	Sederhana	70	30	45	25
15	D.I Twi Meuleusong	Sederhana	200	10	35	55
16	D.I Gunong Lango	Sederhana	70	5	50	45
17	D.I Twi Kameng	Sederhana	65	-	48	52
18	D.I Alue Buloh	Sederhana	150	20	20	60
19	D.I Alue Paku	Sederhana	65	16	30	54
20	D.I Krueng Mangkom	Sederhana	120	20	45	35
21	D.I Seumambek	Sederhana	200	23	45	32
22	D.I Gunong Reubo	Sederhana	350	25	30	45
23	D.I Padang Rubek	Sederhana	68	39	33	28
24	D.I Alue Seupeng	Sederhana	350	23	35	42

25	D.I Gunong Kupok	Sederhana	175	8	40	52
26	D.I Cot Mee	Sederhana	150	-	32	68
27	D.I Krueng Alem	Sederhana	200	12	40	48
28	D.I Alue Rambot	Sederhana	170	23	35	42
29	D.I Tripa Makmur	Sederhana	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya

Jaringan Irigasi merupakann saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagiaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder.

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Berdasarkan data dari tahun 2014–2016 total panjang jaringan irigasi mengalami penurunan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2014 sebesar 92.026 meter mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 91.878 meter, sedangkan luas lahan budidaya di tahun 2014 seluas 33.242,38 Ha mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi seluas 34. 527,1 Ha sehingga rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2014 adalah 2,76 turun menjadi 2,66 persen di tahun 2016. Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44

Rasio Jaringan Irigasi

No	Jaringan Irigasi	Status Jalan		
		2014	2015	2016
1	Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	92.026	93.188	91.878
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	33.242,38	25.969,4	34.527,1
3	Rasio Jaringan Irigasi (1:2)	2,76	3,58	2,66

Sumber: Olahan data primer

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan sarana bagi umat beragama untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Nagan Raya secara resmi sebagian besar sarana tempat ibadah hanya dimiliki oleh umat Islam, berupa Mesjid, Mushalla. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2012 rasio tempat ibadah sebesar 3,3 persen dan pada tahuin 2016 sebesar 3,1 persen.

Tabel 2.45

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Tempat Ibadah	497	497	497	497	497
Jumlah Penduduk	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223
Total Rasio	3,3	3,1	3,1	3,2	3,1

Sumber: Nagan Raya dalam Angka

2. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi:

a. Kecamatan Suka Makmue,
b. Kecamatan Kuala,
c. Kecamatan Kuala Pesisir
d. Kecamatan Darul Makmur
e. Kecamatan Seunagan
f. Kecamatan Beutong
g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
h. Kecamatan Tadu Raya

Tabel 2.46
Rasio Ruang Terbuka Hijau Tahun 2016 di Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	2016
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	261.40
2	Luas Kawasan Budidaya	1407
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	18.57%

Sumber: Olahan data primer, 2017

2.1.3.2.1.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi pisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.47 dibawah ini.

Tabel 2.47

Rasio Rumah Layak Huni

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah layak Huni	-	50	172	220	165
Jumlah Penduduk	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223
Rasio Rumah Layak Huni	-	0,031	0,106	0,142	0,104

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nagan Raya, 2017

2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Areal kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh pada Tahun 2014 terdiri atas empat kawasan permukiman yaitu Keude Seumot, Jeuram, Simpang Peut dan Alue Bilie. Adapun persentasenya bisa dilihat pada Tabel 2.48 dibawah ini.

Tabel 2.48

Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2014

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan (Ha)	Luas Wilayah (Km)	Persentase
Keude Seumot	14,76	386,05	0,39
Jeuram	37,84	112,5	0,34
Simpang Peut	29,96	130,63	0,23
Alue Bilie	25,77	1863,12	0,019

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Nagan Raya, 2014

2.1.3.2.1.4 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Dilihat dari segi jumlah personil Linmas pada tahun 2012 berjumlah 852 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 924 orang. Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum bisa memenuhi target dan cenderung berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak anggota Linmas yang masuk usia tua dan meninggal dunia serta tidak ada regenerasi sebab kurang diminati dari kaum muda gampong karena minimnya perhatian pemerintah. Begitu pula dengan jumlah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 2014 berjumlah 5 lembaga dan pada tahun 2016 jumlah LSM menurun 2 lembaga dengan berbagai bidang kegiatan.

Tabel 2.49
Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2016

No	Tahun	Jumlah Linmas (Orang)	Jumlah LSM
1	2012	852	-
2	2013	862	-
3	2014	862	5
4	2015	1.004	10
5	2016	924	2

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nagan Raya Tahun 2017

2.1.3.2.1.5 Sosial

A. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah panti asuhan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 2004-2016 baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta berdasarkan kapasitas dan jumlah anak sebanyak lima unit panti.

B. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah bantuan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bedasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Jumlah (Jiwa)
1	Anak Dengan Kecatatan	149
2	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	2.095
3	Anak Terlantar	24
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	1
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.904
6	Korban Tindak Kekerasan	1
7	Lanjut Usia Terlantar	2.367
8	Penyandang Disabilitas	795
9	Tuna Susila	51
10	Pengemis	2
11	Gelandangan	1
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	23
13	Korban Penyalahgunaan Napza	17
14	Fakir Miskin	9.387
15	Rumah Tidak Layak Huni	1.415
16	Keluarga Rentan	1.693
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	25
18	Korban Bencana Alam	159
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	21
20	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	1

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2017

2.1.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Kurun waktu 2012-2016, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan

tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2012 angka TPAK mencapai 59.41 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 63,26 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya juga berfluktuatif selama 2012-2016. Kendati demikian, adanya kemajuan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya selama dua tahun terakhir (2015-2016). Tahun 2012, angka TPT mencapai 7,63 persen. Angka TPT tersebut menurun berkisar 50 persen pada periode 2013-2014. Sampai tahun 2016, tercatat TPT di Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,79 persen.

Gambar 2.18
Perkembangan TPAK dan TPT
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (persen)

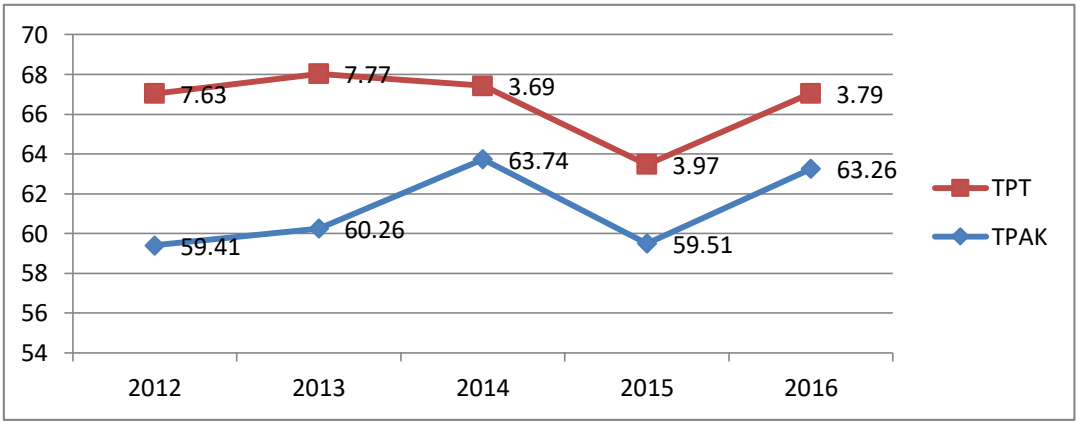

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2017

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2015, angkatan kerja berpendidikan SMA sangat menonjol, yaitu mencapai 26,69 persen. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 22,40 persen dan SD sebanyak 22,34 persen. Adapun angkatan kerja berpendidikan tinggi (universitas) tidak lebih dari 7,75 persen tahun 2015.

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha potensial yang digeluti masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebagai sumber penghasilan utama relatif mengalami pergeseran. Lapangan usaha pertanian (primer) merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2012, komposisi penduduk yang bekerja pada lapangan usaha tersebut mencapai 88,15 persen. Komposisi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian bertambah menjadi 55,75 persen tahun 2016. Adapun proporsi penduduk yang bekerja di lapangan usaha jasa-jasa memperlihatkan penurunan dari 3.53 persen tahun 2012 menjadi 33,92 persen tahun 2016. Sebaliknya, lapangan usaha industri (sekunder) semakin tumbuh dengan menyerap tenaga kerja dari 8,32 persen tahun 2012 menjadi 18,94 persen tahun 2016.

Gambar 2.19
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

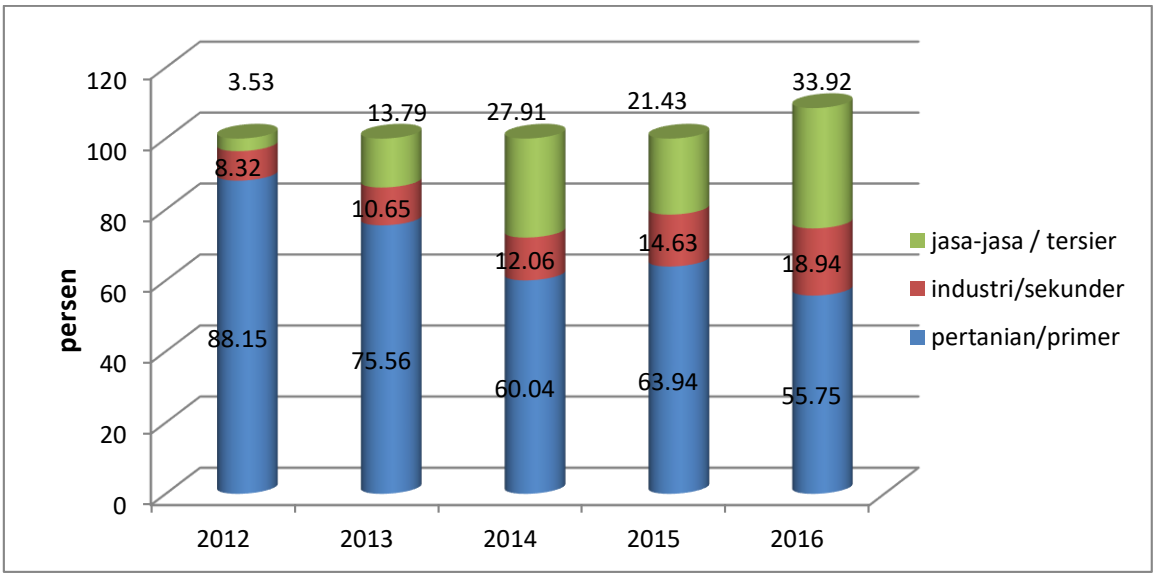

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

2.1.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Adapun IPG Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2012 berkisar sebesar 82,63 persen, Tahun 2013 sebesar 86,35 persen, Tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan 89,62 persen pada Tahun 2015.

IPG Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2012 lebih baik dari kurun waktu lima tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender.

Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antara lain APS SD sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir, sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA sederajat, dan rasio jenis kelamin sejak lahir. Selanjutnya, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan APS SD penduduk laki-laki dan APS SMA bagi penduduk perempuan. Kesenjangan Indek Pembangunan Gender pada tahun 2012 sebesar 82,63 meningkat tajam hingga pada tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan mengalami penurunan pada data terakhir tahun 2015 sebesar 89,62 persen.

Gambar 2.20

Grafik Indeks Pembangunan Gender Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2015

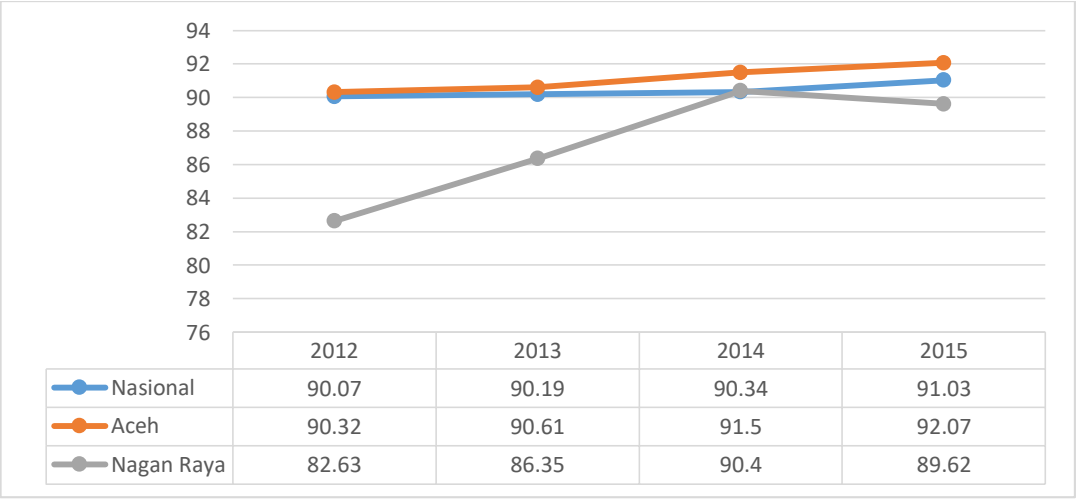

	2012	2013	2014	2015
Nasional	90.07	90.19	90.34	91.03
Aceh	90.32	90.61	91.5	92.07
Nagan Raya	82.63	86.35	90.4	89.62

Sumber : BPS Aceh, 2016

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan masih tergolong minim, dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Adapun keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terlihat sebagaimana Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2015- 2016

No	Uraian	2015	2016
1	Pekerja perempuan di pemerintah	2.083	2.188
2	Jumlah Pekerja Perempuan	18.253	18.253
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga	44,70	52,27

Sumber: BPS Kab. Nagan Raya 2016-2017

3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam penyelenggaran pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada Tabel 2.52

Tabel 2.52

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK

Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	3	4	4	4	4
2	Jumlah total kursi di anggota DPRK	25	25	25	25	25
3	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRK	12%	16%	16%	16%	16%

Sumber: DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, 2017

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.49

Rasio KDRT Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KDRT	-	9	16	37	-
2	Jumlah rumah tangga	-	81944	81944	81944	-
3	Rasio KDRT		0,011 %	0,019 %	0,045%	

Sumber: DPMGP4 tahun 2012-2016

Kejadian KDRT di Kabupaten Nagan Raya yang dilaporkan dan tercatat pada tahun 2013 sebanyak 9 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,011%, di tahun 2014 tercatat 16 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,019 % dan di tahun 2015 tercatat 37 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,045 %. Seluruh kasus yang terjadi telah berhasil diselesaikan.

5. Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan terhadap laki-laki berdasarkan jenjang pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 98,82 persen tahun 2016, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 94,02 persen.

Kondisi APM yang memprihatinkan terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, meskipun adanya perbaikan selama lima tahun terakhir. Capaian APM SMP/MTs hanya sebesar 86,92 persen dan APM SMA/MA sebesar 64,86 persen tahun 2016. Angka APM tersebut belum mencapai angka ideal atau belum mencapai target pemerintah. Adapun tahun 2012, APM SMP/MTs sebesar 84,02 persen dan APM SMA/MA sebesar 66,69 persen.

Tidak adanya disparitas yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian APM. Data tahun 2016, memperlihatkan bahwa APM perempuan cenderung lebih baik dari APM laki-laki pada pendidikan SMA/MA, kendati belum mencapai APM ideal. Tercatat APM perempuan pada pendidikan SMA/MA sebesar 79,07 persen dan APM laki-laki sebesar 64.86 persen. Sementara pada tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APM laki-laki lebih rendah dengan pencapaian APM perempuan. Upaya perbaikan dan peningkatan APM pada tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA dilakukan melalui peningkatan pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin serta memastikan

peserta didik di setiap kecamatan (termasuk desa) mengecap pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA.

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012-2016

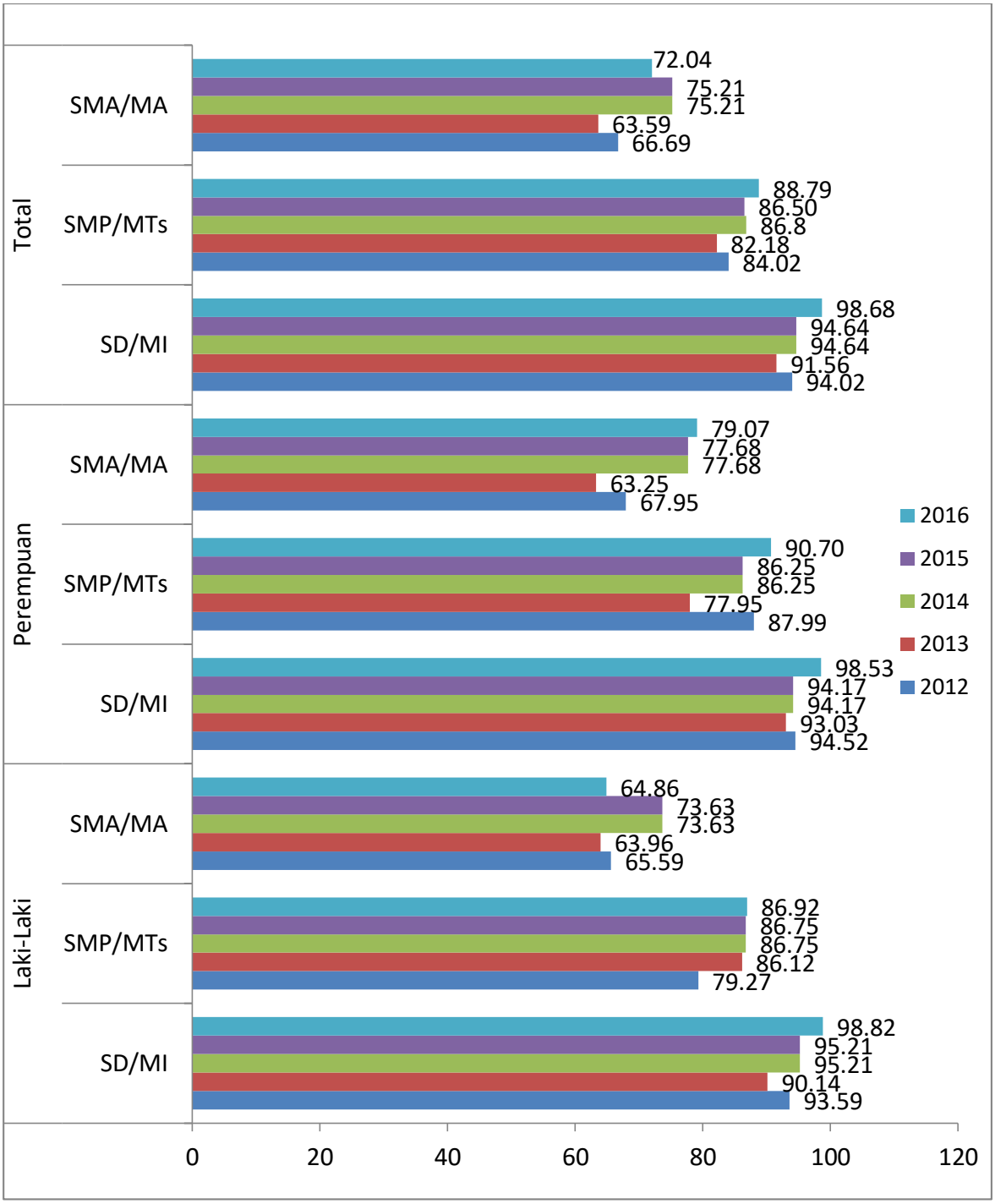

Sumber : BPS Aceh, 2017

Selanjutnya perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Nagan Raya dengan Provinsi Aceh dan Nasional di tahun 2016 adalah Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 tercatat 94,64 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APM Provinsi Aceh yaitu 97,80 % dan APM Nasional sebesar 96,20 persen. Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya mengungguli Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs yaitu 86,50 persen. Di bandingkan dengan APM Provinsi Aceh yaitu 85,20 dan APM Nasional 77,45 Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, Kabupaten Nagan Raya masih lebih unggul yaitu 75,21 di bandingkan dengan APM Provinsi Aceh yaitu 69,20 dan APM Nasional yaitu 59,46.

Table 2.54

Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2016

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	Nasional
APM SD/MI	94,64	97,80	96,20
APM SMP/MTs	86,50	85,20	77,45
APM SMA/MA	75,21	69,20	59,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2017

2.1.3.2.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2012-2016 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.55

Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Jenis/Macam	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Beras (kg)	63.380.200	128.256.700	99.748.285	109.586.100	110.598.150
2	Kebutuhan Beras (kg)	18.255.600	19.031.520	19.493.760	18.608.400	18.986.760
3	Surplus Beras (kg)	45.124.600	109.225.180	80.254.525	90.977.700	91.611.390

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

2.1.3.2.2.4 Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah tahunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya di tahun 2016 adalah 4,22 % Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 2.56 dibawah ini.

Tabel 2.56

Timbulan sampah yang ditangani 2016

Volume Timbulan Sampah yang ditangani (m³)	**16,3**
Total Timbulan Sampah (m³)	386,56
Timbulan sampah yang ditangani	4,22 %

Sumber: DLH Nagan Raya

2.1.3.2.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 111.280 orang, sedangkan yang sudah tercetak KTP sebanyak 72.293 atau sebesar 64,96 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam perekaman data e-ktp masih sangat rendah dikarenakan faktor antara lainnya yang paling mendasar yaitu pusat perekaman data elektronik tersebut jauh dari pemukiman sebagian warga.

Setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran, kepemilikan akta kelahiran si anak adalah merupakan wujud pemenuhan orang tua terhadap anak, karenanya setiap kelahiran harus dilaporkan kepada pemerintah gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kelahiran. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk adalah sebanyak 171 orang dari jumlah bayi yag lahir sebanyak 255 orang.

2.1.3.2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di masyarakat. Kelembagaan PKK hingga tahun 2016 berjumlah 222 lembaga. Begitu juga dengan kelompok kepemudaan berjumlah 222 kelompok dan Desa Swadaya berjumlah 222 desa.

Program pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan saat ini belum terkoordinir secara optimal, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi-organisasi kepemudaan dalam peningkatan SDM dan produktivitas pemuda menyebabkan fokus pemberdyaan pemuda belum mengarah pada peningkatan keterampilan hidup (life skill) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup *(livelihood).* Pembinaan-pembinaan yang selama ini dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah masih bersifat parsial (satu aspek saja) dan belum menyeluruh *(holistic).* Pemerintah perlu mrancang program pemberdayaan secara berkelanjutan terutama untuk

pemberdyaan pemuda, karena pemuda merupakan komponen bangsa yang sering dijadikan indikator keberhasilan ataupun kemunduran suatu daerah atau Bangsa karena pemuda merupakan pelopor perubahan *(tranformation agent)* dalam pembangunan suatu suatu daerah.

2.1.3.2.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan metode/alat KB yang digunakan, tampaknya metode suntik dan pil KB masih menjadi pilihan utama. Penggunaan alat KB suntik cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2012, metode suntik KB digunakan oleh 45,12 persen akseptor, dan turun menjadi 16,94 persen akseptor tahun 2016. Sedangkan untuk pil KB digunakan oleh 9,97 persen pengguna tahun 2016, turun dibanding tahun 2012 yang sebanyak 35,39 persen pengguna. Alat ini digunakan karena kepraktisan dan kemudahannya dan kemungkinan masih dominan digunakan akseptor sampai beberapa waktu mendatang. Adapun alat KB lainnya yang digunakan seperti IUD, kondom, implan, dan MOW/MOP.

Tabel 2.57
Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas dan Pernah Kawin
Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan, 2012-2016 (persen)

No	Metode Kontrasepsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Suntik KB	45,15	45,15	58,12	45,53	16,944
2	Pil KB	35,39	35,39	23,85	31,28	9,975
3	Lainnya	19,46	19,46	18,03	23,19	8.133
4	Persentase perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB	78,48	78,48	69,91	81,91	

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

2.1.3.2.2.8 Perhubungan

Sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jalur angkutan perairan/laut perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan jalur pengangkutan yang tersedia terutama untuk pengangkutan barang hanya lewat darat sehingga untuk mendukung pengembagan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kawasan Agro Industri maka pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga fasilitas lainnya yang dapat mendukung hadirnya tranportasi laut terutama untuk pengangkutan barang.

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Selama tahun 2012-2015, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang.

Tabel 2.58
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Jalan Kabupaten	420,74	420,83	420,84	924,43
Jumlah Kendaraan Penumpang	100	82	82	102
Rasio	4,2	5,13	5,13	9,06

Sumber: Olahan data primer

Dari table tersebut terlihat bahwa Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di kabupaten nagan raya tercatat di tahun 2012 adalah 4,2, ditahun 2013 adalah 5,13, ditahun 2014 adalah 5,13 dan di tahun 2015 adalah 9,06.

- **Perhubungan Udara**

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Adapun jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.59

Jumlah Penumpang dating dan berangkat tahun 2012-2015

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penumpang Datang	16.972	16.972	21.550	23.681	24.005
Penumpang Berangkat	14.592	14.592	22.437	25.599	25.249

Dari tabel tersebut telihat bahwa ditahun 2012, masyarakat bepergian ke luar daerah melalui bandara cutnyak dhien sebanyak 14.592 orang, naik hingga 25.249 orang di tahun 2016. Demikian pula masyarakat yang datang melalui bandara cutnyak dhien di tahun 2012 adalah 16.972 orang, naik hingga 24.005 orang di tahun 2016. Bandar Udara Cut Nyak Dhien menjadi bandara utama, setelah bandar udara T. Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi primadona masyarakat/pengusaha dalam bepergian untuk wilayah barat, Aceh.

- **Perhubungan Laut**

Di samping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang, dan jasa. Perannya juga begitu besar dalam percepatan ekonomi daerah di wilayah pesisir. Namun, aktivitas jasa transportasi laut di Nagan Raya belum ada. Kondisi ini berkait erat minimnya sarana dan prasarana pendukung.

2.1.3.2.2.9 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat Layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Kendati demikian, telepon rumah juga masih diminati masyarakat sebagai sarana komunikasi. Sesuai data PT. Telkom Indonesia Divre I Sumatera area pelayanan Meulaboh, tercatat pemasangan baru sambungan telepon di Kabupaten Nagan Raya tahun mencapai 74 sambungan tahun 2015.

Tabel 2.60

Jumlah Pemasangan Baru Sambungan Telepon, Tahun 2012-2015

Bulan	2012	2013	2014	2015
Januari	9	10	17	10
Februari	11	11	16	4
Maret	13	13	9	3
April	9	8	10	3
Mei	12	11	10	2

Juni	12	12	2	1
Juli	14	14	9	1
Agustus	7	7	9	8
September	10	10	11	7
Oktober	12	12	12	10
Nopember	8	8	9	12
Desember	9	9	4	11
Jumlah	126	125	118	74

2.1.3.2.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nagan Raya (2016), mencatat bahwa jumlah industri tradisional di Nagan Raya adalah sebanyak 374 unit. Penyumbang terbanyak pada industri ini adalah industri bahan galian, yaitu sebanyak 496 unit. Jumlah industri makanan dan tembakau berada pada posisi berikutnya, yaitu sebanyak unit 228. Industri barang lainnya, dan industri jasa juga cukup memadai. Tahun 2016, tercatat industri bahan lainnya sebanyak 150 unit dan industri jasa sebanyak 420 unit.

Tabel 2.61
Kondisi Industri Tradisional
di Kabupaten Nagan Raya, 2016 (Unit)

Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau	Industri Kain dan Kulit	Industri Kayu	Industri dari Besi	Industri dari Bahan Galian	Industri dari kertas	Industri Barang Lainnya	Industri Jasa	Jumlah
Darul Makmur	96	102	53	14	1	7	24	32	329

Tripa Makmur	2	22	9	3	-	1	2	17	56
Kuala	107	57	18	22	496	16	11	25	752
Kuala Pesisir	88	58	19	13	1	1	24	70	292
Tadu Raya	32	15	11	2	1	2	19	47	129
Beutong	73	32	20	1	-	6	74	53	259
Beutong Ateuh Banggalang	3	2	4	-	-	-	5	29	43
Seunagan	228	102	28	11	-	13	199	68	650
Suka Makmue	107	53	10	1	4	5	34	25	239
Seunagan Timur	140	79	29	9	1	6	150	54	468
Jumlah	876	522	201	76	505	75	542	420	3.217

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kab. Nagan Raya, 2017

Industri yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Sentra pengembangan industri makanan dan tembakau terdapat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Kuala Pesisir. Mayoritas industri kayu berada di Seunagan, Beutong Ateuh Banggalang, Seunagan Timur, dan Beutong.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62
Jumlah dan Status Koperasi
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi	Unit	202	201	201	201	190
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	62	83	83	83	83
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	140	113	113	113	113
Jumlah Koperasi yang dibina	Unit	22	20	20	20	20
Jumlah Anggota Koperasi	Orang	6,282	6.330	6.330	6.370	6.400

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Pada tahun 2012, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 202 unit koperasi. Angka tersebut meningkat menjadi 196 unit pada tahun 2016. Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan dengan lahirnya undang-undang desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuhkembangkan percepatan pembangunan desa/gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen

dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota.

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan *(deposits)*, kredit *(loan)*, pembayaran sebagai transaksi jasa *(payment service)* serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Jumlah BPR sampai dengan tahun 2016 sebanyak 2 unit.

Tabel 2.63
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah BPR/LKM aktif	2	2	2	2
2.	Jumlah seluruh BPR/LKM	2	2	2	2
3.	Persentase usaha mikro dan kecil	100%	100%	100%	100%

2.1.3.2.2.11 Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut

menanamkam modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2013 dan 2014 jumlah investor (PMDN) adalah 38 dan (PMA) 12 perusahaan, pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 13 perusahaan untuk PMDN dan dan 6 perusahaan untuk PMA. Dan pada tahun 2016 jumlah investor adalah 6 perusahaan untuk PMDN dan 5 Perusahaan untuk PMA, penurunan jumlah investor ini terjadi karena ada perusahaan yang tidak melapor pada tahun 2015 dan 2016 sementara perusahaan tersebut masih aktif beroperasi.

Tabel 2.64
Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	PMA	12	12	6	5
2	PMDN	38	38	13	6
3	Jumlah	50	50	19	11

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi di sektor Perkebunan merupakan investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diikuti investasi sektor kelistrikan seperti pembangunan PLTU di suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang dan Kecamatan Darul Makmur. Dengan nilai investasi mencapai Rp. 16.602.475.500,- atau 16,60 Milyar Rupiah pada tahun 2013 dan Rp. 21.550.941.000, atau 21,55 Milyar Rupiah pada Tahun 2014, mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi Rp. 177.149.935.170,- atau 177,15 Milyar rupiah, dan pada tahun 2016 menurun sebesar Rp. 89.792.941.770,- atau 89,80 Milyar rupiah. Pada Tahun 2013 terdapat 38 perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi di Kabupaten Nagan Raya dengan nilai investasi sebesar Rp.1.807.920.251.822,- atau 1,8 Milyar rupiah. Pada Tahun 2014 terdapat 38 perusahaan dalam negeri yang berinvestasi dengan nilai investasi sebasar Rp. 2.251.350.778.455,- atau

2,25 Milyar rupiah. Dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 penanaman modal dalam negeri terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 nilai investasi perusahaan dalam negeri di Kabupaten Nagan Raya mencapai Rp. 83.170.758.724,- atau 83,2 Milyar rupiah. Dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp. 406.269.228.604 atau 406,3 Milyar rupiah.

Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional, yaitu investasi penanaman modal dalam negeri (PNDM) dan penanaman modal asing (PMA) dari tahun 2013 sampai dengan 2016 di kabupaten Nagan Raya fluktuatif, dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Pertumbuhan Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Nilai Investasi bersekala Nasional(PMA +PMDN)	1.824.522.727.322	2.272.901.719.455	260.320.693.894	496.062.170.374
2	PMA	16.602.475.500	21.550.941.000	177.149.935.170	89.792.941.770
3	PMDN	1.807.920.251.822	2.251.350.778.455	83.170.758.724	406.269.228.604

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja PMA ditambah dengan jumlah tenaga kerja PMDN, jumlah penyerapan tenaga kerja di kabupaten Nagan Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah serapan tenaga kerja sebesar 2.262 orang, tahun 2014 sebesar 2.351 orang, tahun 2015 sebesar 2.721 orang dan pada tahun 2016 sebesar 3.252 orang.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 45, 24 dan pada tahun 2016 menjadi 286,54. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Tenaga Kerja PMA	1957	1958	24	65
2.	Tenaga Kerja PMDN	305	393	2697	3087
3.	Jumlah Penyerapan tenaga kerja	2.262	2.351	2.721	3.152
4.	Jumlah PMA/PMDN	50	50	19	11
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	45,24	47,02	143,21	286.54

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Realisasi nilai investasi PMDN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 19.69 %, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2606.9 % dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 79.528%. Tahun tahun 2016 terjadi kenaikan investasi yang sangat signifikan salah satu penyebabnya adalah ada beberapa perusahaan yang memberikan laporan tahunan nya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya, sementara perusahaan tersebut masih beroprasi. Jadi data untuk tahun 2016 masih bersifat sementara.

Tabel 2.67
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN
Kabupaten Nagan Raya 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi PMDN tahun evaluasi - Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi	Na	443.430.526.633	(2.168.180.019.731)	323.098.469.880
2	Realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi	1.807.920.251.822	2.251.350.778.455	83.170.758.724	406.269.228.604
3	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Na	19.696.2	(2606.9)	79.528

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

2.1.3.2.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah lapangan /sarana olahraga	Unit	40	40	40	40	40

2	Jumlah Klub Olah raga	Klub	197	197	197	197	197
3	Jumlah cabang Olah raga	Buah	10	10	10	10	10
4	Jumlah Organisasi kepemudaan	Buah	7	7	7	7	7
5	Jumlah Pemuda	Orang	39,860	39,860	39,860	39,860	39,960

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2016 berjumlah 40 unit . Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2017 adalah sebanyak 197 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 10 cabang.

Tabel 2.69

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0.05	0.00	0.07	0.04	0.08
3	Cakupan pembinaan atlet muda	0.51	0.62	0.48	0.51	0.29
4	Jumlah atlet berprestasi	0	0	0	6	3
5	Jumlah prestasi olahraga	3	0	5	3	5

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Nagan Raya sangat minim memperoleh prestasi di bidang olahraga, hal ini ditunjukkan dengan perolehan 5 prestasi di tahun 2016, yaitu cabang olahraga silat, karate, taekwondo, bulu tangkis dan tenis meja. Minimnya jumlah prestasi olahraga ini juga sangat dipengaruhi dengan jumlah atlet yang berprestasi yang juga mengalami penurunan, pada tahun 2016 hanya ada 3 orang atlet yang berprestasi, yaitu atlet canagn olahraga silat, taekwondo dan bulutangkis. Hal ini juga disebabkan karena sedikit sekali pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap para atlet muda, hal ini ditunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pembinaan tersebut mengalami penurunan yaitu 0,29% pada tahun 2016.

2.1.3.2.2.13 Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang yang dikelola secara terpadu juga tidak mengalami peningkatan. Berdasarkankan data dari tahun 2012 – 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran.
Sedangkan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tidak ada sama sekali. Padahal Kabupaten Nagan Raya memiliki 17 tempat bersejarah, 18 mesjid dan 45 makam.

Pengembangan sektor kebudayan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat pada Tahun 2016 sebanyak 89 sanggar.

Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata

bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian.

2.1.3.2.2.14 Perpustakaan

Jumlah perpustakaan Kabupaten di Nagan Raya dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 hanya satu, sedangkan perpustakaan gampong mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah perpustakaan gampong hanya 34, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 44 unit.

Tabel 2.70

Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Unit)

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
Seunagan	5	5	5	5	7
Beutong	3	3	3	3	3
Seunagan Timur	4	4	4	4	4
Suka Makmue	3	5	5	5	5
Kuala	5	6	6	6	6
Kuala Pesisir	4	5	5	5	6
Tadu Raya	3	4	4	4	4
Darul Makmur	4	4	4	4	4
Tripa Makmur	2	3	3	3	3
Beutong Ateuh Banggalang	1	2	2	2	2
Jumlah	34	41	41	41	44

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Perpustakaan Daerah Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat sebanyak 1.763 orang tahun 2016 bila dibandingkan jumlah

pengunjung perpustakaan pada tahun 2012 sebanyak 525 orang. Hal ini didukung dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki sejumlah 2.870 buah pada tahun 2016.

2.1.4.3.1 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.4.3.1.1 Pariwisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.71

Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis objek wisata	Jumlah Objek Wisata
1	Beutong	Wisata Alam Krueng Isep	5
		Panorama Gunung Singgah Mata	
		Bendungan Irigasi Jeuram	
		Masjid Dayah	
		Makam Teungku Di Seumot	
2	Kuala Pesisir	Wisata Pantai Indah Naga Permai	2
		Wisata Pantai Seunagan	
3	Tripa Makmur	Wisata Pantai Suak Dama	3
		Arung Jeuram Krueng Tripa	
		Situs Kerajaan Islam Ujong Raja	
4	Tadu Raya	Danau Laut Tadu	2
		Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani	

5	Seunagan Timur	Makam Habib Muda Seunangan	1
6	Kuala	Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh	1
7	Suka Makmue	Taman Makam Pahlawan	1
8	Darul Makmur	Air Terjun Alue Waki	1
9	Beutong Ateuh Banggalang	Batee Meucureh Cut Nyak Dhien	1
10	Seunagan	Makam Indatu Kuta Aceh	1
Jumlah			17

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2017

Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta.

Jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel / wisma / losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 1 unit hotel dan 4 unit wisma yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga

sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata memadai. Jumlah sarana dan fasilitas pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Jenis Sarana	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Hotel/Wisma/Losmen	Unit	4	4	5	5	5
2	Rumah Makan / Restoran	Unit	25	25	25	26	27
3	Warung Kopi/Cafe	Unit	15	26	27	28	30

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2017

2.1.4.3.1.2 Pertanian

Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.73
Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,68	40,37	40,75	42,59	45,55

	1. Pertanian,Peternakan dan Jasa Pertanian	32,68	34.78	35,13	37,05	40,05
	2. Kehutanan dan Penebangan kayu	3,48	3,53	3,56	3,48	3,44
	3. Perikanan	1,99	2,05	2,05	2,05	2,07

Komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar. Tahun 2012, areal lahan yang ditanami padi sebanyak 17.348 ha. Luas lahan tanam padi tersebut meningkat drastis menjadi 25.969,4 .ha tahun 2015. Akhir tahun 2016, lahan sawah yang ditanami padi bertambah menjadi 34.527,1 ha. Tahun 2016, produksi padi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 170.15 ton, tertinggi selama lima tahun terakhir. Adapun berkisar diatas rata-rata produktivitas lahan sawah berkisar diatas 65.0 Kw selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.74
Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi					
	Produksi (ton)	97,508	197,318	153,458	168,594	170,151
	Luas areal tanam(ha)	17,348	33,94	33,242	25,969	34,527
	Luas areal panen (ha)	17,348	33,504	31,403,26	25,969,4	26,177

	Produktivitas padi (ton/ha)	56,2	58,9	48,9	64,9	65,0
2	Jagung					
	Produksi(ton)	1,023.12	1.152	240,0	222.60	309,10
	Luas areal tanam (ha)	1,205	1,28	245	284	730
	Luas areal panen (ha)	1,176	1,280	240	212	281
	Produktivitas jagung(ton/ha)	20,6	20,9	33,5	35	64,5
3	Kedelai					
	Produksi (ton)	173.40	105.40	170.00	136.00	154.00
	Luas areal tanam (ha)	860	577	85	57	637
	Luas areal panen (ha)	867	527	85	68	407
	Produktivitas kedelai(ton/ha)	13,1	13,2	12,3	17,6	23,1
4	Kacang Tanah					
	Produksi (ton)	4.950	4,860	684.0	460,0	567,2
	Luas areal tanam (ha)	1,22	1,128	171	94	94
	Luas areal panen (ha)	1,239	1,215	171	115	162
	Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)	118,6	18,4	19,3	20,0	34,0
5	Kacang Hijau					
	Produksi (ton)	219.0	37.5	15.0	63.00	49.5

	Luas areal tanam (ha)	150	26	21	41	42
	Luas areal panen (ha)	146	25	10	31	31
	Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)	0,95	0,71	0,71	12,00	15
6	Ubi Kayu					
	Produksi (ton)	1.071	879.0	870.0	222	1,241
	Luas areal tanam (ha)	385	332	305	69	152
	Luas areal panen (ha)	357	293	290	74	104
	Produktivitas ubi kayu (ton/ha)	20,6	20,9	33,5	35	64,5
7	Ubi Jalar					
	Produksi (ton)	680	126	250	170	1,088
	Luas areal tanam (ha)	301	72	113	52	84
	Luas areal panen (ha)	272	65	100	68	83
	Produktivitas ubi jalar (ton/ha)	101,0	98,3	98,4	101,0	250

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2012-2016 sebagai berikut.

Tabel 2.75

Pembinaan Kelompok Tani

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN)	180	497	503	786	959
2	Jumlah kelompok tani	705	740	1.292	1.107	1.107
3	Cakupan bina kelompok tani (%)	25,53 %	67,16 %	38,93%	71,00%	86,63%

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi kelompok tani sebanyak 1.107 kelompok, UPJA 51 unit, kios pertanian 24 unit, KTNA 28 kelompok, koperasi tani 10 unit, BPP 10 unit, dan BBU 2 unit, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76

Jenis Kelembagaan Pertanian

di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Jenis Kelembagaan	Satuan	Jumlah
1	BBU	Unit	2
2	Koperasi Tani	Unit	10
3	UPJA	Unit	51
4	Badan Penyuluh Pertanian (BPP)	Unit	10
5	Kios Pertanian	Unit	34
6	Kelompok Tani	Unit	1.107
7	Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Unit	78
Jumlah			1.292

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang besar dalam peternakan, terutama ternak besar sapi dan kerbau. Potensinya juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan mengingat masih tersedianya bahan baku sebagai sumber pakan ternak. Selama lima tahun terakhir, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya cenderung berluktuatif. Tahun 2012, populasi sapi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 9,032 ekor. Populasi sapi tersebut meningkat drastis menjadi 10,159 ekor tahun 2015. Tahun berikutnya populasi sapi terus mengalami kenaikan hingga menjadi 10.463 ekor tahun 2016. Adapun kerbau sebanyak 9.027 ekor tahun 2012, juga terus meningkat hingga menjadi 9.808 ekor tahun 2016.

Gambar 2.22
Perkembangan Populasi Ternak
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016 (Ekor)

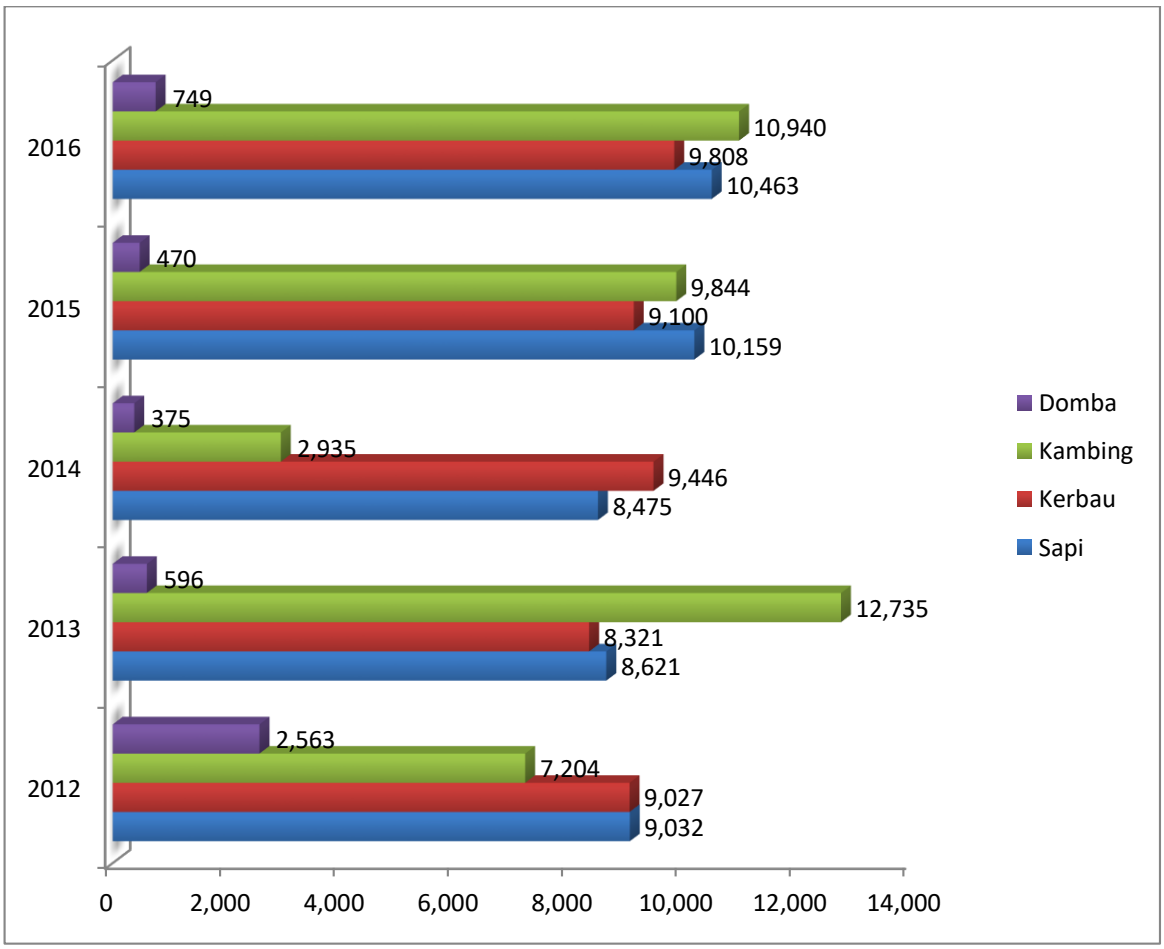

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Sentra pemeliharaan sapi terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Kecamatan Darul Makmur. Beberapa kecamatan lainnya yang merupakan juga sentra pemeliharaan sapi meliputi Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala. Untuk peternakan kerbau, sentra pemeliharaannya terdapat di Kecamatan Seunagan, disamping itu juga Kecamatan Seunagan Timur dan Beutong. Populasi ternak besar dan kecil menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77

Populasi Ternak Kecil dan Besar Menurut Kecamatan, Tahun 2016

Kecamatan	Jenis Ternak (ekor)			
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Darul Makmur	2.265	160	1924	85
Tripa Makmur	771	373	105	64
Kuala	1.466	1.054	1.464	72
Kuala Pesisir	1.393	827	1.023	75
Tadu Raya	1.769	770	1.277	60
Beutong	848	1.132	2.542	53
Beutong Ateuh Banggalang	250	616	693	62
Seunagan	627	1.997	895	86
Suka Makmue	464	1.283	892	97
Seunagan Timur	610	1.596	125	94
T o t a l	10.463	9.808	10.940	748

Selain ternak besar, ternak ukuran sedang seperti kambing dan domba pun cukup banyak. Terdapat 1,094 ekor kambing dan 749 ekor domba dipelihara oleh peternak di Kabupaten Nagan Raya (kondisi tahun 2016). Sentra pemeliharaan kambing terbesar di Kabupaten Nagan Raya adalah Kecamatan Seunagan, Kuala, Darul Makmur, Tadu Raya,Seunagan Timur dan termasuk juga BeutongS. Untuk ternak domba, adanya kecenderungan semakin menurun selama lima tahun terakhir. Tahun 2012, populasi domba di Kabupaten Nagan Raya

mencapai 2,563 ekor. Untuk ternak domba, sentra pemeliharaannya relatif merata di setiap kecamatan.

2.1.4.3.1.3 Perkebunan

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi areal yang luas untuk pengembangan perkebunan mencapai 77.164 Ha.

Komoditas kelapa sawit merupakan andalan perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit terus meningkat signifikan. Rata-rata luas areal pengembangan kelapa sawit meningkat hampir 19,32 persen setiap tahunnya (periode 2012-2016). Tahun 2012, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit 39,322 ha, sementara tahun 2016 telah mencapai 49,400 ha.

Gambar 2.23
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

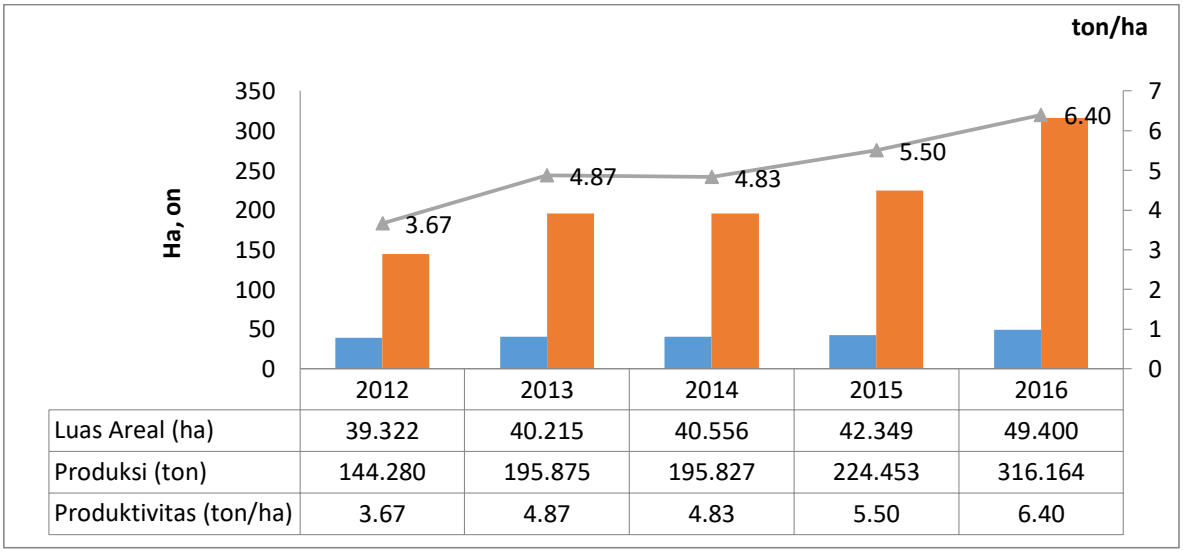

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Areal (ha)	39.322	40.215	40.556	42.349	49.400
Produksi (ton)	144.280	195.875	195.827	224.453	316.164
Produktivitas (ton/ha)	3.67	4.87	4.83	5.50	6.40

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2017

Luas tanam yang cenderung bertambah berimplikasi positif terhadap peningkatan produksi kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2016, tercatat produksi kelapa sawit di Nagan Raya sebanyak 316,164 ton, meningkat dari produksi tahun 2012 (sebanyak 144,280 ton). Selama periode 2012-2016, produksi kelapa sawit meningkat rata-rata hampir 31,61 persen/tahun.

Karet merupakan komoditas andalan ekspor dan terus dikembangkan petani di Nagan Raya. Luas areal yang ditanami petani memperlihatkan peningkatan. Tahun 2012, tercatat areal karet yang ditanami petani berjumlah 11,549 ha. Akhir tahun 2016, areal penanaman komoditas karet telah meningkat menjadi 14.052,86 ha, atau naik rata-rata hampir 21,67 persen setiap tahunnya. Meskipun areal penanaman karet meningkat, namun produksi karet masih terbatas. Tahun 2012, produksi karet di Nagan Raya telah mencapai 3.386 ton. Sementara tahun 2016 produksi karet meningkat menjadi 18.387,3 ton.

Gambar 2.24
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

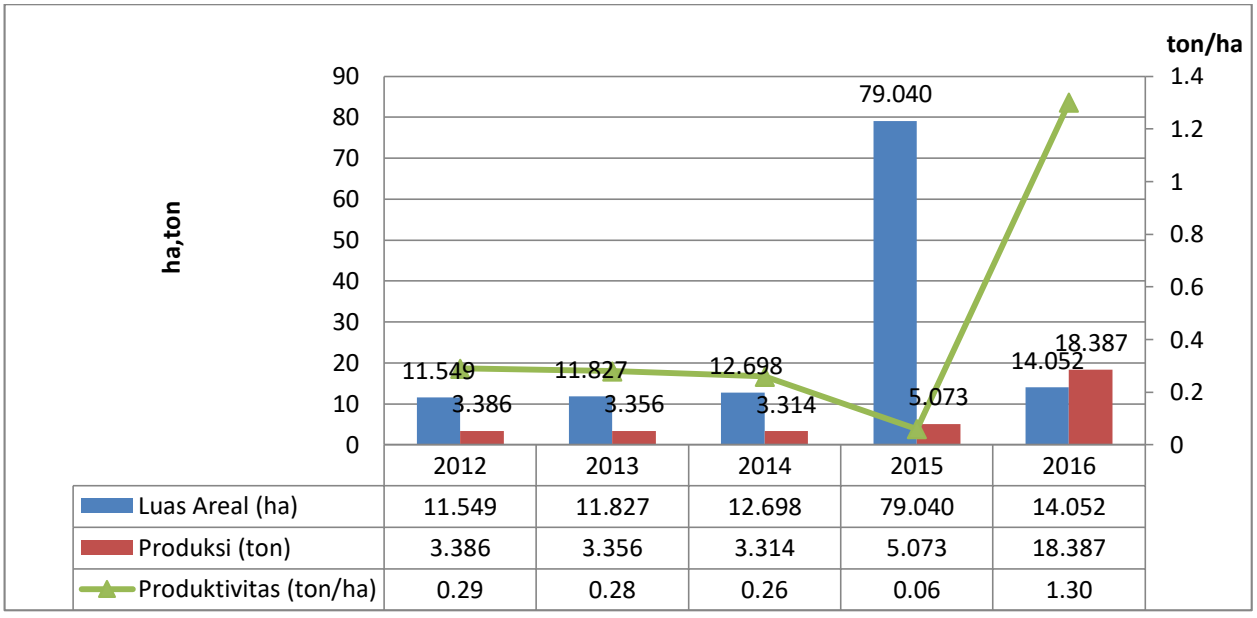

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Areal (ha)	11.549	11.827	12.698	79.040	14.052
Produksi (ton)	3.386	3.356	3.314	5.073	18.387
Produktivitas (ton/ha)	0.29	0.28	0.26	0.06	1.30

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2017

Kakao sebagai komoditas ekspor juga ditanami petani Nagan Raya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), areal perkebunan kakao atau bahan

baku coklat di Kabupaten Nagan Raya tidak meningkat. Komoditas andalan ekspor tersebut ditanami petani seluas 5.311,56 ha tahun 2016. Angka tersebut jauh lebih rendah dari tahun 2012 yang seluas 5.372 ha. Kondisi ini menandakan bahwa minat petani untuk membudidayakan coklat sebagai komoditas andalan daerah semakin menurun.

Sampai akhir tahun 2016, produksi kakao di Kabupaten Nagan Raya tercatat 2.821,44 ton. lima tahun sebelumnya produksi kakao masih sebanyak 1.330 ton. Itu artinya produksi kakao meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun luas areal penanaman kakao perkebunan rakyat menurun, namun tingkat produktivitasnya masih relatif stabil selama lima tahun terakhir. Dibanding luas areal, produktivitas yang dicapai masih relatif rendah, yaitu rata-rata 1.500,00 ton/ha (kondisi tahun 2016).

Gambar 2.25
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

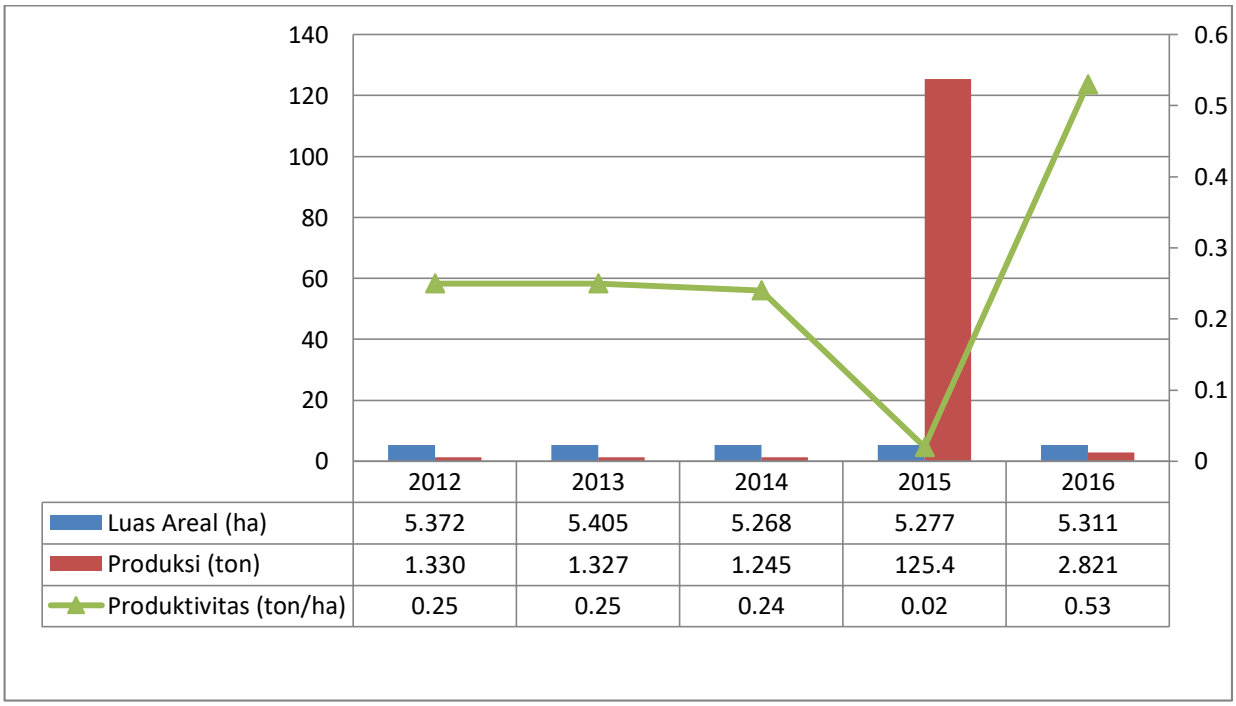

	2012	2013	2014	2015	2016
Luas Areal (ha)	5.372	5.405	5.268	5.277	5.311
Produksi (ton)	1.330	1.327	1.245	125.4	2.821
Produktivitas (ton/ha)	0.25	0.25	0.24	0.02	0.53

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2017

Komoditas kelapa dalam memperlihatkan penurunan luas tanam di Kabupaten Nagan Raya. Adanya kecenderungan petani untuk beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan peningkatan pendapatan, disamping juga didukung kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk pengembangan komoditas lain, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Penurunan luas tanam kelapa dalam juga berkait erat dengan kurangnya pemeliharaan tanaman. Pada tahun 2012, luas areal komoditas kelapa dalam mencapai 1.350 ha, jauh lebih rendah dari luas areal budidaya kakao. Tahun berikutnya, luas lahan budidaya kelapa dalam semakin meningkat menjadi 1.351 ha (tahun 2013), 1.405,5 ha (tahun 2014), 1.450,8 ha (tahun 2015). Akhir tahun 2016, tercatat luas tanam kelapa dalam 1.486,60 ha.

Luas tanam yang semakin bertambah menyebabkan produksi kelapa dalam meningkat drastis. Akhir tahun 2016, tercatat produksi kelapa dalam 1.375,13 ton, jauh lebih tinggi dari produksi tahun 2012 yang mencapai 658 ton. Tingkat produktivitas lahan juga meningkat, yaitu rata-rata produksi 1.500,00 ton/ha. Gambaran perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas komoditas kelapa dalam sebagaimana tertera pada gambar berikut.

Gambar 2.26
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016

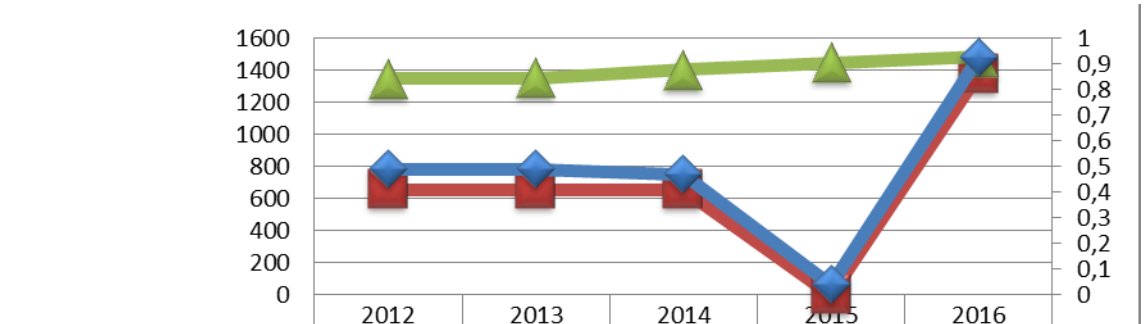

	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi (ton)	658	658	658	0	1375
Luas Areal (ha)	1350	1351	1405	1450	1486
Produktivitas (ton/ha)	0,49	0,49	0,47	0,04	0,93

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2017

Pengembangan komoditi perkebunan di Nagan Raya terutama untuk perkebunan rakyat selama ini masih dihadapkan beberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen. Sebagian besar bibit unggul masih harus didatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yang relatif mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukan klon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnya harga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan terutama akibat rendahnya kualitas pengolahan hasil panen, lemahnya sistem kelembagaan petani, dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.

2.1.4.3.1.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

Fasilitas Listrik

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Selama tahun 2012-2016, produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Produksi listrik tahun 2012 sebesar 400.627 Kwh. Produksi listrik tersebut meningkat menjadi 560.160 Kwh tahun 2016. Adapun produksi listrik pada tahun 2015 sedikit berkurang dibanding tahun 2016, yaitu sebesar 440.423 Kwh. Daya terpasang listrik sebesar 150 Kw tahun 2016, sementara tahun 2012 daya terpasang sebesar 1.150 kwh. Tahun 2013, daya terpasang listrik mencapai 1.287 Kw, tertinggi sepanjang lima tahun terakhir (2012-2016).

Tabel 2.78
Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten nagan Raya, Tahun 2012-2016

Tahun	Daya Terpasang (Kw)	Produksi Listrik (Kwh)	Listrik Terjual (Kwh)
2012	1.150,00	400.627,00	64.535.156,00
2013	1.287,00	576.216,00	68.960.058,00
2014	1.020,00	664.703,00	66.670.101,00
2015	368,00	440.423,00	58.471.798,00
2016	150,00	560.160,00	67.198.972,00

Sumber : PT. PLN Kab. Nagan Raya 2017

Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.1.4.3.1.5 Perdagangan

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat

perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2012-2016. Tahun 2016 kategori ini memiliki peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya setelah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi yang semakin besar dari tahun ke tahun ini didukung oleh tingkat daya beli masyarakat yang meningkat. Kontribusi atau peranan kategori ini pada tahun 2016 mencapai 11,69 persen yang meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 10,50 persen

Gambar 2.27

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2012-2016



Sumber : BPS Nagan Raya, 2017

2.1.4.3.1.6 Perindustrian

Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Dilihat dari segi kontribusi atau peranannya terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya, sektor ini memiliki kontribusi di atas dua persen dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Kontribusi ini relatif masih kecil dalam

membentuk perekonomian yang kuat di kabupaten Nagan Raya. Walaupun begitu, kontribusinya memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 2,36 persen dan naik menjadi 3,53 persen pada tahun 2016. Kenaikan kontribusi tersebut seiring dengan naiknya kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini karena sektor ini didominasi peranannya oleh jenis industri makanan dan minuman yang mengolah hasil-hasil dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seperti industri pengolahan padi, industri CPO (Crude Palm Oil) dan industri lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

Gambar 2.28

Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan (persen), 2012-2016



Sumber : BPS Nagan Raya, 2017

2.1.4.3.1.7 Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 16 lokasi transmigrasi dari tahun 2012-2016. Tahun 2012, penempatan jumlah KK pada 16 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 2.596 KK. Pada tahun 2016, jumlah KK bertambah menjadi sebanyak 3.045 KK, atau bertambah sebanyak 17,30 persen dari tahun 2012. Jumlah KK terbanyak pada tahun 2016 di lokasi transmigrasi UPT.V. Lamie Gampong Krueng Itam, yaitu sebanyak 425 KK. UPT.Despot Alue

Siron Gampong Alue Siron terdapat sebanyak 173 KK pada tahun 2016. Jumlah KK tersebut tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang juga berjumlah 173 KK. Adapun penempatan KK yang relatif sedikit terdapat di lokasi transmigrasi UPTIII Seneuam Gampong Sumber Makmur. Di lokasi tersebut hanya terdapat 87 KK tahun 2012-2016. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016

No	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016
1	UPT.I. Krueng Tadu Gampong Simpang Jaya	150	150	150	133	133
2	UPT.II. Krueng Tadu Gampong Batu Raya	171	171	171	159	159
3	UPT.III. Krueng Tadu Gampong Sember Daya	211	211	211	210	210
4	UPT.IV. Krueng Tadu Gampong Bumi Sari	126	126	126	147	147
5	UPT.V. Lamie Gampong Krueng Itam	340	340	340	425	425
6	UPT.VI. Lamie Gampong Rantau Selamat	310	310	310	315	315
7	UPT.VII. Lamie Gampong Lamie Gagak	96	96	96	96	96
8	UPT.I. Seneuam Gampong Blang Luah	361	361	361	361	405
9	UPT.II. Seneuam Gampong Makarti Jaya	158	158	158	158	158

10	UPT.III. Seneuam Gampong Sumber Makmur	87	87	87	87	87
11	UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti	313	313	313	313	364
12	UPT.Despot Alue Siron Gampong Alue Siron	173	173	173	173	173
13	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	100	100	100	100	100
14	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	0	0	80	100	100
15	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	0	0	30	33	53
16	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	0	0	30	80	120
Jumlah		**2,596**	**2,596**	**2,736**	**2,890**	**3,045**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Adapun jumlah Transmigrasi lokal kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2012-2016 ada empat lokasi yang telah menempatkan sebanyak 100 kk pada tahun 2012 kemudian bertambah 373 kk pada tahun 2016.

Tabel 2.80

Jumlah Transmigrasi Lokal Tahun 2012-2016

NO	NAMA TRANSMIGRASI LOKAL	2012	2013	2014	2015	2016
1	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	100	100	100	100	100
2	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	0	0	80	100	100

3	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	0	0	30	33	53
4	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	0	0	30	80	120
Jumlah		100	100	240	313	373

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Sedangkan untuk Transmigrasi Swakarsa yang terhitung sejak tahun 2012-2016 Kabupaten Nagan Raya telah menempatkan sebanyak 1037 jiwa transmigran, yang tersebar disembilan kecamatan. Dengan penempatan terbanyak berada di Seunagan Timur, Seunagan dan Tadu Raya, yakni masing-masing sebesar 310 jiwa di kecamatan Seunagan Timur dan 301 jiwa di kecamatan Seunagan kemudian 204 jiwa di kecamatan Tadu Raya.

Untuk lebih jelas lokasi dan jumlah Transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81

Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Tansmigrasi Swakarsa

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016

No	Kecamatan	Transmigrasi Swakarsa (Jiwa)
1	Seunagan	301
2	Seunagan Timur	310
3	Beutong	44
4	Beutong Banggala	0
5	Suka Makmue	71
6	Kuala	63
7	Kuala Pesisir	8
8	Tadu Raya	204

9	Darul Makmur	28
10	Tripa Makmur	8
Jumlah		**1037**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2017

2.1.4.3.1.8 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya yang tergarap saat ini masih relatif menggembirakan. Implikasinya, produksi perikanan laut berfluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2012, produksi perikanan laut mencapai 1.017 ton. Jumlah produksi perikanan laut tersebut terus menurun signifikan menjadi 107 ton tahun 2014, atau turun rata-rata -36,26 persen/tahun. Memasuki akhir tahun 2015, tercatat produksi perikanan laut Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1.039 ton, atau senilai Rp.19,91 milyar. Produksi perikanan laut tersebut tertinggi selama tujuh tahun terakhir.

Gambar 2.29
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016

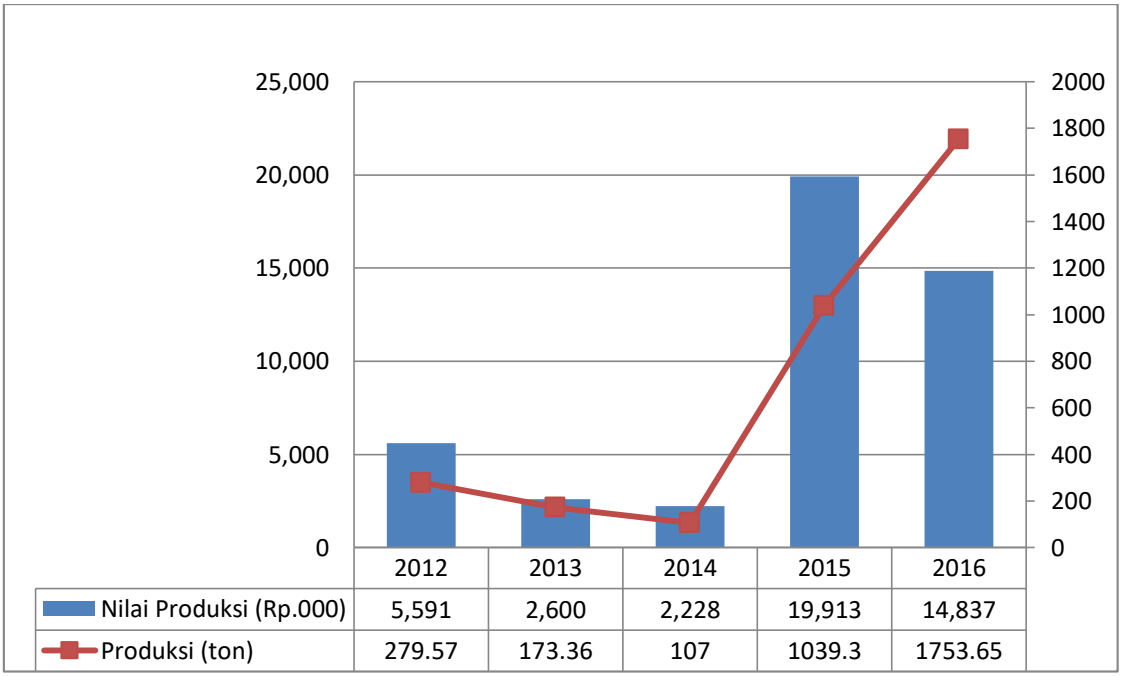

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya
BPS Aceh, 2017

Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap tahun 2012-2016 selalu meningkat pada tahun 2012 sebesar 854 ton menjadi 1.863,05 ton pada tahun 2016.

Untuk produksi perikanan budidaya tahun 2012-2016 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 1.199 ton menjadi 669,72 ton pada tahun 2016. Hal ini menimbulkan tercapainya target daerah produksi ikan pada tahun 2012 sebesar 93,3% menjadi 97,4% pada tahun 2016.

Tabel 2.82

Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Produksi ikan (ton)	2.053,5	2.176,72	2.310,38	2.424,15	2.532,77
2	Budidaya	1.199,5	1.233,32	1.240,13	1.328,65	669,72
3	Perikanan tangkap	854	953,4	1.070,25	1.095,5	1.863,05
4	Target Daerah (ton)	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600
5	Capaian Produksi Ikan (%)	93,3	94,64	88,86	93,23	97,4

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparatur dinas. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/

cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (*trip*) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk.

Tabel 2.83
Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016

No	Jenis	Jumlah
1	Panjang garis pantai	74,4 Km
2	Luas laut	446,4 km^2
3	Luas perairan umum	814 km^2
4	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)	1 unit
5	Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI)	3 unit
6	Jumlah kapal motor	113 unit
7	Jumlah perahu motor	115 unit
8	Jumlah nelayan tetap	594 orang
9	Jumlah nelayan tidak tetap	458 orang
10	Jumlah pemasar ikan	200 orang
11	Jumlah kelompok pengolahan ikan	13 orang
12	Jumlah kelompok masyarakat pengawas	5 kelompok
13	Jumlah unit pengolahan	10 unit
14	Jumlah produksi ikan olahan	311` ton
15	Jumlah pabrik es	tidak ada
16	Jumlah pasar ikan / depo	7 unit

Pembudidayaan perikanan darat dilakukan di kolam, mina padi, keramba/ karamba jaring apung (KJA) dan tambak (air payau). Pada tahun 2012 tercatat lahan perikanan darat seluas 1.198,87m^2 kemudian pada tahun 2016

menurun seluas 609,82 m^2 dengan rincian luas budidaya di kolam pada tahun 2012 luasnya 1.112,07 m2, semetara pada tahun 2016 luas kolam berkurang menjadi 492,92 m2 pada tahun 2012 luas budidaya tambak 79,50 m2 kemudian pada tahun 2016 meningkat 169,4 m^2 kemudian Sedangkan mina padi pada tahun 2016 luasnya 7,5 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2012.

Jumlah rumah tangga perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2016, mencapai 851 rumah tangga. Peningkatan masyarakat dalam berusaha di bidang budidaya perikanan cukup tinggi. Tercatat dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah rumah tangga perikanan budidaya meningkat 15,46% per tahun. Wilayah-wilayah dengan jumlah rumah tangga perikanan besar di Kecamatan seunagan Timur, Beutong dan Darul Makmur.

Tabel 2.84
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Darul Makmur	107	110	115	119	121
2	Tripa Makmur	31	31	31	35	35
3	Kuala	35	57	58	65	65
4	Kuala Pesisir	37	39	41	46	46
5	Tadu Raya	44	46	49	57	58
6	Beutong	135	138	141	150	152
7	Beutong Ateuh Banggalang	32	34	37	39	39
8	Seunagan	70	71	75	80	81
9	Suka Makmue	81	81	83	89	91

10	Seunagan Timur	145	147	151	159	163
	Jumlah	**737**	**754**	**781**	**839**	**851**

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.30
Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016

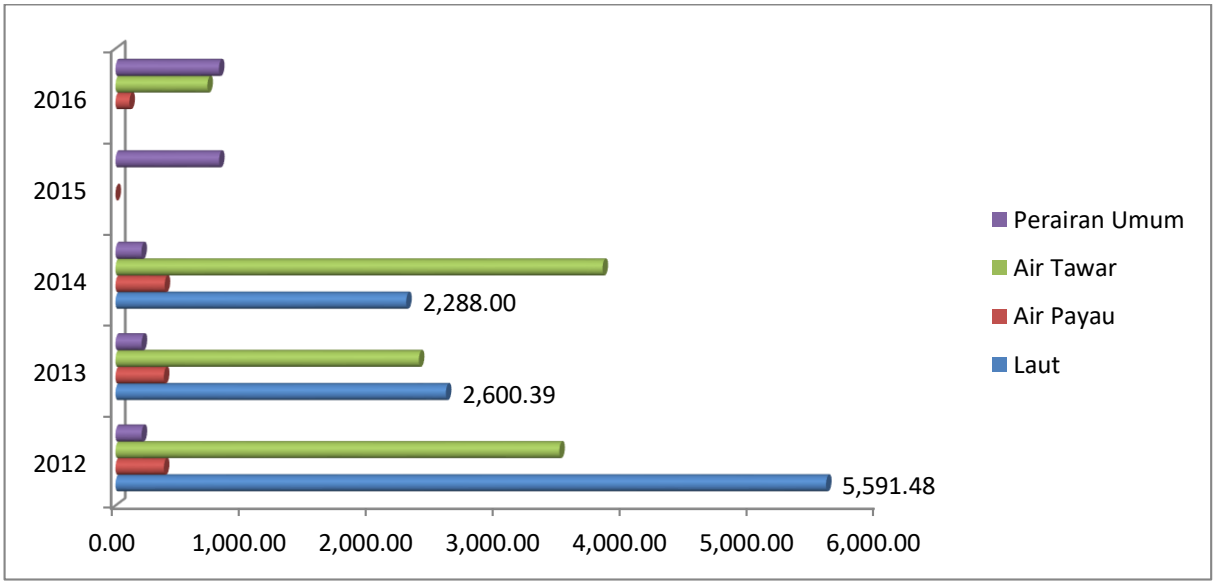

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun2017

Budidaya ikan di kolam termasuk andalan di Kabupaten Nagan Raya. Namun, produksi budidaya ikan di kolam juga masih terbatas. Jenis ikan yang dibudidayakan, meliputi ikan mas, mujair, nila, lele, dan jenis ikan lainnya. Tahun 2009, produksi ikan dari kolam mencapai 2.244,22 ton. Akhir tahun 2014, produksi ikan tersebut tidak lebih dari 477,80 ton. Secara rata-rata, produksi ikan dari kolam menurun hampir -26,61 persen/tahun. Beberapa jenis ikan dengan jumlah produksi tahun 2014 meliputi ikan mas 53,70 ton, mujair 33,80 ton, nila 40 ton, lele 29,50 ton, dan jenis ikan lainnya 20,10 ton.

Gambar 2.31
Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2009-2014 (ton)

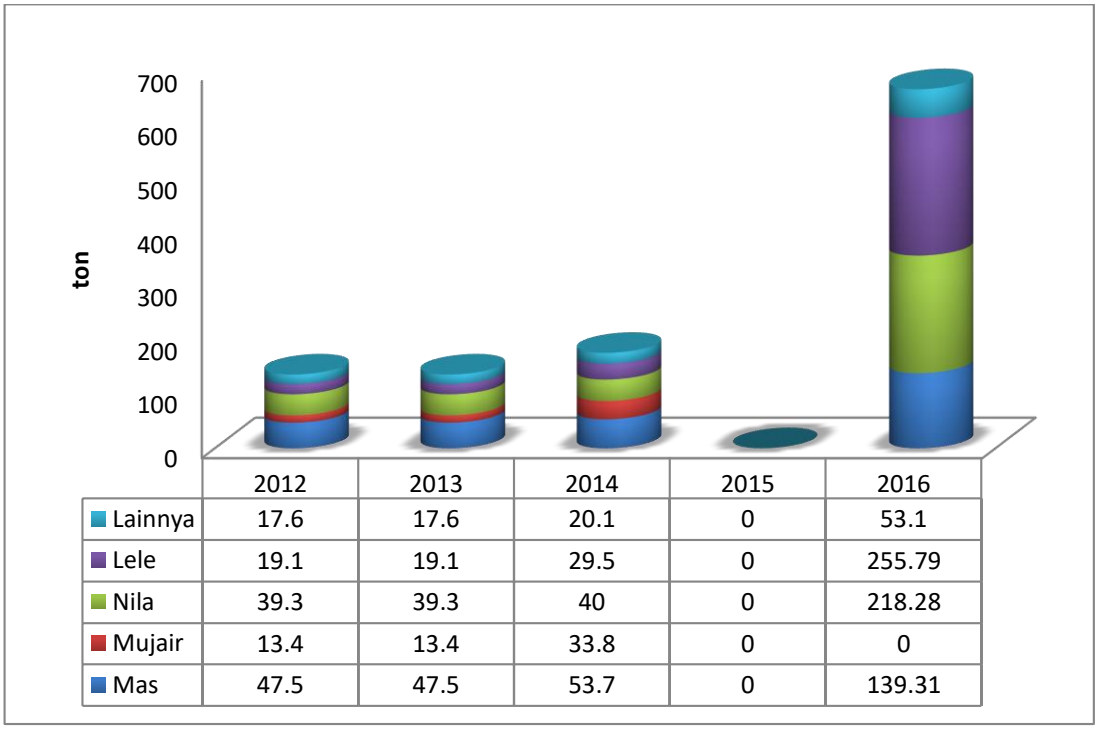

	2012	2013	2014	2015	2016
Lainnya	17.6	17.6	20.1	0	53.1
Lele	19.1	19.1	29.5	0	255.79
Nila	39.3	39.3	40	0	218.28
Mujair	13.4	13.4	33.8	0	0
Mas	47.5	47.5	53.7	0	139.31

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2016, tercatat nelayan di Kabupaten Nagan Raya mencapai 594 orang. Dibanding tahun 2012, jumlah nelayan tersebut meningkat rata-rata 89,77 persen/tahun. Tahun 2012, nelayan di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 313 orang. Selain itu, RT yang bermata

pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam juga meningkat, dari 600 RT tahun 2012 menjadi 663 RT tahun 2016. Demikian juga halnya dengan RT petani ikan perairan umum, meningkat menjadi 732 RT tahun 2016, dari 83 RT tahun 2012.

Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Selain itu, pelatihan teknis budidaya, pengolahan pasca panen, dan penyediaan fasilitas perikanan diupayakan terus meningkat sehingga berperan signifikan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat nelayan.

Tabel 2.85

Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2016

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Nelayan Tetap	Orang	313	537	1.052	1.032	594
Nelayan Tidak Tetap	Orang	235	-	-	110	458
Jumlah Petambak	RT	78	-	-	69	181
Jumlah Petani Ikan Kolam	RT	600	-	-	592	663
Jumlah Petani Ikan Perairan Umum	RT	83	-	294	294	732
Kelompok Nelayan	Kelompok	28	-	-	37	49
Jumlah Nelayan yang dibina	Orang	78	-	-	7	7
Jumlah Petambak yang dibina	Orang	280	-	-	287	98
Jumlah petani ikan yang dibina	Orang	761	-	-	762	761
Jumlah kelompok Budidaya Ikan	Kelompok	51	-	-	98	367
Jumlah kelompok pengolahan Ikan	Kelompok	12	-	-	12	13
Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina	Kelompok	12	-	-	12	12

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya

BPS Kab. Nagan Raya, 2017

Jumlah prasarana yang tersedia di sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim bila dibandingkan dengan potensi perikanan Kabupaten Nagan Raya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nagan Raya ini belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kedepan, perlu pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan perikanan, pengembangan balai benih ikan, pengembangan sarana tangkap serta motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan.

Tabel 2.86
Kondisi PPI, TPI, dan Pasar
Kabupaten Nagan Raya, 2016

Kecamatan	Nama PPI	Nama TPI	Nama Pasar	Lokasi
Darul Makmur	PPI Kuala Seumayam	-	Pasar Alue Bilie Pasar Pukan	Desa Alue Bilie Desa Lamie
Tripa Makmur	-	TPI Babah Lueng		
Kuala	-	-	Pasar Simpang Peut	Desa Simpang Peut
Kuala Pesisir	-	TPI Kuala Tuha	Pasar Langkak Pasar Jembes	Desa Padang Rubek
Tadu Raya	-	TPI Kuala Tadu	Pasar Alue Bata	Desa Alue Bata
Beutong	-	-	Pasar Beutong	Ulee Jalan
Beutong Ateuh Banggalang	-	-	Pasar Jeuram	Cot Meugat
Seunagan	-	-	-	-
Suka Makmue	-	-	-	-
Seunagan Timur	-	-	Pasar Uteun Pulo	Desa Uteun Pulo

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2017

Jumlah pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah telah diberikan pada tahun 2012-2016 dengan capaian yang selalu meningkat.

Tabel 2.87

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan	40	43	52	46	22
2	Jumlah kelompok nelayan	42	45	55	47	25
3	Cakupan pembinaan kelompok nelayan (%)	95,2	95,5	94,54	97,8	88

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2012-2016 masih didominasi dari hasil kelompok nelayan. Hal ini menunjukkan efektivitas kelompok nelayan dalam produksi ikan tangkap, karena adanya pengembangan kapasitas dan bantuan permodalan bagi kelompok nelayan.

Tabel 2.88

Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah produksi ikan (ton) hasil kelompok	487,07	599,94	793,53	718,53	584,41

	nelayan					
2	Jumlah produksi ikan (ton)	854	953,4	1.070,25	1.095,5	1.863,05
3	Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan (%)	57,03	62,92	74,14	65,59	31,36

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2017

2.1.5.3.1 Penunjang Urusan

2.1.5.3.1.1 Perencanaan Pembangunan

Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan tugas umum ketatausahaan badan, melakukan koordinasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian, infrastruktur, pemerintahan, sumber daya manusia, keistimewaan, sosial budaya dan penelitian, evaluasi pengembangan pembangunan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dari tugas pokok dan fungsi yaitu: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana

Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Capaian indikator perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya masih dalam tahapan penyempurnaan penyelesaiaan dokumen. Seperti halnya dokumen RPJPD yang belum ditetapkan dengan Qanun dan dokumen RTRW dalam proses penyesuaian dikarenakan baru disosialisasikan setahun belakangan ini, sedangkan untuk dokumen tahunan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.5.3.1.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2012-2017 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008-2016, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan kententuan yang berlaku.

2.1.5.3.1.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan *e-government* (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan *simpeg* (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.3.1.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.1.5.3.1.5 Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan.

2.1.5.3.1.6 Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya; Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program

Kerja DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya maupun RKPK Nagan Raya; dan Terintegrasi Program-Program DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRK Nagan Raya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

2.1.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dapat dilihat melalui perkembangan pendapatan. Pendapatan masyarakat dapat didekati dengan pengeluaran masyarakat. Pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran perkapita per bulan masyarakat Kabupaten Nagan Raya adalah Rp.450.674.

2.1.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Selama lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk makanan cenderung mengalami penurunan, meskipun proporsinya masih diatas 50 persen. Tahun 2012, persentase pengeluaran makanan mencapai 68,63 persen.

Adapun pengeluaran non-makanan perkapita sebulan adalah 300,889 persen pada tahun 2016. Angka pengeluaran tersebut meningkat drastis dari tahun 2012 yang sebesar 31,37 persen. Pola pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang cenderung mengalami peningkatan untuk non-makanan dipandang sangat positif dalam jangka menengah ke depan. Hal

tersebut menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya mengalami perubahan kearah yang lebih baik dan diharapkan ke depan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera.

Gambar 2.32
Komposisi Konsumsi Makanan, Non Makanan,
dan Pengeluaran Per kapita per bulan Tahun 2012-2016

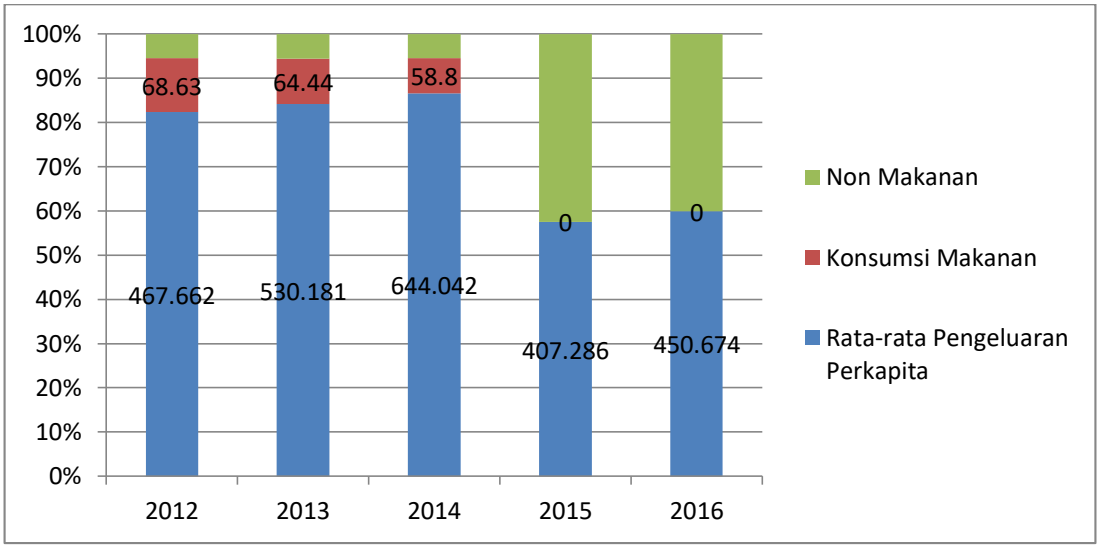

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2017

2.1.4.4 Fokus Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability)* fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antardaerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi.

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini dapat disinggahi pesawat sejenis

Fokker, dan diupayakan dalam jangka panjang mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Gambar 2.33
Bongkar dan Muat barang
di Bandara Cut Nyak Dhien, 2012-2016

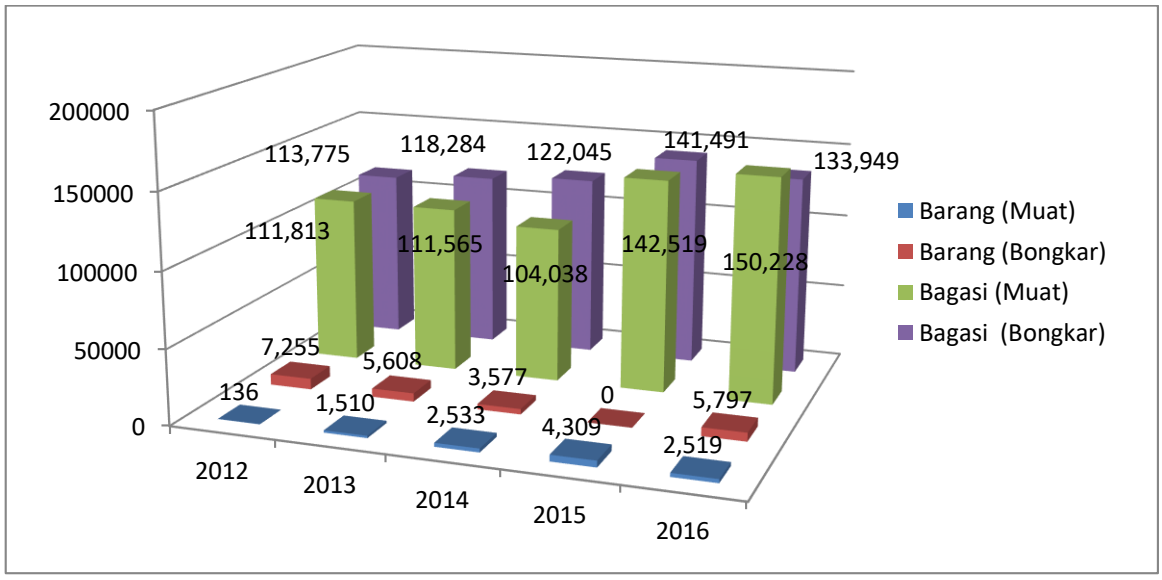

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka 2017

Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung berfluktuatif. Tercatat muat di bagasi paling kurang 150.228 kg dan bongkar 133.949 pada tahun 2016. Terbanyak muat bagasi icapai bulan Juli (14.557 kg) dan bulan April (12.484 kg). Sedangkan terendah terjadi di bulan Desember (10.027 kg). Tahun 2012, barang yang di bongkar mencapai 7.255 kg. Sementara itu, barang yang di muat menurun mencapai 2.519 kg (tahun 2016), turun di banding tahun 2012. Paling banyak muatannya di bulan Maret dan April, masing-masing 763 kg dan 592 kg. Di bulan lainnya barang yang di muat masih di bawah dari bulan tersebut, atau sangat rendah terjadi di bulan Juli (3 kg).

Data dari Bandar Udara Cut Nyak Dhien, tercatat frekuensi penerbangan yang datang di Bandar udara tersebut mencapai 16.972 trip dan berangkat 14.592 trip tahun 2012. Angka trip penerbangan tersebut meningkat pada tahun 2016. Aktivitas jasa penerbangan pada tahun 2016 tercatat frekuensi penerbangan yang datang mencapai 22.785 trip dan yang berangkat 23.784 trip.

Gambar 2.33

Jumlah Penumpang Melalui Bandara, Tahun 2012-2016

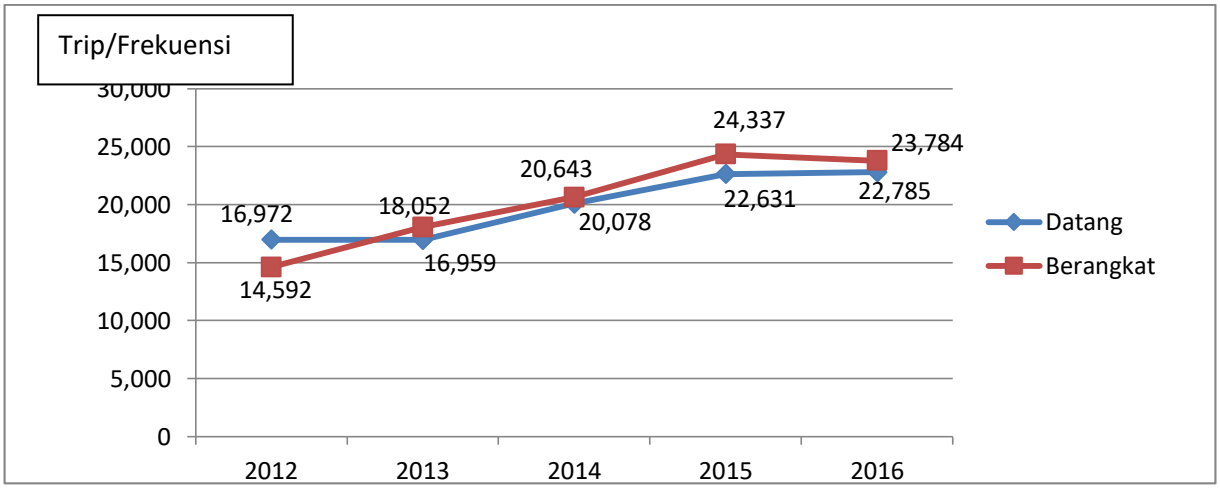

Sumber : Nagan Raya Dalam Angka Kab. Nagan Raya 2017

2.1.4.5 Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.86

Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Total Tindak Pidana (CT)	160	212	213	352	347
2	Tindak Pidana Yang Tertangani (CC)	76	206	142	254	225
Tindak Pidana Yang Tertangani (%)		**47.50**	**97.16**	**66.66**	**72.15**	**64.84**

Tabel 2.87

Rincian Data Tindak Pidana Umum

Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Jenis Tindak Pidana	2012		2013		2014		2015		2016	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	THDP Tindakan Umum										
2	Pembakaran					9		9	3	5	0
3	Kebakaran	4	1	9	5						
4	Memberi Suap										
5	Pemalsuan Uang										
6	Pemalsuan Materai/Merk										
7	Pemalsuan Dokumen					4	3				
8	Pemalsuan Surat	3	1	5	3			4	4	2	
9	Melanggar Kesopanan										
10	Pemerkosaan	5	5	5	5	3	3	8	5	6	3
11	Perzinahan	3	3							1	0

12	Perjudian/Maisir	1	1							4	4
13	Penculikan										
14	Penghinaan							2	1	1	1
15	Pembunuhan			2	1						
16	Pembakaran dan pembunuhan									1	0
17	Aniaya Ringan	40	38	31	40	37	34	66	61	66	55
18	Aniaya Berat										
19	Penganiayaan anak dibawah umur									2	2
20	Pelecehan seksual terhadap anak									1	0
21	Pencurian Biasa	37	27	49	47	59	53	69	63	83	67
22	Pencurian Pemberatan										
23	Pencurian Ringan										
24	Pencurian Dengan Kekerasan									4	2
25	perbuatan curang							1	0		
26	Pemerasan dan pengancaman	2	2	6	5			2	2	4	2
27	Penggelapan	3	2	9	7	7	5	10	7	3	
28	Penipuan (Curang)	7	4	12	8	14	4	20	17	23	13
29	Pengrusakan	13	11	28	26	13	16	15	9	20	15

30	Memberi Suap										
31	Penadah			3	2					1	1
32	Pelanggaran Khup										
33	Agraria/Tanah										
34	Penyelundupan										
35	Korupsi					1	1	2	2	1	1
36	Laka Kerja	1	1							1	0
37	Obat Keras										
38	Kesehatan	1	1								
39	Mengakibatkan Orang Mati										
40	Mengakibatkan Orang Luka										
41	Hak Cipta										
42	Curi Dalam Keluarga										
43	Menerima Suap										
44	Senpi Handak										
45	Perampasan Hak	1	1			3		3	3	11	7
46	Curi Ranmor	18	3			16	4	39	6	30	7
47	Pengroyokan	1	1							1	1

48	Pengancaman	3	3			3	3	16	11	17	12
49	Pembuatan Cabul	2	2			6	6	10	7		
50	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	1			6	2	2	1	5	2
51	Melarikan Wanita										
51	Curi Kawat										
53	Curi Listrik										
54	Curi Hewan										
55	KDRT	5	5			5	5	17	16	14	10
56	Pemilu										
57	BBM	2	1								
58	Pencemaran Nama Baik	1	1			3	2	15	64	2	2
59	Khalwat/Mesum					1	1	2	2	6	4
60	Poligami/poliandri	2	2			1	1	10	7	4	2
61	Penyerobotan Tanah	2	0			12	3	25	12	8	1
62	Kekerasan Didepan Umum	1	0								
63	Kekerasan terhadap orang dan barang					1	1				
64	kekerasan terhadap anak							1	1	2	2

65	Kekerasan seksual					1	1				
66	Pemukulan					1	1	1	1		
67	Penelantaran anak					2	2	1	1	5	4
68	Penutupan akses jalan PT.SENAGAN ENERGI					3	1				
69	Penutupan akses jalan PT							1	1		
70											
71	Pencemaran lungkungan hidup							1	1		
72	kelalaian petugas medis yang menyebabkan MD							1	1		
73	Penemuan mayat							4	2	1	
74	Mitan oplosan										
75	Penutupan akses jalan									1	
76	membawa lari anak dibawah umur					2	2	3	2	1	0
77	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang	1	0								
78	Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang									1	0
79	Penyalahgunaan bbm bersubsidi									3	3

	(migas)										
80	penjarahan dan perampasan									1	0
81	Kelalaian									1	0
82	pengancaman dan perampasan alat kerja									1	0
83	menyembunyikan TSK									1	0
84	Menyediakan tempat fasilitas maisir (perjudian)									1	1
85	illegal loging									1	1
86	Lain-Lain Kejahatan Tidak Termasuk Diatas										
Jumlah		**160**	**76**	**212**	**206**	**213**	**142**	**352**	**254**	**347**	**225**
Persentase Kasus Yang Ditangani		**47,5 %**		**77%**		**66%**		**72,15%**		**64%**	

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Jumlah demontrasi yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012-2016 relatif sedikit. Hal ini menunjukkan tersalurkannya aspirasi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Tabel 2.88
Jumlah Demonstrasi
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah Demonstrasi	Keterangan
1	2012	Nihil	-
2	2013	Nihil	-
3	2014	4	Aksi Damai
4	2015	5	Aksi Damai
5	2016	2	Aksi Damai

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain: a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); c) IUI (Izin Usaha Industri); d) TDI (Tanda Daftar Industri); e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan e) HO (Izin Gangguan).

Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagan Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 065/252/2015 tanggal 1 Nopember 2015.

Tabel 2.89

Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen),

dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya

No.	Jenis Perizinan	Jenis Data	Keterangan
1	SIUP	Waktu proses pelayanan	7
		Jumlah persyaratan	1
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	TDP	Waktu proses pelayanan	2
		Jumlah persyaratan	4
		Biaya mengurus	Tidak dipungut biaya
3.	IUI	Waktu proses pelayanan	3
		Jumlah persyaratan	9
		Biaya mengurus	Tidak dipungut biaya
4.	TDI	Waktu proses pelayanan	12

		Jumlah persyaratan	6
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
5.	IMB	Waktu proses pelayanan	14
		Jumlah persyaratan	14
		Biaya mengurus persyaratan	225.000xkoefesien(sesuai Qanun)
6.	HO	Waktu proses pelayanan	7
		Jumlah persyaratan	7
		Biaya mengurus	Tidak dipungut biaya

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Pajak daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi pajak hotel , pajak restoran (Rumah Makan dan Katering); pajak hiburan (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari, Pameran, Balap Kendaraan Bermotor); pajak reklame (reklame papan, kain, melekat/stiker, baliho dan billboard); pajak penerangan jalan PLN; pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum dan jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum terdiri dari:

a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
d. Retribusi Pelayanan Pasar;
e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
c. Retribusi penyediaan dan / atau peneyedotan Kakus;
d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
e. Retribusi Tempat Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Kebangsaan (Pas Kecil).

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha adalah :

1) Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
2) Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan peternakan;
3) Qanun Nomor 17 Tahun 2007 Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagan Raya antara lain adalah: 1) belum optimalnya promosi investasi; 2) lemahnya dukungan regulasi investasi dan 3) belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor. 4) Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan.

karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal: 1) peningkatan promosi investasi; 2) menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

2.1.4.6 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi (S1, S2, S3))

Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan 0,00 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S3.

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Nagan Raya yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung paling kurang 56 orang yang tidak produktif. Kondisi ini mengalami perubahan yang sangat drastis dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, rata-rata dari

100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 penduduk tidak produktif. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) dan naiknya proporsi penduduk produktif, meskipun penduduk tua sedikit meningkat pada tahun 2016.

Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) semakin berkurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen.

Tabel 2.90
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%)

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Angka Ketergantungan
2012	30,10	63,62	6,28	57,19
2013	30,00	65,72	4,29	52,17
2014	29,95	65,61	4,44	52,42
2015	29,08	64,27	6,65	55,60
2016	29,31	66,24	4,42	50,96

Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2017

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riel saat perencanaan

sedang dibuat. Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah.

Potensi Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengindentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasialan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manejemen pemerintahan dalam memperdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya,indentifikasi permasalahan pembangunan dilakuan trehadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahaan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun kedepan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai diperiode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapaten Nagan Raya.

Tabel 2.89

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapaten Nagan Raya Tahun 2010 - 2016

NO	ASPEK/FUCUS/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN							SAT
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1	**Indek Pembangunan Manusia**								
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,18	69,68	70,64	65,23	65,58	-	-	%
1.2	Indek angka Harapan Hidup	69,64	69,7	69,76	68,28	68,29	-	-	%
1.3	Rata-rata lama Sekolah	7,57	7,75	8,11	8,40	7,93	-	-	%
1.4	Pengeluaran Per kapita	604,08	608,3	611,3	530,181	644,042	-	-	%
2	**Angka Kemiskinan**								
2.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,43	-	-	-	-	-	-	%
2.2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,15	-	-	-	-	-	-	%
B	**Aspek Pelayanan Umum**								
1	**Layanan Urusan Wajib**								
1,1	**Pendidikan**								

1.1.1	Angka Melek Huruf (%)	-	93,77	-	-	97,20	-	-	%
1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (%)	7,57	7,75	-	-	-	-	-	%
1.1.3	APK SD/MI/Paket A	104,73	101,6	105,6	-	105,6	-	-	%
1.1.4	APK SMP/Mts/Paket B	96,49	99,17	96,94	-	-	-	-	%
1.1.5	APK SMA/SMK/MA/Paket C	85,29	85,59	86,16	-	-	-	-	%
1.1.6	APM SD/MI/Paket A	91,5	87,68	88,28	103,27	80,61	-	-	%
1.1.7	APM SMP/Mts/Paket B	88,51	72,58	69,59	99,96	78,21	-	-	%
1.1.8	APM SMA/SMK/MA/Paket C	68,25	60,67	61,27	93,27	63,35	-	-	%
1.1.9	Pendidikan yang Ditamatkan :								
	Belum/Tdk Tamat SD	-	22,81	-	-	-	-	-	%
	SD	-	30,75	-	-	-	-	-	%
	SMP	-	22,95	-	-	-	-	-	%
	SMA	-	17,53	-	-	-	-	-	%
	D1/D2/D3	-	3,15	-	-	-	-	-	%
	D4/S1	-	2,8	-	-	-	-	-	%
	S2/S3	-	-	-	-	-	-	-	
	SLTP+	-	46,43	-	-	-	-	-	%
1.1.10	Perkembangan Sekolah								
	Pendidikan Umum :								
	TK	29	33	36	36	-	-	-	Sklh
	Sekolah Dasar (SD)	132	132	135	135	135	135	-	Sklh
	SMP	30	33	36	36	37	36	-	Sklh
	SMA	14	18	18	18	18	19	-	Sklh
	SMK	3	3	3	3	3	-	-	Sklh
	Pendidikan Agama :								

	RA	6	6	6	18	-	-	-	Sklh
	MI	19	19	19	19	19	19	-	Sklh
	MTS	8	9	9	9	10	10	-	Sklh
	MA	3	3	3	3	3	3	-	Sklh
1.1.11	Perkembangan Ruang Kelas								
	Pendidikan Umum :								
	TK								
	SD	788	821	952	939	854	-	-	ruang
	SMP	275	312	285	285	253	-	-	ruang
	SMA	165	172	187	187	188	-	-	ruang
	SMK	22	22	32	32	28	-	-	ruang
	Pendidikan Agama :								
	RA	9	9	12	12	-	-	-	ruang
	MI	137	137	144	144	145	-	-	ruang
	MTS	38	38	58	58	53	-	-	ruang
	MA	14	14	14	14	19	-	-	ruang
1.1.12	Perkembangan Peserta Didik								
	Pendidikan Umum :								
	TK	1.795	1.811	1.820	-	-	-	-	siswa
	SD	15.626	15.643	15.710	-	-	-	-	siswa
	SMP	6.562	6.721	6.997	-	-	-	-	siswa
	SMA	4.721	4.878	5.274	-	-	-	-	siswa
	SMK	607	596	538	-	-	-	-	siswa
	Pendidikan Agama :								
	RA	180	187	76	-	-	-	-	siswa

	MI	2.578	2.571	2.568	-	-	-	-	siswa
	MTS	1.172	1.097	1.039	-	-	-	-	siswa
	MA	649	567	493	-	-	-	-	siswa
1.1.13	Perkembangan Tenaga Pendidik (Guru)								
	Pendidikan Umum :								
	SD	1.667	1.852	1.870	1.653	1.883	-	-	Orang
	SMP	577	643	725	717	774	-	-	Orang
	SMA	359	446	455	420	433	-	-	Orang
	SMK	50	56	76	79	78	-	-	Orang
	Pendidikan Agama :								
	RA	189	175	175	189	197	-	-	Orang
	MTS	59	61	61	59	71	-	-	Orang
	MA	37	34	34	32	52	-	-	Orang
1.1.14	Perkembangan Rasio Tenaga pendidik dengan Murid								
	Pendidikan Umum :								
	SD	9	8	8	8	8	-	-	Orang
	SMP	11	10	10	10	9	-	-	Orang
	SMA	13	11	12	12	11	-	-	Orang
	SMK	12	11	7	7	7	-	-	Orang
	Pendidikan Agama :								
	RA								
	MI	14	14	15	15	15	-	-	Orang
	MTS	22	20	18	17	14	-	-	Orang
	MA	13	18	17	15	16	-	-	Orang

2.1.15	Perkembangan Rasio Murid dengan Ruang Kelas								
	Pendidikan Umum :								
	SD	20	19	17	19	18			orang
	SMP	24	22	25	29	28			orang
	SMA	29	28	28	41	25			orang
	SMK	28	27	17	22	20			orang
	Pendidikan Agama :								
	RA	0	0	0	17	17			orang
	MI	19	19	18	20	21			orang
	MTS	31	29	18	24	31			orang
	MA	46	41	35	27	30			orang
1,2	**Kesehatan**								
1.2.1	Angka Kematian Bayi/1000 KH (orang)	18	40	13	13	6	15	-	orang
1.2.2	Angka Umur Harapan Hidup (%)	69,54	69,7	69,7	69,7	-	-	-	%
1.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,07	0,09	0,02	0,02	-	-	-	%
1.2.4	Angka Kesakitan Kasar (%)	32,96	30,65					-	%
1.2.5	Jumlah Balita Gizi Buruk	7	18	32	17	11	12	-	orang
1.2.6	Jumlah Kematian Bayi	58	17	36	31	68	46	-	orang
1.2.7	Jumlah Kelahiran Bayi	1.780	2.970	2.895	2.726	3.092	3.092	-	orang
1.2.8	Jumlah Balita	10.647	19.770	18.571	12.995	12.877	13.456	-	orang
1.2.9	Rasio Sarana,Prasarana dan tenaga Kesehatan :								
	Rasio Dokter per penduduk	3.920	3.962	2.925	2.925	5.342	1.969	-	orang
	Rasio Puskesmas per penduduk	11.157	11.278	11.474	11.474	10.685	10.882	-	orang

	Rasio Pustu per penduduk	3.296	3.332	3.390	3.390	-	-	-	orang
	Rasio Polindes per penduduk	2.737	2.766	2.814	2.814	-	-	-	orang
1.2.10	Rata-rata Lama Balita Usia 24-59 bulan mendapat ASI	20,12	18,48	-	-	20,12	18,48	-	%
1.2.11	Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas Perumahan :								
	Air minum bersih	75,35	78,91	-	-	55,31	-	-	%
	Jamban sendiri dengan tangki septik	46,15	40,81	-	-	89,19	-	-	%
1,3	**Urusan Perindustrian , Perdagangan,dan Koperasi**								
1.3.1	Jumlah Industri,UMKM,tenagan Kerja dan Omset/Bulan								
	Jumlah Industri Kecil	721	740	716	718	3.331	3.113	3.370	Unit
	Jumlah UMKM	664	675	1.044	1.044	3.518	3.113	-	Unit
	Jumlah tenaga kerja pada industri	1.823	1.841	1.841	1.844	5.691	5.402	6.819	Orang
	Jumlah tenaga kerja pada UMKM	851	865	865	868	4.518	5.561	9.784	Orang
	jumlah Omset/bulan	10	11	15	15	16	-	-	Rp (juta)
1.3.2	Capaian kinerja Koperasi :								
	Jumlah Koperasi Aktif	25,45	28,99	30,69	30,69	30,69	43,45	43,81	%
	Jumlah Koperasi tidak aktif	74,55	71,01	69,31	69,31	69,31	55,96	56,19	%
	Jumlah Koperasi Aktif yang Dibina	35,71	36,73	35,48	35,48	40,33	18,66	18,56	%
	Jumlah Pertumbuhan Koperasi	1,23	2,42	19,53	19,53	20,33	-	-	%
	JumlahPertumbuhan Anggota Koperasi	3	13,63	11,11	11,11	11,27	-	-	%
	Jumlah Pertumbuhan Omzet Koperasi	1,17	1,27	10,85	10,85	10,9	12,85	-	%

1,4	**Urusan Pemuda dan Olah Raga**								
1.4.1	Jumlah Lapangan /sarana Olahraga	30	35	40	74	8	8	-	unit
1.4.2.	jumlah Klub Olahraga	197	197	197	197	-	-	-	klub
1.4.3	Jumlah Cabang Olahraga	10	10	10	11	16	16	-	buah
1.4.4	Jumlah Kegiatan pagelan seni dan Budaya	1	2	1	1	1	1	-	buah
1.4.5	Jumlah Organisasi Kepemudaan	7	7	7	8	8	8	-	buah
1.4.6	Jumlah Pemuda	38.296	38.026	39.860	40.258	-	-	-	orang
1.4.7	Jumlah Organisasi di bidang Budaya	1	1	1	1	1	1	-	buah
1.5	**Urusan Penanaman Modal Daerah**								
1.5.1	Ketersediaan promosi potensi daerah	45	55	65	-	-	-	-	%
1.5.2	Ketersediaan data informasi sarana dan prasarana daerah	-	55	65	-	-	-	-	%
1,6	**Urusan Ketenagakerjaan**								
1.6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,38	66,1	55,34	60,26	63,74	59,51	-	%
1.6.2	tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	3,94	7,13	7,63	7,77	3,69	3,97	-	%
1.6.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,06	92,87	92,37	92,23	96,31	96,03	-	%
1,7	**Urusan Perhubungan**								
1.7.1	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum								
	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	192.000	210.000	250.230	267.746	257.340	356.640	-	Orang
	Jumlah Barang yang Terangkut angkutan Umum	164.000	176.000	197.000	210.790	259.000	300.000	-	ton

1.7.2	Panjang Jalan Jumlah Kenderaan dan Izin Trayek								
	Panjang jalan kabupaten	509,8	617,5	642,9	648,29	-	-	-	KM
	Jumlah Kenderaan Penumpang	82	88	100	140	-	-	-	Unit
	Jumlah kenderaan barang	1.800	2.100	2.800	3.500	-	-	-	Unit
	Jumlah Bus izin Trayek	40	45	55	55	-	-	-	Unit
	Izin Trayek Perkotaan	1	1	1	1	-	-	-	Unit
	Izin Trayek Pedesaan	1	1	1	1	-	-	-	Unit
1,8	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1.8.1	Jumlah Kelembagaan Masyarakat (LPM , PKK Aktif) :								
	LPM	-	-	-	-	222	222	222	Klmpk
	PKK	222	222	222	222	222	222	222	Klmpk
	Kelompok Pemuda	222	222	222	222	222	222	222	Klmpk
1.8.2	Jumlah Kelembagaan Masyarakat (LPM , PKK) yang dibina :								
	LPM	-	-	-	-	222	222	222	
	PKK	222	222	222	222	222	222	222	Klmpk
	Kelompok Pemuda	222	222	222	222	222	222	222	Klmpk
1.8.3	Jumlah Desa menurut Status Desa :								
	Desa Swadaya	222	222	222	222	222	222	222	buah
	Desa Swakarya	-	-	-	-	-	-	-	buah
	Desa Swasembada	-	-	-	-	-	-	-	buah
1,9	**Urusan Kebudayaan**								

.9.1	Kinerja Urusan Seni, Budaya								
	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	-	-	-	Unit
	Jumlah Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya	3	1	2	3	3	-	-	buah
	Jumlah Organisasi di Bidang Budaya	1	1	1	1	1	-	-	Orang
1.'10	**Urusan Kearsipan**								
1.10.1	Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan :								
	Seunagan	1		-	5	5	6	6	Unit
	Beutong		1	-	3	3	3	3	Unit
	Seunagan Timur	1		-	4	4	4	4	Unit
	Suka Makmue	1		-	5	5	5	5	Unit
	Kuala	2		-	6	6	6	6	Unit
	Kuala Pesisir	-	-	2	5	5	5	5	Unit
	Tadu Raya	1		-	4	4	4	4	Unit
	Darul makmur	1		-	4	3	4	4	Unit
	Tripa Makmur		1	1	3	4	3	3	Unit
	Beutong Ateuh Benggala		1	-	3	2	2	2	Unit
1.10.2	Jumlah Pengungjung Pustaka	55	104	115	287	365	565	356	
1.11	**Urusan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat**								
1.11.1	Jumlah Linmas dan Pos Siskamling								
	Linmas	920	920	852	1880	978	122	824	Orang
	Pos Siskamling	84	84	84	222	222	12	-	Unit
1.11.2	Jumlah LSM	28	43	50	64	5	9	2	

	LSM Aktif	28	43	50	30	5	9	2	Unit
1.11.3	Jumlah Partai Politik								
	Partai Politik Nasional	42	42	10	15	8	12	12	Buah
	Partai Politik Lokal	6	6	3	3	2	3	3	Buah
1.12	**Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**								
1.12.1	Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun keatas dan Pernah Kawin								
	menurut metode Kontrasepsi yang digunakan :								
	Suntik KB	73,15	68,95	-	41,8	62,15	72,85	723,58	%
	Pil KB	20,82	31,05	-	32,2	30,18	32,01	35,25	%
	Lainnya	6,03	-	-	26	-	-	-	%
2	**Layanan Urusan Pemerintahan Umum**								
2,1	**Urusan Dinas Syariat Islam**								
2.1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah								
	Masjid	227	227	227	237	237	237	237	Unit
	Meunasah	253	261	260	260	260	260	260	Unit
	Musalla	42	42	42	42	42	42	42	Unit
	Dayah	201	201	201	227	227	227	227	Unit
2.1.2	Pelanggaran Qanun No.14 thn 2003 Khalawat/meseum	10	12	8	14	7	6	-	Orang
2,2	**Urusan Ketahanan Pangan**								

2.2.1	Luas Tanam Padi Sawah Menurut Kecamatan :								
	Seunagan	-	1.957	700	1.969	-	2.010	5.600,30	Ha
	Beutong	-	2.736	1.969	400	-	1.671	7.079,90	Ha
	Seunagan Timur	-	2.400	400	1.027	-	2.956	8.492,20	Ha
	Suka Makmue	-	2.721	1.027	1.524	-	2.128,50	6.094,80	Ha
	Kuala	-	3.533	1.524	3.400	-	1.171,50	3.042,60	Ha
	Kuala Pesisir	-	860	3.400	1.027	-	239	682,8	Ha
	Tadu Raya	-	450	1.027	2.500	-	371,4	1.050,50	Ha
	Darul makmur	-	2.087	2.500	700	-	624	1.217,60	Ha
	Tripa Makmur	-	-	700	612	-	225	720,2	Ha
	Beutong Ateuh Benggala	-	-	612	3.029	-	395	546,2	Ha
2.2.2	Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan :								
	Seunagan	-	1.957	3.577	3.577	-	1.977	4.011	Ha
	Beutong	-	2.736	400	400	-	1.671	5.670	Ha
	Seunagan Timur	-	2.400	56.875	56.875	-	2.956	6.072	Ha
	Suka Makmue	-	2.721	3.094	3094	-	1.955	4.636	Ha
	Kuala	-	3.533	5.792	5.792	-	1.171,50	2.702	Ha
	Kuala Pesisir	-	860	1.902	1.902	-	239	537	Ha
	Tadu Raya	-	450	47.777	4.777	-	30	719	Ha
	Darul makmur	-	2.087	1.206	1.206	-	-	876	Ha
	Tripa Makmur	-	0	1.352	1.352	-	-	574	Ha
	Beutong Ateuh Benggala	-	0	5.965	5.965	-	395	380	Ha
2.2.3	Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan :								
	Seunagan	-	12.000	24.324	24.324	-	3.898	27.912,20	Ton
	Beutong	-	18.000	2200	2.200	-	9.291,20	36.261,60	Ton

	Seunagan Timur	-	16.000	38.658	38.658	-	20.147,80	42.310,50	Ton
	Suka Makmue	-	16.000	20.111	20.111	-	13.187,00	32.022,40	Ton
	Kuala	-	20.000	31.856	31.856	-	7.134,50	18,653,7	Ton
	Kuala Pesisir	-	3870	8.559	8.559	-	1.314,50	3.096,90	Ton
	Tadu Raya	-	1.800	21.497	21.497	-	201	4.454,40	Ton
	Darul Makmur	-	9.000	4.824	4.824	-	-	4.372,80	Ton
	Tripa Makmur	-	0	6.084	6.084	-	-	2.450,70	Ton
	Beutong Ateuh Benggala	-	0	40.562	40.562	-	-	3.278	Ton
2.2.4	Rata-rata Produksi Padi Sawah Intensifikasi Menurut Kecamatan :								
	Seunagan	-	6,13	6,8	6,8	-	7,02	6,7	Ton/Ha
	Beutong	-	6,58	5,6	5,5	-	5,55	6,15	Ton/Ha
	Seunagan Timur	-	6,67	-	6,8	-	6,8	6,7	Ton/Ha
	Suka Makmue	-	5,88	-	6,5	-	6,7	6,65	Ton/Ha
	Kuala	-	5,66	-	5,5	-	6,09	6,65	Ton/Ha
	Kuala Pesisir	--	4,5	-	4,5	-	5,05	5,55	Ton/Ha
	Tadu Raya	-	4	-	4,5	-	6,7	6	Ton/Ha
	Darul Makmur	-	4,31	-	4	-	-	4,8	Ton/Ha
	Tripa Makmur	-	-	-	4,5	-	-	4,15	Ton/Ha
	Beutong Ateuh Benggala	-	-	-	6,8	-	5,5	8,3	Ton/Ha
3	**Layanan Urusan Pilihan**								
3,1	**Urusan Pertanian**								
3.1.1	Luas Tanam,Luas Panen, Produksi dan Rata-rata Produksi Padi								
A.	Sawah Basah :								

	Luas Areal	-	-	32.715	33.390	-	13.898	34.527	Ha
	Luas Panen	-	-	32.706	33.390	-	12.631	26.177	Ha
	Jumlah Produksi	-	-	183.204	1.836.545	-	165.665	170.151	Ton
	Rata- rata Produksi	-	-	6	5,5	-	6,7	6,5	Ton/Ha
B	Sawah Non Basah :								
	Luas Areal	-	-	2.412	3.516	-	-	738	Ha
	Luas Panen	-	-	2.405	3.516	-	-	401	Ha
	Jumlah Produksi	-	-	7.236	10.548	-	-	1.404	Ton
	Rata- rata Produksi	-	-	-	4,5	-	-	3,5	Ton/Ha
3.1.2	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan rata-rata Produksi Komoditas								
	Hortikultura :								
	Luas Areal	-	-	2.726	178.408	-	742,05	162.215	Ha
	Jumlah Produksi	-	-	71.749	1.529,60	-	8.026,27	11.119,70	Ton
	Rata- rata Produksi	-	-	26	28,3	-	-	17,56	Ton/pohon
3.1.3	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan rata-rata Produksi Komoditas								
	Palawija :								
	Luas Areal	-	-	7.738	4.805	-	587	1.598	Ha
	Jumlah Produksi	-	-	11.106	2.244	-	2.148,39	8.966	Ton
	Rata- rata Produksi	-	-	1,44	7,5	-	292	5,72	Ton/Ha
3,2	**Urusan Kehutanan dan Perkebunan**								
3.2.1	Luas Tanam, dan Produksi Komoditas Perkebunan								
	Luas Tanam :								

	1. Kelapa Sawit	37.444	38.649	39.322	40.215,24	40.557	41.436,75	-	Ha
	2. Karet	10.293	10.870	11.549	12.357,53	12.698	79.040,61	-	Ha
	3. Kelapa	1.352	1.351	1.350	1.351	1.450	1.450,75	-	Ha
	4. Kopi	152	150	148	148,5	148,5	276,25	-	Ha
	5. Kakao	4.993	5.052	5.372	5.404,71	5.268	5.849,06	-	Ha
	6. Nilam	102	45	15	14,35	23	116,1	-	Ha
	7. Pinang	554	547	547	550	541	635,35	-	Ha
	8. Pala	123	122	122	121	120,75	120,75	-	Ha
	9. Sagu	113	112	112	112	92	93,25	-	Ha
	10. Kapuk /randu	21	21	21	18,25	17,5	13,1	-	Ha
	11. Kemiri	69	69	69	66	64	112,25	-	Ha
	12. Aren	18	13	12	12	12	9,5	-	Ha
	13. Kunyit	13	11	1	1	-	1	1	Ha
	Jumlah Produksi:								
	1. Kelapa Sawit	130.501	141.561	144.980	195.875,50	197.553	15.882,47	-	Ton
	2. Karet	3.304	3.322	3.431	3.355,60	3.448	5.437,50	-	Ton
	3. Kelapa	670	668	659	658	70,6	69,19	-	Ton
	4. Kopi	51	52	48	44,75	47	2,88	-	Ton
	5. Kakao	1.415	1.331	1.335	1.326,70	1.293	89,44	-	Ton
	6. Nilam	6	-	-	0,43	0,3	4,92	-	Ton
	7. Pinang	220	228	225	225	221	24,84	-	Ton
	8. Pala	35	35	33	32,96	33	2,22	-	Ton
	9. Sagu	15	18	18	18,6	15	1,73	-	Ton
	10. Kapuk /randu	6	7	6	4,93	5	0,4	-	Ton
	11. Kemiri	16	19	19	19,27	18	2,7	-	Ton

	12. Aren	7	5	5	4,7	4,7	0,43	-	Ton
	13. Kunyit	5	5	-	-	-	0,5	-	Ton
3.2.2	Rata-rata Produksi Komunitas Perkebunan Menurut Jenis :								
	1. Kelapa Sawit	3,49	3,66	3,69	815	815	635	-	Ton/ha
	2. Karet	0,32	0,31	0,3	72,5	72	77	-	Ton/ha
	3. Kelapa	0,5	0,49	0,49	71,5	66	76	-	Ton/ha
	4. Kopi	0,34	0,35	0,33	48	51	24	-	Ton/ha
	5. Kakao	0,28	0,26	0,25	513	513	37	-	Ton/ha
	6. Nilam	0,06			60	60	60	-	Ton/ha
	7. Pinang	0,41	0,4	0,42	46	46	47	-	Ton/ha
	8. Pala	0,28	0,29	0,27	45	45	38	-	Ton/ha
	9. Sagu	0,13	0,16	0,16	32	32	30	-	Ton/ha
	10. Kapuk /randu	0,28	0,33	0,3	45	46	50	-	Ton/ha
	11. Kemiri	0,23	0,28	0,28	50	49	35	-	Ton/ha
	12. Aren	0,37	0,41	0,39	52	52	62	-	Ton/ha
	13. Kunyit	0,42	0,44	-	-	-	100	-	Ton/ha
3.2.3	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Petani Perkebunan :								
	1. Suka Makmue	915	932	961	993	1.064	1.064	-	Orang
	2. Seunagan	3.270	3.313	3.405	3.487	3.514	2.741	-	Orang
	3. Seunagan Timur	2.930	2.464	2.647	2.900	2.973	3.099	-	Orang
	4. Beutong	8.182	8.174	3.592	9.035	9.125	10.346	-	Orang
	5. Beutong Banggala		481	537	519	548	557	-	Orang
	6. Kuala	3.691	3.857	3.941	3.968	4.070	4.098	-	Orang
	7. Kuala Pesisir	4.859	4.855	5.001	3.461	3.545	3.522	-	Orang

	8. Tripa Makmur		3.849	4.133	4.469	4.545	4.460	-	Orang
	9 .Tadu Raya	5.563	5.584	6.246	6.530	6.596	6.595	-	Orang
	10.Darul Makmur	18.691	15.283	15.387	15.465	15.642	15.642	-	Orang
3.2.4	Luas wilayah ber HPL/HGB :								
	Luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	176.344	224.745	201.759	202.759	-	Ha
	Luas Hutan (ha)	-	-	168.541,49	354.491	16.348	16.348	-	Ha
	Luas Hutan Lindung	-	-	14.432	129.746	129.746	129.109	-	Ha
3,3	**Parawisata**								
3.3.1	Jumlah Sarana/fasilitas Pariwisata (unit :)								
	Hotel	-	-	1	1	1	1	1	Unit
	Rumah Makan/Restorant	17	21	25	30	37	39	39	Unit
	Warung Kopi /Café	20	25	25	32	32	45	45	Unit
3.3.2	Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan :				2				
	Beutong	-	-	3	1	-	3	3	Unit
	Kuala Pesisir	-	-	2	3	-	2	2	Unit
	Tripa Makmue	-	-	1	2	-	1	1	Unit
	Tadu Raya	-	-	1	1	-	1	1	Unit
	Seunagan Timur	-	-	1	1	-	1	1	Unit
	Kuala	-	-	1	1	-	1	1	Unit
3.4	**Kelautan dan Perikanan**								
3.4.1	Produksi Budidaya Tambak, Nilai Produksi dan Luas areal								
	Jumlah Produksi Budidaya Tambak	20	57,5	79,5	99,38	108,63	-	-	Ton

	Nilai Produksi Budidaya Tambak	500.000.000	1.437.500.000	1.987.500.000	2.484.500.000	2.175.750	-	-	Rp
	Luas Areal Tambak	17,5	24,2	30	30	32,8	-	-	Ha
	Rata -rata Produksi	1,14	2,38	2,65	0,81	3,31	-	-	Ton
	Pertumbuhan Jumlah Produksi Pertahun	53,85	187,5	38,26	25	8,5	-	-	%
	Pertumbuhan Nilai Produksi Pertahun	53,85	187,5	38,26	25	8,5	-	-	%
	Pertumbuhan Luas Lahan Budidaya Perikanan Darat pertahun	6,06	38,29	23,97	-	0,2	-	-	%
3.4.2	Produksi Budidaya Kolam, Nilai Produksi dan Luas areal								
	Jumlah Produksi Budidaya Kolam	433,14	832,48	1.008,02	1.125	1.175	1.177	-	Ton
	Nilai Produksi Budidaya Kolam	10.828.500.000	20.812.000.000	25.205.000.000	28.125.000	28.125.000	29.425.000	-	Rp
	Luas Areal Kolam	379	387,2	398,5	401,5	405,5	408,5	-	Ha
3.4.3	Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Budidaya :								
	Laut	68.813,50	445,11	-	-	-	109,25	-	Ton
	Air Payau /Tambak	20	57,5	79,5	99,37	108,63	1.177	109,4	Ton
	AirTawar Kolam	433,14	832,48	1008,2	1,125	1.175	38	492,92	Ton
	Perairan Umum	8	30,99	32	34	35	.	814	Ton
3.4.4	Nilai Produksi Perikanan Menurut Jenis Budidaya:								
	Laut	2.064.390	8.902.200	-	-	-	-	-	Rp
	Air Payau /Tambak	500.000.000	1.437.500.000	1.987.500.000	2.484.315	2.715.750	2.731.250	2.188.000.000	Rp
	AirTawar Kolam	10.828.500.000	20.812.000.000	25.205.000.000	31.506.250	29.375.000	29.425.000	24.646.000.000	Rp
	Perairan Umum	200.000.000	774.750 .000	800.000.000	92.000.000	-	950.000	12.210.000	Rp
	Jumlah	5.277.025.952	7.613.775.952	11.530.564.390	23.033.152.200	125.990.625	33.106.250	39.044.000.000	

3.4.5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap :								
	Laut	99	97,72	82,06	91,94	103,525	105,75	175.365	Ton
	Air Payau	5,87	4,41	5,01	5,24	4,31	5,76	12,25	Ton
	Air Tawar	129,05	127,33	175,05	196,67	167,91	192,21	21,75	Ton
3.4.6	Nilai Produksi Perikanan Tangkap :								
	Laut	1.485.000.000	1.465.800.000	1.230.900.000	1.379.100.000	1.552.875.000	1.552.875.000	14.837.535.000	Rp
	Air Payau	117.400.000	88.200.000	100.200.000	104.800.000	86.200.000	144.000.000	183.750.000	Rp
	Air Tawar	1.935.750.000	1.909.950.000	2.625.750.000	2.950.050.000	2.518.650.000	2.883.150.000	435.000.000	Rp
	Jumlah	3.538.150.000	3.463.950.000	3.956.850.000	4.433.950.000	-	-	-	Rp
3.4.7	Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan								
	Nelayan Tetap	220	313	313	345	345	668	594	Klmpk
	Nelayan Tidak Tetap	230	235	235	257	257	110	458	Klmpk
	Jumlah Petambak	45	58	78	78	82	85	181	Klmpk
	Jumlah Petani Ikan Kolam	548	600	600	600	629	643	663	Klmpk
	Jumlah Petani Ikan Perairan Umum	70	83	83	83	91	99	732	Klmpk
	Kelompok Nelayan	28	28	28	33	33	37	49	Klmpk
	Jumlah Nelayan yang Dibina	45	58	78	128	148	148	148	Klmpk
	Jumlah Petambak Yang Dibina	280	280	280	280	285	287	98	Klmpk
	Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina	-	-	-	5	7	7	7	Klmpk
	Jumlah Petani Ikan yang Dibina	663	751	761	761	761	762	761	Klmpk
	Jumlah Kelompok Budidaya Ikan	42	50	51	51	92	98	367	Klmpk
	Jumlah Kelompok Pengolahan Ikan	10	10	12	12	12	12	13	Klmpk
	Jumlah Kelompok Pengolahan Ikan yang dibina	10	10	12	12	12	12	12	Klmpk
3.4.8	Jumlah Alat Tangkap Ikan (Unit) :								

	Purseine	-	-	-	-	1	3	3	
	Pukat Pantai	14	16	16	29	29	29	16	Unit
	Jaring Insang	280	330	358	661	775	895	206	Unit
	Jaring Udang	88	88	88	120	150	200	200	Unit
	Pancing	260	165	165	165	178	178	170	Unit
	Serok				-	-	110	110	Unit
	Bubu	205	205	250	250	280	280	300	Unit
	Seser	65	65	65	75	110	110	110	Unit
3.4.9	Jumlah Armada Penangkapan Ikan (Unit) :								
	Perahu Motor	60	60	60	83	87	87	45	Unit
	Kapal Motor	88	88	88	151	151	208	113	Unit
	Perahu tidak Bermotor	105	120	121	155	185	215	128	Unit
3.4.10	Fasilitas Pendukung Perikanan dan Kelautan (unit)								
	PPI	-	-	-	-	1	-	1	Unit
	TPI	4	4	4	4	3	3	2	Unit
	Jumlah Pasar Ikan	7	8	9	9	9	-	5	Unit
	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)	2	2	2	2	2	2	2	Unit
	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat	5	5	5	5	5	6	6	Unit
3.5	**Urusan Ketransmigrasian**								
	Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga:	150	150	150	133	133	133	-	Orang

	UPT.I. Krueng Tadu Gampong Simpang Jaya	171	171	171	159	159	159	-	Orang
	UPT.II. Krueng Tadu Gampong Batu Raya	211	211	211	210	210	210	-	Orang
	UPT.III. Krueng Tadu gampong Sember Daya	126	126	126	147	147	147	-	Orang
	UPT.IV. Krueng Tadu Gampong Bumi Sari	340	340	340	425	425	425	-	Orang
	UPT. V. Lamie Gampong Krueng Itam	310	310	310	315	315	315	-	Orang
	UPT.VI. Lamie Gampong Rantau Selamat	96	96	96	96	96	96	-	Orang
	UPT.VII. Lamie Gampong Lamie Gagak	361	361	361	361	405	405	-	Orang
	UPT.I Seneuam Gampong Blang Luah	158	158	158	158	158	158	-	Orang
	UPT.II Seneuam Gampong Makarti Jaya	87	87	87	87	87	87	-	Orang
	UPT. III. Seneuam Gampong Sumber Makmur	313	313	313	313	364	364	-	Orang
	UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti	-	83	173	173	173	173	-	Orang
	UPT. Despot Alue Siron Gampong Alue siron	-	-	-	100	100	100	-	Orang
	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	-	-	-	-	-	-	-	
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	**Kemampuan Ekonomi Daerah**								
1.1	Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian dan Non Pertanian								
	Pertanian Bahan Makanan	17,8	17,13	16,38	16,91	-	-	-	%
	Pertanian Perkebunan	26,58	26,64	26,49	25,78	-	-	-	%
	Peternakan	8,42	8,02	7,74	7,34	-	-	-	%
	Perikanan			2,48	2,4	-	-	-	%
	Non Pertanian	39,58	41,17	42,73	44,2	-	-	-	%

1.2	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional (atas dasar harga berlaku)								
	PDRB/GDRP	7,07	8,78		-	-	-	-	%
	Pendapatan Regional	7,07	8,78		-	-	-	-	%
	PDRB Per Capita	4,75	6,34		-	-	-	-	%
	Pendapatan Regional Per Capita	4,75	6,34		-	-	-	-	%
2	**Kondisi Jaringan Jalan**								
2.1	Kondisi Panjang Jaringan Jalan Menurut Status Jalan :								
	Jalan Negara	82	82	82	82	-	-	-	Km
	jalan Provinsi	117,6	117,6	117,6	117,6	-	-	-	Km
	Jalan Kabupaten	509,8	617,5	642,9	648,29	642,9	864,747	-	Km
	Jalan Kecamatan	35,2	128,7	127,3	157,05	-	-	-	Km
3	**Kondisi Pengairan/Irigasi**								
3.1	Luas lahan Sawah Teraliri Jaringan Irigasi :								
	Irigasi Teknis	-	-	-	-	-	-	-	Ha
	Irigasi semi Teknis	-	-	-	-	-	-	-	Ha
	Irigasi sederhana (Irigasi desa)	-	-	-	-	-	-	-	Ha
4	**Sumber Daya Manusia**								
4.1	Persentase Penduduk 10 tahun keatas Menurut Tingkat Pendidikan								Th 2016, satuan Orang
	Tertinggi yang ditamatkan (L +P) :								
	Belum / tidak tamat SD	-	22,81	-	-	-	19,19	21.536	%
	SD	-	30,75	-	-	-	28,77	41.875	%
	SLTP	-	22,95	-	-	-	25,21	12.501	%

	SLTA	-	17,53	-	-	-	20,02	23.348	%
	D1/D2/D3	-	3,15	-	-	-	3,69	7.447	%
	D4/S1	-	2,8	-	-	-	2,96	4.976	%
	S2/S3	-	-	-	-	-	0,15	134	%
	SLTP+	-	46,43	-	-	-	-	-	%
4.2	Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan:								
	0-14 tahun	30,12	42,865	43,661	44,560	45,452	46,255	46,406	%
	15-64 tahun	60,42	97,753	96,511	98,494	100,424	102,231	104,809	%
	65 tahun +	9,46	6,100	6,214	6,343	6,476	6,584	7,008	%
	Angka Ketergantungan	65,5	51,676	51,678	51,681	51,709	51,686	50,96	%

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini sudah berumur 15 Tahun, situasi dan kondisi semakin kondusif dan banyak perkembangan yang telah dicapai sejak pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Keberadaannya yang sangat strategis untuk lintasan jalur Barat Selatan yang memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Meskipun Kabupaten Nagan Raya masih tergolong muda, namun secara perlahan Kabupaten Nagan Raya telah mampu berdiri sejajar dengan Kabupaten/kota lain di Aceh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih, diantaranya pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 kali berturut turut dari BPK RI Perwakilan Aceh sejak tahun 2008-2016 atas pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dan semua itu merupakan bukti nyata kerja keras dan keseriusan dalam membangun Kabupaten Nagan Raya yang lebih baik.

Meskipun laju pembangunan dan kehidupan masyarakat semakin dinamis, banyak tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Nagan Raya seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menimbulkan dampak pada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, adanya permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala daerah, Nasional dan Internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan gambaran umum tentang perekonomian dan keuangan yang telah disampaikan pada bab-bab

sebelumnya, permasalahan Kabupaten Nagan Raya diindentifikasikan sebagai berikut;

IV.1.1 Permasalahan Pembangunan

IV.1.1.1 Penerapan dan Pengamalan Syariat Islam;

Kabupaten Nagan Raya dalam sejarahnya merupakan kabupaten yang sangat komitmen dalam menjalankan syariat islam dan menerapkan nilai-nilai islam dalam semua tatanan masyarakat secara kaffah yang menjadi landasan pembangunan untuk melahirkan generasi dan masyarakat cerdas, beragama dan memiliki nilai budaya dengankarakter moral yang baik, maka penerapan syariat islam menjadi sangat penting dan isu strategis utama yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan masih banyak terjadi dan menjadi tantangan dalam melaksanakan penerapan nilai-nilai islam secara kaffah di Kabupaten Nagan Raya. Diantara permasalahan sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka pelanggaran terhadap Syariat Islam
2. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan (MUQ, TPA, Majelis Taklim) yang mampu membentuk karakter dan berkepribadian islam
3. Masih rendahnya mutu pendidikan dayah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
6. Masih kurangnya masyarakat yang memahami tata cara Tajhiz Mayat (Pemandian Mayat)

IV.1.1.2 Reformasi birokrasi, pemerintahan, partisipasi masyarakat dan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan yang masih terjadi di Nagan Raya adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bebas KKN, pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang mendukung Sistem manajemen pemerintahan dan belum optimalkan kinerja birokrasi
3. Belum tersedianya sistem *data base* yang terpadu dan terintegrasi
4. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dan penerapan PPRG dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

IV.1.1.3 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal, Industri dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Permasalahan dalam perberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Masih rendahnya kemampuan/ keterampilan masyarakat dalam mata pencaharian.
3. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
5. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah
6. Terbatasnya akses lapangan kerja
7. Masih rendahnya investasi sektor swasta.

IV.1.1.4 Sumberdaya manusia, pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya dibidang pendidikan, budaya, pemuda sebagai berikut;

1. Masih kurangnya aksesibilitas Pendidikan.
2. Masih rendahnya mutu pendidikan.

3. Belum terwujudnya lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing
4. Rendahnya tingkat literasi masyarakat
5. Masih rendahnya peran dan fungsi lembaga adat
6. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan
7. Masih rendahnya prestasi olah raga
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga

IV.1.1.5 Kesejahteraan sosial masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang sosial masyarakat dan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut;

1. Penerima subsidi listrik dan subsidi beras belum tepat sasaran
2. Belum adanya program asuransi kematian bagi masyarakat
3. Rendahnya ketrampilan dan terbatasnya modal usaha masyarakat miskin
4. Belum optimalnya penaggulangan masyarakat miskin dan rentan miskin
5. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dan diversifikasi pangan
6. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok perempuan
7. Belum optimalnya pemberdayaan kombatan dan korban konflik
8. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
9. Belum tersedianya Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
10. Masih tingginya angka pengangguran;
11. Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK)

IV.1.1.5 Kesehatan;

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif. Tanpa kondisi kesehatan prima, masyarakat Kabupaten Nagan Raya tidak akan produktif dan tidak akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.

Saat ini angka kesakitan masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih berkisar 1-10 hari dalam sebulan. Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Nagan Raya menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Rendahnya usia harapan hidup;
2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
3. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kesehatan dan para medis;
4. Masih minimnya tenaga kesehatan (dokter spesialis);
5. Masih terdapat kasus gangguan gizi (mal nutrisi);
6. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak;
7. Belum optimalnya pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda;
8. Belum terakreditasinya Puskesmas dan RSUD Sultan Iskandar Muda;

IV.1.1.6 Pembangunan infrastruktur, Pemukiman, Tata ruang, Komunikasi dan informasi, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Transmigrasi

Ketersediaan dan kemapaman infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut;

1. Masih terdapat akses antar wilayah yang belum memadai
2. Belum maksimalnya pengembangan kawasan strategis
3. Belum mememadainya sarana dan prasarana irigasi
4. Masih minimnya penanganan infrastruktur kebencanaan
5. Masih rendahnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat
6. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
7. Belum optimalnya pengelolaan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik

IV.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan secara internal sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta kondisi eksternal yang terjadi, maka beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun mendatang, yaitu:

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Kesenjangan / gap / disparitas antara daerah – daerah perbatasan dan terluar
2. Peningkatan kesejahteran petani dan program kedaulatan pangan
3. Kesenjangan pembangunan infrastruktur kota dan desa
4. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita
5. Pembagian wilayah – wilayah strategis dan cepat tumbuh
6. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan

Isu Strategis Provinsi Aceh meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik.
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan.
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan.
5. Pengembangan pertanian dan perikanan.
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan pariwisata.
8. Ketenagakerjaan.
9. Ketersediaan dan ketahanan energi.
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi.
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni.
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan.
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga.
15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan.
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Isu – isu Strategis Kabupaten Nagan Raya

1) Penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam

Isu strategis penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat Islam, meningkatkan kemakmuran mesjid, meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam seperti; MUQ, TPA, Majelis Taklim yang mampu membentuk karakter dan kepribadian yang islami. Selanjutnya peningkatan mutu pendidikan dayah juga menjadi skala prioritas disamping peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam.

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur

Isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang sederhana, berkualitas dan transparan. Disamping itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan sumberdaya aparatur yang handal, cerdas, tangkas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, oleh karenanya kemampuan sumber daya aparatur perlu terus ditingkatkan sesuai tupoksi.

3) Pengembangan sistem data base terintegrasi

Isu strategis pengembangan sistem data base terintegrasi diharapkan dapat menyediakan data dan informasi satu pintu yang mudah di akses sesuai kebutuhan, hal ini menjadi penting karena data dan informasi yang terpusat pada

satu sumber dapat dijadikan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.

4) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Isu strategis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ditujukan kepada upaya peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berbasis gender, karena disadari bahwa saat ini masih terdapat ketimpangan penerima manfaat pembangunan dalam berbagai hal antara laki-laki dengan perempuan termasuk dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses pekerjaan.

5) Pemberdayaan Ekonomi, Pengembangan Industri dan UMKM

Isu strategis pemberdayaan ekonomi Pengembangan Industri dan UMKM dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri, penguatan UKM, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, kerjasama dunia usaha, perluasan lapangan kerja, dan pengembangan potensi pariwisata seperti wisata pantai, danau, sungai, juga pengembangan wisata edukasi dan religi serta wisata kuliner. Di sisi lain peningkatan PAD dan investasi juga perlu terus didorong kearah pengalian dan optimalisasi sumber-sumber PAD yang potensial, selanjutnya menciptakan iklim investasi kondusif, kemudahan berbisnis dan promosi daerah juga menjadi langkah penting dalam mendokrak perekonomian daerah.

6) Penanggulangan Kemiskinan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada upaya menurunkan angka kemiskinan secara terukur. Selanjutnya upaya penanggulangan kemiskinan di arahkan kepada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan untuk mendukung mata pencaharian bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

7) Pelayanan pendidikan yang berkualitas

Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai pelayanan pendidikan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompentensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

8) Pelestarian kebudayaan

Isu pelestarian kebudayaan merupakan bagian penting dari pengejawantahan dari slogan *"Agama Ta Peukoeng Budaya Ta Jaga"* di fokuskan pada upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang mengakar dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Pelestarian kebudayaan juga diarahkan kepada penggalian situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya peran dan fungsi lembaga adat perlu di perkuat untuk menjaga eksistensi budaya lokal.

9) Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga

Isu peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga difokuskan pada upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan yang kreatif, inovatif dan positif. Disamping itu juga perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga yang

memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi olah raga pada even-even daerah dan nasional.

10)Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Isu Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat dititikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan penyaluran berbagai bantuan sosial yang lebih tepat sasaran seperti subsidi listrik dan subsidi beras. Selanjutnya mengenai prioritas pemerintah daerah dalam rangka pelaksaaan jaminan sosial kematian bagi masyarakat, dapat dilaksanakan dengan adanya pemberian santunan kematian bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku.

11)Optimalisasi Potensi Lahan

Isu Optimalisasi Potensi Lahan difokuskan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang ada termasuk lahan pekarangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung diversifikasi pangan di Kabupaten Nagan Raya.

12)Pemberdayaan Perempuan, Kombatan dan Korban Konflik serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Isu Pemberdayaan Perempuan, Kombatan dan Korban Konflik serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) difokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan, penanganan Kombatan dan Korban Konflik serta mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

13)Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

14)Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas

Isu Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas difokuskan pada Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan hingga ke wilayah terisolir sekaligus menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan transmigrasi. Selain itu, perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur dasar (Irigasi, Air Baku dan Infrastruktur Permukiman) dalam rangka peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

15)Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Isu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMK, maka isu-isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMK adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan Sosial;
2. Belum meratanya Pelayanan Kesehatan;
3. Belum meratanya infrastruktur daerah;
4. Rendahnya Daya Saing Daerah;
5. Pencemaran Lingkungan;
6. Alih Fungsi Lahan;
7. Belum tertatanya sistem pengelolaan lingkungan hidup;
8. Degradasi lahan; dan
9. Bencana Alam.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2017-2018 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Nagan Raya berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah "memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2019 adalah Nagan Carong, Nagan Seujahtera, Nagan Seumeugot, Nagan Sihat dan Nagan Meu Agama.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih agar menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 yang tertuang pada dokumen RPJMK

Nagan Raya Tahun 2017-2022 tersinkronisasi terhadap ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan yaitu :

1. memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal.
2. Pengembangan dan pemantapan beberapa kawasan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Kawasan strategis meliputi :
   - Kawasan strategis pariwisata (a. pariwisata religi dan budaya di Kecamatan Suka Makmue, Seunagan Timur dan Kecamatan Seunagan; b. Pariwisata alam dan ilmu di Kecamatan Suka Makmue, Tripa Makmur, Beutong dan Kecamatan Kuala Pesisir) ;
   - Kawasan indusri kecil dan menengah;
   - Kawasan pertanian dan perkebunan;
   - Kawasan hasil perikanan.
3. Penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan perikanan Langkak, peningkatan kapasitas bandara Cut Nyak Dhien dan sarana transportasi lainnya, sebagai pendukung untuk kebutuhan beberapa kawasan strategis tersebut.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dilakukan dengan mencetak SDM yang handal dan berdaya saing dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan, sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan dayah/pesantren, sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
5. Penguatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dicapai melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan sesuai standar.
7. Peningkatan jumlah dan standarisasi sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah (terakreditasi), puskesmas /pustu. Untuk tercapainya masyarakat Nagan Raya yang sehat juga dengan optimalisasi layanan

kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal.

8. Penguatan Syariat Islam sebagai fokus pembangunan masyarakat Nagan Raya yang berkarakter islami.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 dan Tahun 2018

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Nagan Raya tahun 2016-2017, proyeksi perekonomian Tahun 2018, perekonomian Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Nagan Raya serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Nagan Raya masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
4) Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Memperhatikan kondisi yang telah lalu dan sedang berkembang saat ini, maka perekonomian Kabupaten Nagan Raya diproyeksikan akan tetap dapat

tumbuh relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum kondisi dan pertumbuhan ekonomi Nagan Raya akan mengalami perubahan apabila faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat dapat di manfaatkan secara optimal.

Tanda-tanda peningkatan terlihat pada Tahun 2012 dengan angka pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Pertumbuhan ini terus dilanjutkan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin stabil di Tahun 2015, yaitu sebesar 3,89 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2015 dicapai oleh katagori pengadaan listrik dan gas sebesar 18,30 persen. Pertumbuhan yang tinggi dikategori ini akan memberikan manfaat besar bagi kabupaten Nagan Raya sebagai kategori penunjang seluruh kegiatan ekonomi di Wilayah Nagan Raya. Hal ini karena listrik sangat dibutuhkan dalam meningkatkan output kategori lainnya. Selain itu, kategori konstruksi juga tumbuh relatif tinggi tahun 2015 yaitu 8,99 Persen. Hal ini karena banyaknya pembangunan fisik yang berlangsung dikabupaten Nagan Raya pada Tahun 2015. Pembangunan tersebut diantaranya pembangunan PLTU Unit II, Mesjid Giok, Pembangunan sarana dan prasarana pertumbuhan MTQ Ke XXXII tingkat provinsi Aceh Tahun 2015.

Kategori pertanian yang menjadi kunci penggerak perekonomian Nagan Raya terus tumbuh pada Tahun 2015 yaitu sebesar 6,34 persen adapun kategori-kategori lainnya mencatat pertumbuhan positif kecuali kategori pertambangan dan penggalian. Kategori ini mencatat pertumbuhan negatif karena berkurangnya nilai tambah dari hasil pertambangan terutama hasil eksplorasi komoditas tambang. Padahal sub kategori ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian Nagan Raya khususnya, dan Provinsi Aceh umumnya.

c. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

- **Peranan Sektor Strategis**

  Berdasarkan data yang ada, tidak dapat pungkiri sektor pertanian sampai dengan tahun 2015 merupakan sektor unggulan di Kabupaten Nagan Raya. Di dukung oleh luas lahan yang sangat memadai dan perkembangan teknologi pertanian yang semakin memasyarakat, maka

sektor ini ke depan masih dapat memberiikan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan dukungan dan komitmen semua pemangku kepentingan secara konsisten maka peran sektor pertanian dapat diperluas untuk mendukung berkembangnya industri pengolahan yang berbasis produk pertanian. Pengembangan ke arah industri akan memberikan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat yang akhirnya juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

Dukungan lain untuk mengoptimalkan peran sektor pertanian dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dilakukannya upaya perbaikan melalui revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian dimaksudkan sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan petani, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan daerah, dengan tidak menngabaikan sektor lainnya.

Revitalisasi tidak dilakukan dengan pola-pola terpusat yang sentralistik dan orientasi proyek, akan tetapi berupa penggalangan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan merubah paradigma pola pikir masyarakat untuk melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanamyang sekedar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi.

- **Peranan Investasi Bagi Pembanguan Daerah**

Investasi swasta dirasakan semakin penting mengingat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terbatas, sehingga sulit untuk selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak pengganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan

transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

- **APBD Sebagai Instrumen Pertumbuhan**

  Sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan APBD dapat mempertimbangkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan daerah. Dari fungsi alokasi belanja daerah dilakukan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan publik yang di butuhkan oleh masyarakat yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu belanja daerah juga dapat dialokasikan dalam kerangka investasi. Investasi yang dilakukan harus pada sektor-sektor prioritas yang dimilki daerah sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan akhirnya dapat memperbaiki pendapatan masyarakat. Sektor prioritas yang di maksud adalah sektor infrastruktur dan sektor-sektor yang mampu memberikan nilai tambah dan output yang cukup tinggi bagi perekonomian serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu investasi belanja daerahjuga diharapkan dapat dialokasikan pada hal-hal yang dapat mendorong kinerja sektor riil, seperti perbaikan sistem pelayanan, infrastruktur, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan dana stimulan, pemberian modal usaha dan bantuan teknis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber–sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang–undangan (*money follow function*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Nagan Raya lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b)Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah.
- Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing–masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah.
- Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Rayaakan mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian

berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga.

Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur.

Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui penajaman pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya sejak lima tahun yang lalu, selain mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, Pemerintah

Kabupaten Nagan Raya memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana AlokasiKhusus.
3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana BagiHasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana OtonomiKhusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya,dan

a. Pendapatan Asli Daerah

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasal 180 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas ; 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal 4) Zakat; dan 5) Lain-lain PAD yang Sah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nagan Raya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek danintensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3) Pendayagunaan asset daerah;
4) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagaiPeraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2018

No.	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	Proyeksi/Target Rencana 2018
I.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	37.942.005.577,87	65.177.801.946,00	44.247.961.697	9.806.535.978,50	10.797.189.576,00	11.876.908.533.60
I.1.1	Pajak Daerah	5.866.374.609,00	11.012.306.021,00	10.128.000.000	2.645.301.089,00	2.909.831.198,00	3.200.814.317.80
I.1.2	Retribusi Daerah	1.574.093.193,00	10.947.824.162,00	8.164.698.270	1.384.193.800,00	1.522.613.180,00	1.674.874.498.00
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.590.826.387,67	1.802.961.121,07	1.700.000.000	83.000.000,00	91.300.000,00	100.430.000.00
I.1.4	Lain2 PAD	25.390.685.467,20	38.142.136.832,41	20.255.263.427	3.883.302.085,00	4.271.632..294,00	4.698.795.523.40
I.1.5	Zakat/infak/sadaqah	3.520.025.921,00	3.272.573.810,00	4.000.000.000	1.810.739.004,50	1.991.812.905,00	2.190.994.195.50

Sumber : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

PAD Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2013 – 2016 mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya 55,55% dimana PAD terbesar terjadi pada Tahun 2014 yaitu Rp. 65.177.801.946,00 atau sebesar 71.78 % terhadap Tahun 2013 yang hanya sebesar Rp. 37.942.005.577,87. Peningkatan PAD pada Tahun 2014 terjadi adanya pemasukan PBB sudah mulai milik daerah dan peningkatan selanjutnya yaitu di Tahun 2014 tingginya realisasi JKN serta restribusinya meningkat, Dana BOS, BLUD dan BPHTB (perusahaan daerah yang membayar pajak sampai 7 (Tujuh) Miliyar).

Untuk Tahun 2017, proyeksi/target PAD Kabupaten Nagan Raya ditetapkan sebesar Rp. 10.797.189.576,00 sebesar 10,10% dari Tahun 2016 yang sebesar Rp.9.806.535.978,50. Sedangkan untuk Tahun 2018, proyeksi/target PAD Kabupaten Nagan Raya ditetapkan sebesar Rp. 11.876.908.533,60.

Tabel 3.4
Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2016

No.	URAIAN	Pertumbuhan (%)				Pertumbuhan Rerata (%)
		2013	2014	2015	2016	
I.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**37,03**	**71,78**	49,86	63,56	55,55%
I.1.1	Pajak Daerah	13,30	87,72	15,01	51,09	41,78%
I.1.2	Retribusi Daerah	(88,20)	595,50	58,19	24,56	147,51%
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	34,18	13,33	35,00	100,96	45,86%
I.1.4	Lain2 PAD	459,94	(50,22)	78,45	63,56	137,93%
I.1.5	Zakat/infak/sadaqah	920,30	(7,03)	72,32	48,34	84,49%

Sumber : : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Dana perimbangan dari Tahun 2013 s/d 2016 mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 9,02 % yang didominasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Dana Perimbangan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	Proyeksi/Target Rencana 2018
I.2	**Dana Perimbangan**	560.709.513.544,00	603.398.936.007,00	641.728.837.780,00	303.326.883.317,00	-	-
I.2.1	Bagi Hasil Pajak	25.024.494.362,67	15.549.179.278,00	35.875.125.279,33	5.622.300.317,00	17.881.551.000	19.669.706.100
I.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	12.512.247.181,33	12.349.175.729,00	17.937.562.639,67		4.533.685.000	4.987.053.500
I.2.3	Dana Alokasi Umum	464.191.402.000,00	500.941.291.000,00	500.941.291.000,00	85.933.716.000,00	171.867.432.000	189.054.175.200
I.2.4	Dana Alokasi Khusus	58.981.370.000,00	74.559.290.000,00	74.559.290.000,00	211.770.867.000,00	110.354.495.000	121.389.944.500

Sumber : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

- **Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 3) Pajak Penghasilan (PPh).

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : 1) Kehutanan; 2) Pertambangan; 3) Perikanan; 4) Pertambangan Minyak Bumi; 5) Pertambangan Gas Bumi; dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2015 sebesar Rp. 35.875.125.279,33,- artinya mengalami peningkatan sebesar 131 % dibandingkan anggaran Tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2016, realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak yaitu sebesar Rp. 5.662.300.317,00,- atau mengalami penurunan sebesar (84) % dibandingkan anggaran Tahun 2015.

Untuk Tahun 2018, penerimaan dari Dana bagi Hasil Pajak diproyeksikan hingga Rp. 19.669.706.100,- atau meningkat 218 % dari Realisasi penerimaan Tahun 2016.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun 2015 sebesar Rp.17.937.562.639,67,- artinya mengalami peningkatan sebesar 45,3% dibandingkan anggaran Tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2016, tidak ada realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Untuk Tahun 2017, penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan hingga Rp. 4.533.685.000,- atau mengalami penurunan (74,72) % dari Realisasi penerimaan Tahun 2015.

Sedangkan Untuk Tahun 2018, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan hingga Rp. 4.987.053.500,-.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana perimbangan yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejak Tahun 2013 hingga 2016 meningkat rata-rata sebesar 6,94 %. Di Tahun 2016,

Realisasi DAU yang diterima sebesar Rp. 85.933.716.000,- atau menurun sebesar (83) % dari Tahun 2015 sebesar Rp. 500.941.291.000,-.

Untuk Tahun 2017, diproyeksikan DAU sebesar Rp. 171.867.432.000,- atau meningkat sebesar 100 % dari realisasi Tahun 2016. Sedangkan untuk Tahun 2018, diproyeksikan DAU tidak sama dengan proyeksi Tahun 2017 yaitu meningkat sebesar Rp. 189.054.175.200,-.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Adapun komponen dana perimbangan lainnya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak Tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya sebesar 46,46%. Di Tahun 2016, realisasi DAK sebesar Rp. 211.770.867.000,- atau meningkat sebesar 184 % dari Tahun 2015 yang realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp. 74.559.290.000,-.

Untuk Tahun 2017, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp. 110.354.495.000,- atau menurun (47,88) % dari realisasi Tahun 2016 sebesar Rp. 211.770.867.000,-. Sedangkan untuk Tahun 2018, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan meningkat dari Proyeksi Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 121.389.944.500,-.

Tabel 3.6
Pertumbuhan Rata-rata Penerimaan Dana Perimbangan
Kabupaten Nagan Raya (2014 – 2016)

No.	URAIAN	Tahun			Pertumbuhan Rerata (%)
		2014	2015	2016	
I.2	**Dana Perimbangan**	*7,61*	*2,63*	*4,79*	*9.02*
I.2.1	Bagi Hasil Pajak	*(37,86)*	*(1.81)*	*(2,45)*	*(12.13)*
I.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	*(1,30)*	*(39,67)*	*(65.08)*	*(23.70)*
I.2.3	Dana Alokasi Umum	*7,92*	*0,43*	*2.49*	*6.94*
I.2.4	Dana Alokasi Khusus	*26,41*	*19,46*	*25.31*	*46.46*

Sumber : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi dan proyeksi/target Pendapatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 s/d 2018

No.	URAIAN	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	Proyeksi/Target Rencana 2018
I.3		38.142.136.832,41	220.367.396.221,00	220.367.396.221	242.404.135.843	266.644.549.427
I.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
I.3.2	Dana Darurat		-	-	-	-
I.3.3	Bantuan Dana Kontigensi	-	-	-	-	-
I.3.4	**Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah**	15.036.349.708,00	15.036.349.708,00	15.036.349.708	16.539.984.677	18.193.983.145
I.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov	145.833.596.496,00	145.845.274.513,00	145.845.274.513	160.429.801.164	176.472.781.280
I.3.6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.485.772.000,00	59.485.772.000,00	59.485.772.000	64.334.349.200	70.767.784.120

Sumber : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata meningkat sebesar 55,55% persen.

Konstribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun yang lalu, rata-rata masih didominasi oleh Dana Perimbangan, teristimewa dari jenis Dana Alokasi Umum (DAU). Ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya masih sangat tergantung pada peranan pusat melalui Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah sejak awal telah menempuh berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Penyempurnaan qanun menyangkut dengan objek dan tarif, serta pengembangan objek-objek pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terus diupayakan setiap tahunnya. Begitu pula kebijakan-kebijakan berkenaan dengan keuangan daerah ditempuh semaksimal mungkin, baik peningkatan jumlah anggaran, pengelolaan anggaran dan prioritas anggaran. Atas dasar ini, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menempuh

kebijaksanaan untuk menetapkan pertumbuhan pendapatan daerah yang dinilai lebih tepat.

Tabel 3.8
Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Pendapatan Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2016
yang Dinilai Relatif Tepat dan Wajar

No.	*U r a i a n*		*Pertumbuhan Rata-rata (2013 – 2016) (%)**	*Pertumbuhan yang Relatif Tepat dan Wajar (%)***
1	***Pendapatan Asli Daerah***		***25.14***	35.14
	1.1	Pajak Daerah	42.46	52.46
	1.2	Retribusi Daerah	105.51	115.51
	1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	27.36	37.36
	1.4	Zakat	60.75	70.75
	1.5	Lain-lain PAD yang Sah	112.10	112.1
2	***Dana Perimbangan***		***9.02***	19.02
	2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	(35.83)	45.83
	2.3	Dana Alokasi Umum	6.94	16.94
	2.4	Dana Alokasi Khusus	46.46	56.46
3	***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah***		***33.25***	43.25
	3.1	Hibah	(100.00)	110
	3.2	Dana Darurat	-	-
	3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.06	45.06
	3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	101.11	111.11
	3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(4.65)	14.65
	3.6	Pendapatan Lainnya	-	-
Pert. Rata-rata Pendapatan (%)			**22.47**	**32.47**

Sumber : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

b. Belanja daerah berupa hibah dan bantua sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga *(standby budget)* terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
e. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPK diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
f. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan Tahun 2016.
g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 -2016 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 - 2016
(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Realisasi Belanja Daerah (Rp)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	***BELANJA TIDAK LANGSUNG***		***285.543.921.397,00***	***294.418.975.794,00***	***332.133.985.725.50***	***383.150.360.902***	***553.227.707.295.00***
	1.1	Belanja Pegawai	274.329.565.227,00	245.856.444.356,00	313.132.453.230	303.255.573.847	332.562.859.330.00
	1.2	Belanja Bunga					-
	1.3	Belanja Subsidi					-
	1.4	Belanja Hibah	400.340.000,00	12.107.122.820,00	11.595.541.495	12.265.500.000	20.982.719.200.00
	1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.146.850.000,00	822.400.000,00	1.241.920.000	2.156.000.000	2.783.400.000.00
	1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Pemerintahan Desa	3.542.220.567,00	120.340.086,00			-
	1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/ Pemerintahan Desa	-	26.637.614.135,00	5.550.000.000	64.283.041.255	175.429.068.765.00
	1.8	Belanja Tidak Terduga				1.190.245.800	1.469.660.000.00
2	***BELANJA LANGSUNG***		**245.968.447.290,00**	**327.934.750.904,00**	**566.652.123.581**	**667.210.058.180**	**610.062.260.653.07**
	2.1	Belanja Pegawai	58.829.494.754,00	62.342.794.875,00	68.362.227.674	64.863.291.334	71.656.661.191.00
	2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.236.953.932,00	88.137.523.138,00	149.208.172.534	203.199.078.577	205.615.415.718.18
	2.3	Belanja Modal	153.868.302.218,00	95.488.129.277,00	349.081.723.373	399.147.688.269	332.790.183.743.89
	TOTAL BELANJA		**531.512.368.687,00**	**622.353.726.698,00**	**898.786.109.306**	**1.050.360.419.082**	**1.143.289.967.948.07**
	TOTAL PENDAPATAN		**527.510.787.205,44**	**639.662.970.801,99**	**889.969.621.595**	**1.028.697.943.289,39**	**1.149.196.330.155.43**
	SURPLUS/DEFISIT		**(4.001.581.481,56)**	**(17.309.244.103,99)**	**(8.816.487.710,93)**	**(21.662.475.800,61)**	**5.906.362.207.36**

Sumber : BPPKD Kabupaten Nagan Raya

abel 3.10
Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 - 2019
(Dalam Rupiah)

No	*Uraian*		*Tahun*				
			*2015**	*2016***	*2017***	*2018***	*2019***
1	***BELANJA TIDAK LANGSUNG***		**390.292.649.495**	**307.049.028.574**	**306.321.026.910**	**336.953.129.601**	**367.585.232.292**
2	***BELANJA LANGSUNG***		**540.785.334.443**	**375.282.146.035**	**404.803.428.968**	**445.283.771.865**	**485.764.114.762**
	2.1	Belanja Pegawai	65.844.958.350	93.557.936.188	93.557.936.188	102.913.729.807	112.269.523.426
	2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.854.394.033	201.112.728.970	201.112.728.970	221.224.001.867	241.335.274.764
	2.3	Belanja Modal	170.582.793.652	221.002.998.868	221.002.998.868	243.103.298.755	265.203.598.642
	TOTAL BELANJA		**931.077.983.938**	**682.331.174.609**	**747.124.455.878**	**821.836.901.466**	**896.549.347.054**
	TOTAL PENDAPATAN		**896.344.195.698**	**682.331.174.609**	**747.124.455.878**	**821.863.901.466**	**896.549.347.054**
	SURPLUS/DEFISIT		**-(34.733.788.240)**	**-**	**-**	**-**	**-**

**) : BPPKD Kabupaten Nagan Raya*

Pertumbuhan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami pertumbuhan rata-rata yang wajar terutama belanja tidak langsung mencapai 18,92%. Komposisi peningkatan pertumbuhan tertinggi dari item belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial meningkat sangat tinggi hingga sebesar 32,241% . Untuk belanja pegawai pertumbuhannya sebesar 5,87%, sementara belanja bagi hasil kepada provinsi menurun sebesar (24,92) %.

Untuk belanja langsung secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata 28,82%, dengan komposisi pertumbuhan dari item belanja langsung adalah belanja modal sebesar 56,34%. Belanja barang dan jasa sebesar 20,79% dan belanja pegawai sebesar 5,25%. Kedepan diharapkan belanja tidak langsung dapat meningkat secara bertahap dalam upaya pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2014, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2018 di Kabupaten Nagan Raya antara lain diarahkan untuk :

a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu;
b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam; dan
c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal melalui transaksi dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2018 (Dalam Rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2014)	Realisasi Tahun (2015)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2016)	Proyeksi/Target pada Tahun (2017)	Proyeksi/Target pada Tahun (2018)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	-	30.929.882.559.83	69.420.839.553.00	76.362.923.508,00	83.999.215.858.80
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	36.733.788.240,00	30.929.882.559.89	69.420.839.553.00	76.362.923.508,00	83.999.215.858.80
3.1.2	Koreksi Penambahan Saldo Awal BLUD	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**36.733.788.240,00**	**29.929.882.559.85**	**64.420.839.553.00**	**76.362.923.508,00**	83.999.215.858.80
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2.000.000.000,00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.000.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**23.937.126.116,166**	**34.733.788.240.00**	**34.646.762.037.00**	**64.420.839.553.000**	**27.199.764.755.000**

Sumber: *: BPPKD Kabupaten Nagan Raya*

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan Visi Kabupaten Nagan Raya mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Nagan Raya, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan berdasarkan visi, misi serta program kepala daerah terpilih agar menjamin keberlanjutan arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 -2022. Visi kepala daerah terpilih sebagai berikut:

"Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat Islam"

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022 ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. **Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah;**
2. **Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan;**
3. **Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;**
4. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;**
5. **Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;**

6. **Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat;**
7. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah;**

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan RPJMD kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi / Misi dan Tujuan Pembangunan Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat Islam

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Mengimplementasikan Nilai-nilai Keislaman dan Syariat Islam secara kaffah	Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah	1. Menurunnya jumlah pelanggaran syariat islam; 2. Berkembangnya Lembaga Pendidikan Islami; 3. Meningkatnya Mutu Pendidikan

		yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman	Dayah; 4. Meningkatkan Kemakmuran Mesjid; 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS; 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat; 7. Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-Quran dan Hadist.
2	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government)	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel; 2. Meningkatnya kinerja birokasi yang berkualitas; 3. Tersedianya sistem *data base* yang terpadu dan terintegrasi; 4. Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik; 6. Terwujudnya pelaksanaan Musrena; 7. Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG.
3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin; 2. Menurunnya angka pengangguran.
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal; 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah; 3. Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah; 4. Meningkatnya ketahanan pangan.

4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	1. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata; 2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik; 3. Meningkatnya ketersedian dan kualitas pendidikan anak usia dini; 4. Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing; 5. Meningkatnya minat dan kemampuan masyarakat dalam literasi.
		Melestarikan adat istiadat dan budaya	1. Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat; 2. Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan.
		Meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga	1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan; 2. Meningkatnya prestasi olahraga.
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin; 2. Meningkatnya kesejahteraan PMKS; 3. Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan; 4. Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik; 5. Meningkatnya ketahanan keluarga.
		Mewujudkan perlindungan sosial masyarakat	1. Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat.
6	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas mewujudkan masyarakat yang sehat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup; 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Meningkatnya status RSU Nagan Raya.
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan	Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana	1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; 2. Terwujudnya pengembangan

	kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah	sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat	kawasan strategis; 3. Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian; 4. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana; 5. Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat; 6. Tersedianya rumah layak huni; 7. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik; 8. Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif.

4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Pengembangan dan pemantapan beberapa kawasan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Kawasan strategis meliputi :

1. Kawasan strategis pariwisata (a. pariwisata religi dan budaya di Kecamatan Suka Makmue, Seunagan Timur dan Kecamatan Seunagan; b. Pariwisata alam dan ilmu di Kecamatan Suka Makmue, Tripa Makmur, Beutong dan Kecamatan Kuala Pesisir);
2. kawasan indusri kecil dan menengah;
3. Kawasan pertanian dan perkebunan;
4. Kawasan hasil perikanan.

Dengan demikian penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan perikanan Langkak, peningkatan kapasitas bandara Cut Nyak Dhien dan sarana transportasi lainnya, sebagai pendukung untuk kebutuhan beberapa kawasan strategis tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dilakukan dengan mencetak SDM yang handal dan berdaya saing dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan, sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan dayah/pesantren, sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi dan

kebutuhan daerah. Selain itu, untuk mencapai kualitas SDM yang handal keterlibatan pemuda juga sangat diharapkan. Oleh karena itu, penguatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan juga sangat penting. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dicapai melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan sesuai standar. Peningkatan jumlah dan standarisasi sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah (terakreditasi), puskesmas /pustu. Untuk tercapainya masyarakat Nagan Raya yang sehat juga dengan optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Syariat Islam perlu dilanjutkan sebagai fokus pembangunan masyarakat Nagan Raya yang berkarakter islami.

Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah "**memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal"**.

Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2019 adalah Nagan Carong, Nagan Seujahtera, Nagan Seumeugot, Nagan Sihat dan Nagan Meu Agama.

Dengan 4 (empat) isu strategis pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman;
2. Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam mendukung terlaksananya 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya (RPJMD) dan Isu strategis pembangunan Kabupaten Nagan Raya (RKPK) Tahun 2019, maka pada Tahun 2019 prioritas dan sasaran pembangunan dititik beratkan pada :

1. **Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman,** dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam;
   2. Berkembangnya lembaga pendidikan islami;
   3. Meningkatnya mutu pendidikan dayah;
   4. Meningkatnya Kemakmuran Masjid;
   5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS;
   6. Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist.

2. **Menurunkan Tingkat Kemiskinan,** dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;
   2. Menurunnya angka pengangguran;

   Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal;
   2. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;
   3. Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah;
   4. Meningkatnya ketahanan pangan.

3. **Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat,** dengan sasaran sebagai berikut :
   1. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;
   2. Terwujudnya pengembangan kawasan strategis;
   3. Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian;

4. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana;
5. Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat;
6. Tersedianya rumah layak huni;
7. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.;
8. Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif.

Isu – isu Strategis Kabupaten Nagan Raya

Penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam

Isu strategis penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat Islam, meningkatkan kemakmuran mesjid, meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam seperti; MUQ, TPA, Majelis Taklim yang mampu membentuk karakter dan kepribadian yang islami. Selanjutnya peningkatan mutu pendidikan dayah juga menjadi skala prioritas disamping peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur

Isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang sederhana, berkualitas dan transparan. Disamping itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan sumberdaya aparatur yang handal, cerdas, tangkas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, oleh karenanya kemampuan sumber daya aparatur perlu terus ditingkatkan sesuai tupoksi.

Pemberdayaan Ekonomi, Pengembangan Industri dan UMKM

Isu strategis pemberdayaan ekonomi Pengembangan Industri dan UMKM dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri, penguatan UKM, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, kerjasama dunia usaha, perluasan lapangan kerja, dan pengembangan potensi pariwisata seperti wisata pantai, danau, sungai, juga pengembangan wisata edukasi dan religi

serta wisata kuliner. Di sisi lain peningkatan PAD dan investasi juga perlu terus didorong kearah pengalian dan optimalisasi sumber-sumber PAD yang potensial, selanjutnya menciptakan iklim investasi kondusif, kemudahan berbisnis dan promosi daerah juga menjadi langkah penting dalam mendokrak perekonomian daerah.

Penanggulangan Kemiskinan

Isu strategis penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada upaya menurunkan angka kemiskinan secara terukur. Selanjutnya upaya penanggulangan kemiskinan di arahkan kepada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan untuk mendukung mata pencaharian bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Pelayanan pendidikan yang berkualitas

Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai pelayanan pendidikan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompentensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Optimalisasi Potensi Lahan

Isu Optimalisasi Potensi Lahan difokuskan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang ada termasuk lahan pekarangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung diversifikasi pangan di Kabupaten Nagan Raya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas

Isu Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas difokuskan pada Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan hingga ke wilayah terisolir sekaligus menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan transmigrasi. Selain itu, perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur dasar (Irigasi, Air Baku dan Infrastruktur Permukiman) dalam rangka peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Isu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan pembangunan yang telah dituangkan pada bab-bab terdahulu, yang penyajiannya dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan. Seluruh program dan kegiatan dalam Rancangan Awal RKPK ini berdasarkan pada visi, misi serta program kepala daerah terpilih agar menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 khususnya pada Tahun 2019.

Permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang begitu luas secara subtansi tidak mungkin diatasi dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBK Nagan Raya yang sangat terbatas. Disamping itu, pada kenyataannya proses pembangunan yang sudah berjalan selama ini sudah merupakan perwujudan dari dukungan seluruh peran pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya, baik melalui pendanaan APBN, APBA, pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Status kegiatan pada Rancangan Awal RKPK ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2019 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPK sebagaimana Tabel 5.1 berikut :

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS/BADAN DAN KANTOR
PERENCANAAN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (2019)	Prakiraan Maju (2020)	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPK	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Belanja Langsung													
	Program	Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman	1. Menurunnya jumlah pelanggaran syariat islam											
	Kegiatan													
	Program		2. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islami											
	Kegiatan													
	Program		3. Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah											
	Kegiatan													
	Program		4. Meningkatkan Kemakmuran Mesjid											
	Kegiatan													
	Program		5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS											
	Program		6. Peningkatan Kemampuan Petugas Tajhiz Mayat											
	Kegiatan													
	Program	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan											
	Program		2. Menurunnya Angka Kemiskinan											
	Kegiatan													
	Program		3. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin											
	Program		4. Menurunnya angka pengangguran											
	Kegiatan													
	Program		5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
	Program		6. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal											
	Kegiatan													
	Program		7. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah											
	Kegiatan													
	Program		8. Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah											
	Program		9. Terwujudnya ketahanan pangan											
	Kegiatan													
	Program	Meningkatkan pembangunan infrastrukturberdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah	1. Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat											
	Kegiatan													
	Program		2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah.											
	Kegiatan													
	Program		3. Terwujudnya pengembangan kawasan Strategis											
	Program		4. Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian											
	Program		5. Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana											
											-	-		

BAB VI
PENUTUP

Rancangan Awal RKPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dalam proses penyusunannya berdasarkan pada RPJP, RTRW, dan RPJM Kabupaten Nagan Raya. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang lebih efektif dan optimal untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian terdapat keterkaitan antar dokumen perencanaan karena dokumen yang lebih tinggi kedudukannya tersebut bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara optimal.

Dokumen Rancangan Awal RKPK tahun 2019 menjelaskan tentang: (1) evaluasi hasil pelaksanaan RKPK tahun lalu serta isu strategis dan masalah mendesak; (2) rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; (3) prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019; dan (4) rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2019 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Nagan Raya sesuai dengan urusan pemerintahannya. SKPK menyampaikan rencana kerja masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Nagan Raya Tahun 2019 dijadikan sebagai cikal bakal penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Kedua dokumen perencanaan tersebut nantinya akan menjadi acuan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.

BUPATI NAGAN RAYA

M. JAMIN IDHAM